

**BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PROSES PEMBANGUNAN PRASARANA PERKOTAAN**

(Studi Kasus Pembangunan Pengolah Limbah Cair di Kel. Mergosono Kota Malang)

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota**

Oleh :

**NAMA : DIDIK ARY SURYANTO
NIM : L4D002013**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 19 Februari 2004



DIDIK ARY STRYANTO
NIM L4D002013

**BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES
PEMBANGUNAN PRASARANA PERKOTAAN**

(Studi Kasus Pembangunan Pengolah Limbah Cair Manusia di Kel. Mergosono Kota Malang)

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

DIDIK ARY SURYANTO
L4D002013

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 19 Pebruari 2004

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

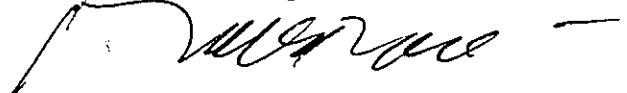
Semarang, 19 Pebruari 2004

Pembimbing Pendamping

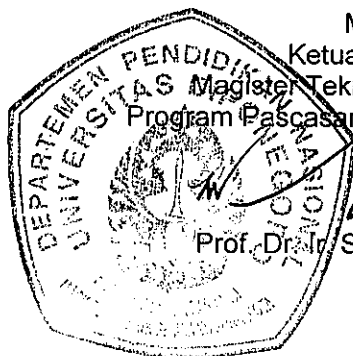


Ir. Parfi Khadiyanto, MSL

Pembimbing Utama



Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc.



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

Teruntuk anak-anakku :
NIOR ARYNDRA
ADINDA RISKI ARYSTA
ANANTA ARYO PAMUNGKAS
RAMADHAN ADE ARYO PAMUNGKAS
ARY REDIANSYAH
Terima kasih atas segala pengorbananmu

Secara istimewa buat istriku tercinta :
RETNO PRIHANDARI
Terima kasih atas pendampingannya

Tak lupa kepada kedua orang tuaku terkasih :
Arijadi dan Sri Suharti Suryaningwulan (Alm.)
Juga adiku (II) tersayang :
Dandu Mariono dan Ririk Dyah Retnowulan
Atas segala doa dan dukungannya

KATA PENGANTAR

Kiranya tiada kata yang paling indah untuk diucapkan kecuali puji syukur Alhamdulillah kami haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan petunjuk, rahmat dan hidayahNya sehingga tugas ini dapat diselesaikan.

Penyusunan tulisan ini merupakan wujud kepedulian penulis terhadap kelestarian lingkungan pada umumnya dan Kota Malang pada khususnya. Dalam rangka memenuhi tugas akhir ini maka penulis mengambil suatu permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan dengan judul "*Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Prasarana Perkotaan*" yang merupakan Studi Kasus Pembangunan Pengolah Limbah Cair Manusia di Kelurahan Mergosono Kota Malang.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc., selaku Mentor yang telah memberikan banyak masukan sehingga dapat mempercepat penyelesaian tulisan ini.
2. Ir. Parfi Khadiyanto, MSL., selaku Co-Mentor yang telah banyak memberikan saran masukan demi sempurnanya tulisan ini.
3. Ir. Mardwi Rahdriawan, MT., selaku pembahas yang mengarahkan kami selama penyempurnaan tulisan ini.
4. Ir. Ragil Haryanto, MSP., selaku penguji yang melengkapi penyempurnaan tulisan ini.
5. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo DEA, selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota (MTPK) yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan studi..
6. Rekan-rekan CBUIM V serta berbagai pihak yang telah banyak membantu sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Saya menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak terdapat kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan waktu, pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan tugas ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Semarang, 19 Pebruari 2004

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Kerangka Teoritis	6
1.4. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi	9
1.4.1. Tujuan Studi	9
1.4.2. Sasaran Studi	9
1.4.3. Manfaat Studi	10
1.5. Ruang Lingkup	10
1.4.1. Ruang Lingkup Materi (Substansial)	10
1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah (Spatial)	11
1.6. Pendekatan studi dan Metode Penelitian	17
1.6.1. Pendekatan Studi	17
1.6.2. Metode Penelitian	18
1.6.2.1. Metode Penelitian Deskriptif (<i>Descriptive Research</i>)	18
1.6.2.2. Metode penelitian Survei (<i>Field Research</i>)	18
1.6.2.3. Metode Penelitian Komparatif (<i>Comparative Research</i>).....	19
1.7. Teknik Pengambilan Sampel	19
1.8. Teknik Analisis	20

1.9. Teknik Penskalaan	22
1.9.1. Skala Likert	22
1.9.2. Transformasi Data	22
1.10. Sistematika Penulisan	22

BAB II. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

PRASARA PERKOTAAN	24
2.1. Partisipasi Masyarakat	24
2.1.1. Pengertian Partisipasi	24
2.1.2. Tipe-tipe Partisipasi Masyarakat	27
2.1.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat	30
2.1.4. Efektivitas Partisipasi Masyarakat	32
2.1.5. Tolok Ukur Partisipasi Masyarakat	33
2.1.6. Motivasi dan Hambatan Masyarakat dalam Berpartisipasi	38
2.1.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	39
2.2. Pembangunan	41
2.3. Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat	44
2.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	46
2.5. Prasarana Lingkungan	47
2.5.1. Pengelolaan Limbah Cair Manusia	48
2.5.1.1. Pengertian Limbah Cair Manusia	48
2.5.1.2. Sistem Pengumpulan Limbah Cair Manusia	50
2.5.1.3. Sistem Pembuangan Limbah Cair Manusia	50
2.5.1.4. Sistem Pengolah Limbah Cair Manusia	53
2.6. Kaitan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Limbah Cair Manusia	53

BAB III. KEADAAN MASYARAKAT DAN BANGUNAN PENGOLAH LIMBAH CAIR MANUSIA DI KELURAHAN MERGOSONO KOTA MALANG.....

3.1. Lokasi Studi	55
3.2. Keadaan Masyarakat	57
3.3. Kondisi Masyarakat Lebih Terperinci.....	61
3.4. Hubungan Antar Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat.....	68

3.4.1.	Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Jenis Kelamin	69
3.4.2.	Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Usia ...	71
3.4.3.	Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Tingkat Pendidikan	73
3.4.4.	Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Jenis Pekerjaan	76
3.4.5.	Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Tingkat Pendapatan.....	79
3.4.6.	Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Lama Tinggal	81
3.5.	Bangunan Pengolah Limbah Cair Manusia	82

BAB IV. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PENGOLAH LIMBAH CAIR MANUSIA DI KELURAHAN Mergoso Kota Malang..... 87

4.1.	Bentuk dan tingkat Partisipasi Masyarakat	87
4.1.1.	Bentuk Partisipasi Masyarakat	87
4.1.1.1.	Bentuk Sumbangan Masyarakat pada Tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Tahap Pasca Konstruksi	88
4.1.1.2.	Bentuk Kegiatan Masyarakat pada Tahap Pra Konstruksi, Konstruksi, dan Tahap Pasca Konstruksi	90
4.1.2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat	94
4.1.2.1.	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pra Konstruksi	96
4.1.2.2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Konstruksi	97
4.1.2.3.	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pasca Konstruksi ..	98
4.1.2.4.	Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Seluruh Tahapan.....	99
4.2.	Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Partisipasi Masyarakat	101
4.2.1.	Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Bentuk Partisipasi Masyarakat	101
4.2.1.1.	Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pra Konstruksi	102

4.2.1.2. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Konstruksi	103
4.2.1.3. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Bentuk Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pasca Konstruksi	104
4.2.2. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat	105
4.2.2.1. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pra Konstruksi	105
4.2.2.2. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Konstruksi	107
4.2.2.3. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Tahap Pasca Konstruksi	109
4.3. Hambatan Masyarakat untuk Berpartisipasi.....	110
4.4. Temuan Unggulan Penelitian.....	111
4.5. Pembahasan Penelitian	111
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	119
5.1. Kesimpulan Empiris.....	119
5.2. Kesimpulan Maknawi.....	120
5.3. Rekomendasi.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: A DATA RESPONDEN	
B TRANSFORMASI TINGKAT PARTISIPASI	
C DAFTAR KUESIONER	
D DAFTAR WAWANCARA	
E CROSS TAB ANTAR KONDISI SOSIAL-EKONOMI	
F FREKUENSI BENTUK DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT	
G HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DENGAN BENTUK PARTISIPASI	
H HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DENGAN TINGKAT PARTISIPASI	
I HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DENGAN BENTUK PARTISIPASI PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI, KONSTRUKSI DAN PASCA KONSTRUKSI	
J HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DENGAN TINGKAT PARTISIPASI PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI, KONSTRUKSI DAN PASCA KONSTRUKSI	

DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1. Derajat Penilaian Skala Likert.....	10
II.1. Rangkuman Konsep Bentuk Partisipasi.....	13
II.2. Eight Rungs On The Ladder Of Citizen Participation.....	14
III.1. Jumlah Penduduk Tiap Kelurahan Di Kecamatan Kedungkandang	18
III.2. Karakteristik Masyarakat Kelurahan Mergosono.....	18
III.3. Karakteristik Responden	19
IV.1. Bentuk Sumbangan Pada Tahap Pra Konstruksi	24
IV.2. Bentuk Sumbangan Pada Tahap Konstruksi	24
IV.3. Bentuk Sumbangan Pada Tahap Pasca Konstruksi	25
IV.4. Bentuk Kegiatan Pada Tahap Pra Konstruksi	25
IV.5. Bentuk Kegiatan Pada Tahap Konstruksi	25
IV.6. Bentuk Kegiatan Pada Tahap Pasca Konstruksi.....	26
IV.7. Bentuk Partisipasi Pada Tahap Pra Konstruksi, Konstruksi Dan Tahap Pasca Konstruksi.....	27
IV.8. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pra Konstruksi	27
IV.9. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Konstruksi	28
IV.10. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pasca Konstruksi	28
IV.11. Tingkat Partisipasi Pada Seluruh Tahapan.....	28
IV.12. Kategori Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	29
IV.13. Hasil Perhitungan Chi Square Dan Taraf Signifikansi Bentuk Partisipasi Pada Tahap Pra Konstruksi.....	29
IV.14. Hasil Perhitungan Chi Square Dan Taraf Signifikansi Bentuk Partisipasi Pada Tahap Konstruksi.....	30
IV.15. Hasil Perhitungan Chi Square Dan Taraf Signifikansi Bentuk Partisipasi Pada Tahap Pasca Konstruksi	31
IV.16. Hasil Perhitungan Chi Square Dan Taraf Signifikansi Tingkat Partisipasi Pada Tahap Pra Konstruksi.....	31
IV.17. Hasil Perhitungan Chi Square Dan Taraf Signifikansi Tingkat Partisipasi Pada Tahap Konstruksi	32
IV.18. Hasil Perhitungan Chi Square Dan Taraf Signifikansi Tingkat Partisipasi Pada Tahap Pasca Konstruksi	32

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
I.1. Kerangka Teoritis.....	8
I.2. Peta Administrasi Kota Malang.....	12
I.3. Peta Wilayah Kecamatan Kedungkandang	13
I.4. Peta Wilayah Kelurahan Mergosono	14
I.5. Kerangka Pemikiran.....	15
I.6. Kerangka Analisis	21
2.1. Sistem Pembuangan Dan Peresapan Tangki Septic	51
2.2. Model/Sistem Cubluk	52
2.3. Model/Sistem Pit Latrin	52
3.1. Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden.....	61
3.2. Distribusi Frekuensi Usia Responden.....	62
3.3. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Responden	63
3.4. Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Responden.....	64
3.5. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendapatan Responden	65
3.6. Distribusi Frekuensi Lama Tinggal Responden	66
3.7. Distribusi Frekuensi Sstatus Hunian Responden	67
3.8. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Jenis Kelamin	71
3.9. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Usia	73
3.10. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Tingkat Pendidikan	76
3.11. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Jenis Pekerjaan	79
3.12. Kondisi Sosial-Ekonomi Yang Mempunyai Hubungan Dengan Tingkat Pendapatan.....	80
3.13. Distribusi Frekuensi Bentuk Sumbangan Pada Tahap Pra Konstruksi	81
3.14. Gerbang Proyek Percontohan Pengolah Limbah.....	83
3.15. Proyek Percontohan di Kelurahan Tlogomas	83
3.16. Tangki Penampung Limbah di Kelurahan Tlogomas	84
3.17. Proyek Percontohan di Kelurahan Tlogomas yang Asri.....	84
3.18. Proyek Pengembangan Pengolah Limbah di Kelurahan Mergosono	85
3.19. Tangki Penampung Limbah di Kelurahan Mergosono.....	85
3.20. Kolam Penjernih Limbah dengan Sistem UASB	86
3.21. Buangan air Limbah yang Jernih dan Sehat.....	86

4.1.	Distribusi Frekuensi Bentuk Sumbangan Pada Tahap Pra Konstruksi	88
4.2.	Distribusi Frekuensi Bentuk Sumbangan Pada Tahap Konstruksi.....	89
4.3.	Distribusi Frekuensi Bentuk Sumbangan Pada Tahap Pasca Konstruksi.....	90
4.4.	Distribusi Frekuensi Bentuk Kegiatan Pada Tahap Pra Konstruksi.....	91
4.5.	Distribusi Frekuensi Bentuk Kegiatan Pada Tahap Konstruksi.....	92
4.6.	Distribusi Frekuensi Bentuk Kegiatan Pada Tahap Pasca Konstruksi	93
4.7.	Tingkat Partisipasi Pada Tahap Pra Konstruksi	96
4.8.	Partisipasi Pada Tahap Konstruksi	97
4.9.	Tingkat Partisipasi Pada Tahap Pasca Konstruksi	98
4.10.	Tingkat Partisipasi Pada Seluruh Tahapan.....	99
4.11.	Hubungan Variabel Pengaruh dengan Bentuk Partisipasi Pada Tahap Pra Konstruksi.....	103
4.12.	Hubungan Variabel Pengaruh dengan Bentuk Partisipasi Pada Tahap Konstruksi.....	104
4.13.	Hubungan Variabel Pengaruh dengan Tingkat Partisipasi Pada Tahap Pra Konstruksi.....	106
4.14.	Hubungan Variabel Pengaruh dengan Tingkat Partisipasi Pada Tahap Konstruksi.....	109

ABSTRAK

Kota Malang yang kondisi fisiknya dilewati aliran sungai dan lonjakan pertumbuhan populasi, ternyata memiliki permasalahan yang spesifik. Implikasi dari hal tersebut adalah semakin tingginya permintaan akan lahan untuk tempat bermukim, padahal luas lahan yang tersedia relatif stagnan dan tidak bertambah. Hal ini mengakibatkan bantaran sungai yang lokasinya dekat dengan pusat kota menjadi suatu alternatif tempat bermukim bagi masyarakat marginal yang sangat padat dan kumuh. Dampak lain adalah kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah cair maupun padat secara langsung ke sungai.

Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah Kota Malang memprogramkan pembangunan prasarana lingkungan. Salah satu wujud pembangunan tersebut adalah pembangunan pengolah limbah cair manusia di Kelurahan Mergosono yang merupakan pengembangan dari proyek serupa yang ada di Kelurahan Tlogomas. Keberhasilan produk pembangunan pada pasca konstruksi inilan yang diduga melibatkan masyarakat pada tahap-tahap sebelumnya. Kerangka dasar teoritis di sini diperlukan untuk memperoleh jawaban atas tujuan dan sasaran studi.

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Kelurahan Mergosono dalam Pembangunan Pengolah Limbah Cair Manusia pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi, serta faktor yang mempengaruhinya. Sasaran dari studi ini adalah mengidentifikasi karakteristik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, hubungan antar kondisi sosial ekonomi, dan hubungan kondisi sosial ekonomi dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif survai dan penelitian deskriptif komparatif serta analisis kuantitatif (transformasi, cross-tab, uji chi square dan tabel kontingensi) yang dibantu oleh deskriptif kualitatif.

Data yang diperoleh dari responden berdasarkan kuesioner tersebut kemudian dianalisis, maka akan didapatkan temuan unggulan yang sesuai dengan riset kuesioner. Temuan unggulan tersebut kemudian didiskusikan (dibahas) dengan landasan teori yang dipergunakan, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan, baik kesimpulan empiris yang didapat dari hasil analisis, maupun kesimpulan makna yang diperoleh dari rangkuman kesimpulan empiris dengan teori yang dipergunakan.

Hasil kesimpulan tersebut selanjutnya direkomendasikan kepada pemerintah kota untuk pelaksanaan program-program pembangunan selanjutnya, dan sebagai masukan bagi perkembangan studi, serta referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

ABSTRACT

Malang City which physical condition followed by river streamflow and have increasing urbanisation population growth, actually have a specific problem. The increasing of settlement demand is not balance with settlement land that stagnant relatively and no change. This prolem cause marginal community live in that near riverside, and make that place be an environment high density and slum area. The initial impact which can feel are environment quality degradation, community health, and river environment degradation that caused by liquid and solid waste disposal.

To handle this situation, the Municipal of Malang take attention through several environment infrastructure development program. One of them that can be mentioned create reality program, the municipal build waste water treatment plant in Kelurahan Mergosono expanding development pilot project in Kelurahan Tlogomas last time before. The succes of development product in the post construction step predicted as a part of involving community participation procces in previous steps. In the mean time it required references as a basic theoritical framework according to reach the answer and to determine the expected purpose and objective.

The purpose of this study to find community participation in Kelurahan Mergosono in the development waste water treatment plant. To reach this purpose, the objective that was done by identify the characteristic and social-economic community condition, form and level of participation, and factors which influence to community participation.

Methods which used in this study are descriptive survey research, descriptive comparative research, and quantitative analysis (trasformation, cross tabulation, chi square (χ^2) test and contingency table) supported by descriptive qualitative.

Based on the data collected from responden by questioner and taking into analysis, would be reach primary finding and matching with research question. The primary finding then discussed based on theoritical framework used in this study in order to result a conclusion, either emphiric conclusion result from the analysis or essensial conclusion from summarizing emphiric conclusion with theoritical framework used in this study.

The result recommended to Malang Municipality to be implemented in the next development programs, and as an input for the development study and reference for everyone.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lonjakan pertumbuhan populasi urbanisasi yang sangat tinggi, baik karena kelahiran maupun migrasi, sehingga tidak banyak pemerintah kota yang siap menghadapi tekanan-tekanan persoalan perkotaan, seperti kekumuhan, kriminalitas, kenakalan remaja dan sebagainya (Kartasmita, 1996: 389), keterbatasan air bersih, tidak memadainya fasilitas sanitasi, kebutuhan tempat pemukiman, dan lain sebagainya (Todaro, 2000:492). Implikasi dari hal tersebut di atas adalah penyediaan sarana prasarana yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Implikasi lain adalah meningkatnya pemanfaatan dan permintaan lahan kota dari masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, baik aktivitas usaha maupun aktivitas permukiman padahal lahan perkotaan terbatas dan tidak mengalami penambahan.

Wilayah perkotaan yang di lewati aliran sungai, ternyata memiliki permasalahan yang spesifik. Bantaran sungai yang lokasinya relatif dekat dengan pusat kota, menjadi suatu alternatif bagi berkembangnya tempat bermukim masyarakat marjinal yang sangat padat dan kumuh.

Dampak langsung yang terasa akibat timbulnya tempat pemukiman yang padat dan kumuh di kawasan tersebut, adalah kerusakan lingkungan sungai yang diakibatkan oleh pendangkalan sungai oleh pembuangan limbah cair maupun padat. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas lingkungan di daerah perkotaan melalui pembenahan beberapa komponen.

Siagian, 1985:29, menyatakan bahwa pembangunan merupakan usaha sadar suatu masyarakat bangsa, negara dan pemerintah dalam mewujudkan cita-citanya. Namun demikian, apapun bentuk pembangunan yang dilakukan oleh manusia, sedikit ataupun banyak pasti mempunyai pengaruh terhadap mutu dan kualitas lingkungan hidup.

Dalam Konferensi PBB pada tahun 1972 di Stockholm, terbentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup yaitu United Nations Environmental Programme (UNEP) dan pada hari pembukaannya yaitu tanggal 5 juni disepakati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia (Soemarwoto, 2001:51). Tepat 20 tahun kemudian yaitu tahun 1992, di Rio De Janeiro Brasil diadakan Konferensi PBB mengenai pembangunan dan lingkungan (*United Nation Conference on Environment and Development, UNCED*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan KTT Bumi (*Earth Summit*), telah disepakati suatu rencana untuk menyongsong abad ke-21 yang disebut dengan agenda 21, dimana dalam resolusi PBB tersebut disebutkan bahwa penyediaan air yang bermutu dalam seluruh kegiatan masyarakat dinilai sangat penting. (Todaro, 2000:494). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Badan Dunia (WHO) maupun Departemen Kesehatan serta Peraturan lain yang berlaku, layak tidaknya air bagi kehidupan manusia ditentukan berdasarkan persyaratan kualitas air secara fisik, kimiawi, dan biologis. (Siriawiria, 1996:80-84).

Pengembangan penyediaan air bersih, pengumpulan, pengolahan dan pembuangan air limbah adalah merupakan hal yang penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga pengolahan limbah cair manusia bukan saja diinginkan tetapi memang sangat diperlukan.

Menurut konsep totaliter, negara mempunyai peran yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakatnya (Siagian, 1984), padahal peran pemerintah tidak lagi hanya dibatasi pada urusan ketertiban dan keamanan, namun semakin luas mencakup

kesejahteraan (Sitanggang, 1999). Konsep ini berdampak pada penciptaan konsep dan sistem pembangunan dari atas (*top down*), yang dapat melakukan kontrol secara ketat, instruksi yang cepat, serentak, seragam, dan dapat lebih mendesak kehendaknya pada masyarakat (Ndraha, 1987:118). Konsep dan sistem ini membutuhkan dana yang amat besar dan beresiko tinggi (Kartasasmita, 1996:146), dan dianggap lebih efisien, baik dilihat dari segi waktu maupun dari segi pengambilan keputusan (Salusu, 1996:240). Selain itu juga adanya anggapan bahwa pemerintah memiliki informasi yang paling lengkap untuk menentukan arah pembangunan nasional (Siagian, 1984:32), sehingga strategi dari atas kebawah berlangsung terus dan lama kelamaan prakarsa pemerintah menjadi suatu pola dan akhirnya berubah menjadi suatu sistem. Pemerintah pada hakekatnya memang memiliki peranan yang sangat besar dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana kota, tetapi bukan berarti mengindahkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan.

Meninggalkan dasawarsa tujuh puluhan, paradigma pembangunan kembali mendapat nuansa baru. Permasalahan pembangunan makin disadari bukanlah semata-mata persoalan ekonomi, permasalahan hak asasi manusia dan demokrasi ternyata berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan. Oleh karena pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat semakin populer dan diperhitungkan pada saat ini.

Secara umum pengertian partisipasi adalah kontribusi sukarela, pemekaan, inisiatif, dialog, dan keterlibatan sukarela masyarakat terhadap pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. (Mikkelsen, 1994:64). Menurut Davis dalam Sastropetro, 1988:51 dikatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional, yang mendorong seseorang untuk memberikan sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan

pembangunan sangat diperlukan guna meningkatkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*) dalam setiap proses kegiatan. Partisipasi juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas individu agar lebih matang, bertanggung jawab, dan mudah menerima perubahan (Huneryager&Heckman, 1992:20-21). Demikian pula melalui partisipasi masyarakat dapat tercipta komunikasi dua arah (*sharing*) dan proses pembangunannya bukan hanya mengalir dari atas (*top down*) melainkan juga mengalir dari bawah (*bottom up*) sehingga terjadi hubungan timbal balik yang dapat memperkuat dan menguntungkan setiap pelaksanaan pembangunan. Sistem komando, pengendalian dan konfrontatif perlu diubah dengan sistem kemitraan yang berbasis masyarakat (Sudharto, 1999).

Kota Malang yang berpenduduk 756.982 jiwa, sedang berkembang pesat dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,86 % (hasil sensus penduduk tahun 2000). Umumnya laju pertumbuhan yang tinggi terjadi pada kelompok umur produktif, hal ini mengindikasikan adanya migrasi yang masuk ke Kota Malang. Para migran yang sebagian besar keadaan ekonominya kurang dan tidak mampu untuk membeli rumah, mereka mendirikan bangunan liar di kiri kanan rel kereta api, jalur hijau, dan di sepanjang sungai Brantas yang dianggap merupakan lahan tak bertuan, hal ini menimbulkan kawasan pemukiman kumuh di beberapa wilayah kota yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan.

Berdasarkan inisiatif Agoes Gunarto, SE, maka di tepian sungai Brantas yang ada di wilayah Kelurahan Tlogomas didirikan sistem pengolah limbah cair manusia secara sederhana (sistem manual) dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang merupakan swadaya murni masyarakat setempat. Sistem pengolah limbah tersebut, mengantarkan yang bersangkutan mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional dalam

masalah Lingkungan hidup Award. Proyek tersebut kemudian oleh pemerintah Kota Malang dijadikan sebagai proyek percontohan (*pilot project*) (lihat gambar 3.14-17 di halaman 88-89).

Pemerintah Kota Malang pada tahun 2000/2001, mengalokasikan dana sebesar Rp. 4 milyar, melalui dana yang didapat dari APBN, APBD tingkat II dan BLN, untuk pembangunan proyek serupa dengan memakai sistem UASB (*Up Flow Anaerobic Sludge Blanket*) yang lebih canggih di 2 (dua) tempat yang berbeda, yang pertama dibangun pada lokasi di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing dan yang kedua dibangun di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang memiliki kapasitas sebanyak 6.200 KK diatas lahan seluas 2 ha (lihat gambar 3.18-21 di halaman 90 dan 91).

Pengembangan proyek pengolahan limbah tersebut, mendorong penulis untuk meneliti tentang partisipasi masyarakat yang tinggal di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dalam pembangunan pengolahan limbah cair manusia tersebut di atas.

1.2. Perumusan Masalah

Tingginya urbanisasi di daerah perkotaan, sudah barang tentu menciptakan permasalahan tersendiri bagi pemerintah kota. Timbulnya permukiman kumuh (*slum*) yang mempunyai karakteristik berkaitan dengan status tanah dan padatnya jumlah penduduk, tentu berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk lebih memberikan perhatian melalui berbagai program pembangunan prasarana lingkungan.

Salah satu wujud pembangunan prasarana tersebut adalah pembangunan pengolahan limbah cair manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi penyakit yang berhubungan dengan pencemaran air.

Pembangunan prasarana tersebut berada di wilayah Kelurahan Mergosono yang merupakan replikasi dan pengembangan sistem manual pada pengolahan limbah yang ada sebelumnya (*pilot project* di Kelurahan Tlogomas). **“Keberhasilan produk pembangunan pada tahap pasca tersebut diduga merupakan bagian dari proses pelibatan masyarakat pada tahap-tahap sebelumnya”**, hal inilah yang menjadi fokus dan daya tarik bagi peneliti untuk mengadakan penelitian.

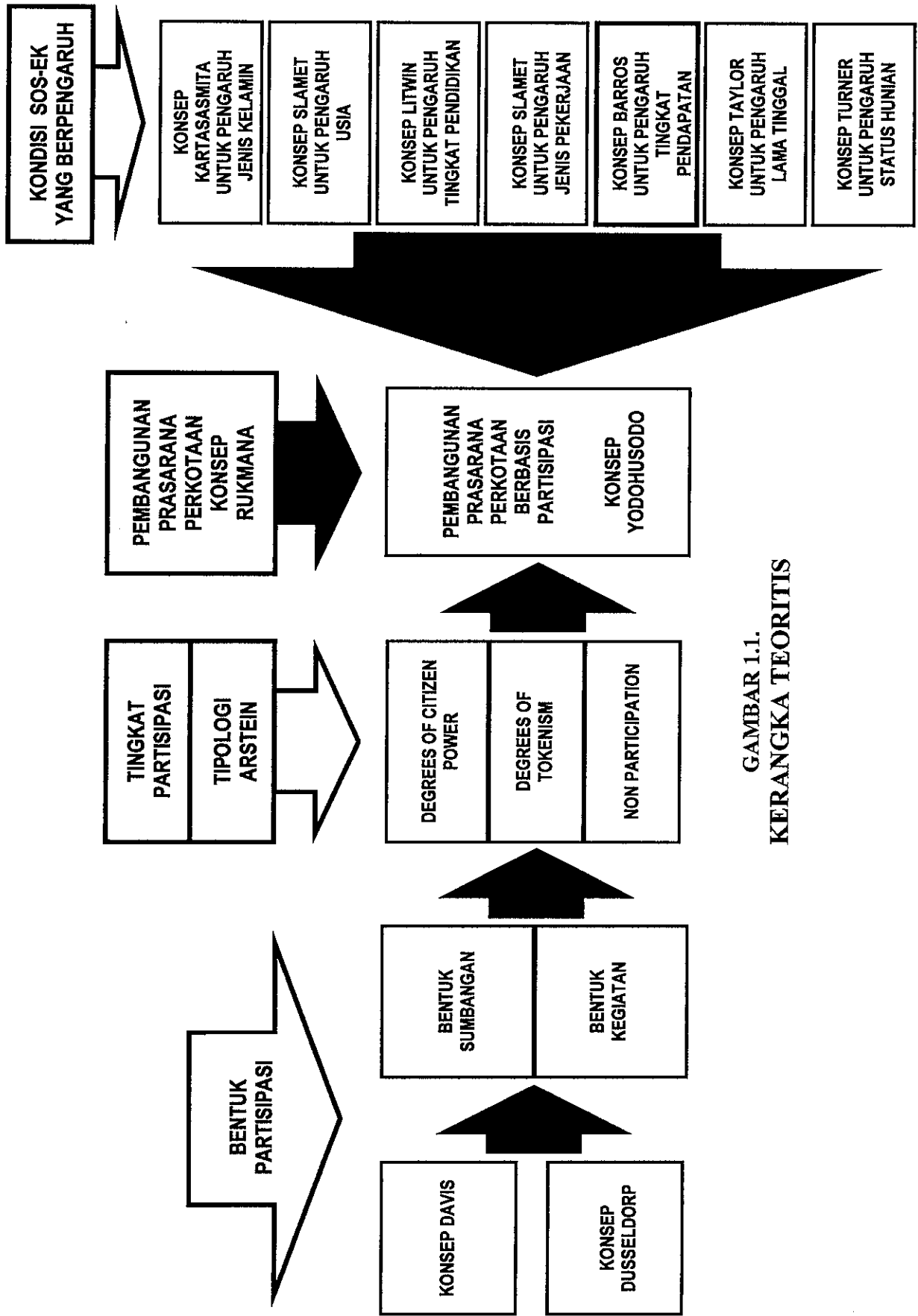
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian (*Research Question*):

1. **Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di lingkungan obyek studi dalam tahap pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi?**
2. **Kondisi sosial-ekonomi apa yang dominan mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengolahan limbah cair manusia?**

1.3. Kerangka Teoritis

Berdasarkan *Research Question* tersebut, maka peneliti melakukan kajian pustaka sebagai dasar kerangka teoritis dan untuk memperoleh jawaban sementara dari hipotesa. Jawaban sementara tersebut adalah bahwa proses pembangunan akan mendapatkan hasil yang lebih baik bila sejak awal telah mengikut sertakan masyarakat (Yudohusodo, 1991); Selain itu, konsep yang dikemukakan oleh Davis dan Dusseldorp bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa sumbangan dan kegiatan yang dilakukan; Delapan tipologi Arstein yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga tingkatan partisipasi, yaitu tidak

berperan serta (*non participation*), tingkat penghargaan atau formalitas (*degrees of tokenism*), dan tingkat kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*) merupakan acuan tentang tingkat partisipasi masyarakat; Landasan teori yang dipergunakan untuk mengetahui faktor dominan yang berpengaruh yaitu konsep yang dikemukakan oleh Kartasmita untuk faktor jenis kelamin, konsep yang dikemukakan Slamet untuk faktor usia, konsep yang dikemukakan oleh Litwin untuk faktor tingkat pendidikan, konsep yang dikemukakan Slamet untuk faktor jenis pekerjaan, konsep yang dikemukakan oleh Barros untuk tingkat pendapatan, konsep yang dikemukakan oleh Taylor untuk lama tinggal, dan konsep yang dikemukakan Turner untuk faktor status hunian. (Untuk lebih jelasnya, lihat diagram kerangka teoritis pada gambar 1.1. di halaman berikutnya).



GAMBAR 1.1.
KERANGKA TEORITIS

1.4. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Studi

1.4.1. Tujuan Studi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Kelurahan Mergosono dalam pembangunan pengolah limbah cair manusia pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi, serta faktor yang mempengaruhinya.

1.4.2. Sasaran Studi

Untuk pencapaian tujuan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sasaran dari penelitian ini adalah dengan mengidentifikasi karakteristik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, hubungan antar kondisi sosial-ekonomi, dan hubungan antara kondisi sosial-ekonomi dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat. Hubungan kondisi sosial ekonomi tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Pengaruh faktor internal masyarakat antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal, status hunian dan kepemimpinan, selain itu juga pengaruh faktor eksternal masyarakat yang terdiri dari sosialisasi program yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan pengelolaan limbah cair manusia. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pra konstruksi meliputi bentuk sumbangan dan gambar/desain bangunan, tahap konstruksi meliputi bentuk sumbangan dan cara pembangunan WC/kamar mandi, tahap pasca konstruksi meliputi bentuk sumbangan dan kerja bakti yang diinginkan. Tingkat partisipasi pada tahap pra konstruksi meliputi tingkat kehadiran dan keaktifan warga dalam memberikan usulan, tahap konstruksi meliputi asal biaya untuk pembangunan WC/kamar mandi, dan tahap pasca konstruksi meliputi ketepatan dalam membayar iuran.

1.4.3. Manfaat Studi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan:

1. Sebagai bahan masukan/kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau referensi bagi penelitian sejenis, khususnya masalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair manusia.
2. Memperoleh gambaran secara jelas tentang keterkaitan masyarakat dalam pembangunan dan membuka wacana bagi pembangunan pengelolaan limbah cair manusia secara terpadu selanjutnya, sehingga akan diperoleh suatu tempat pemukiman yang berwawasan lingkungan hidup (*sustainable development*).
3. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Malang, agar perencanaan pembangunan sejenis di masa yang akan datang selalu mengikut sertakan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, karena ada kecenderungan akan mendapatkan hasil yang lebih baik, oleh karena itu diharapkan dapat menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diemban.

1.5. Ruang lingkup

1.5.1. Ruang lingkup Materi (Substansial)

Dengan maksud untuk memperjelas dan mempersempit permasalahan yang dibahas, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: (i). penelitian ini hanya membahas masalah bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Obyek studi pada tahap pra konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pasca konstruksi; (ii). Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan pengolah limbah cair manusia.

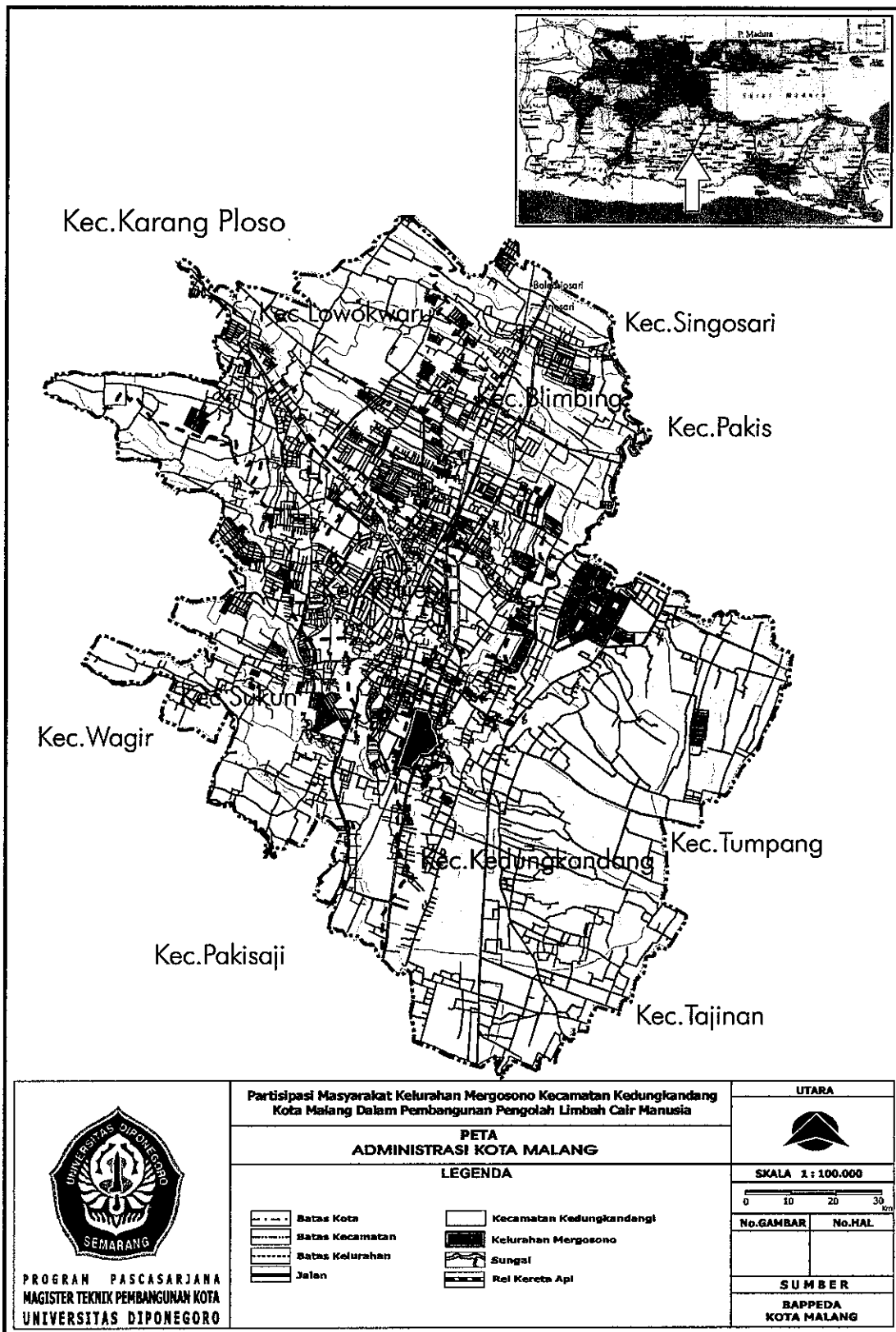
1.5.2. Ruang Lingkup Wilayah (Spasial)

Kota Malang adalah salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur, mempunyai luas wilayah 11.005,66 Ha dengan jumlah penduduk 810.600 jiwa, terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan.

Kecamatan Kedungkandang di Kota Malang merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling yaitu 39,89 km², terbagi dalam 12 (dua belas) kelurahan, dan jumlah penduduk 150.262 jiwa. Kecamatan tersebut dilalui 3 (tiga) sungai besar, yaitu sungai Brantas, Amprong dan Bango.

Kelurahan Mergosono mempunyai luas wilayah 1,032 km², berpenduduk 19.382 jiwa dan merupakan kelurahan terpadat di wilayah Kecamatan Kedungkandang.

Alasan pengambilan lokasi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang karena lokasi tersebut merupakan pengembangan dari *pilot project* pengolahan limbah cair manusia yang ada di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dengan adanya pembangunan tersebut, maka diharapkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunannya. Oleh karena itu maka penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang untuk melihat bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengolahan limbah cair manusia. Adapun lokasi penelitian secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar peta dihalaman berikutnya.



Kec. Karang Ploso

Kec. Lowokwaru

Kec. Singosari

Kec. Blimbing

Kec. Pakis

Kec. Wagir

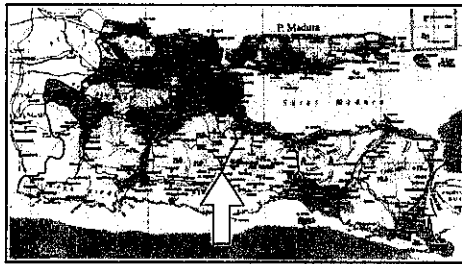
Kec. Sukun

Kec. Kedungkandang

Kec. Tumpang

Kec. Pakisaji

Kec. Tajinan



Partisipasi Masyarakat Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Dalam Pembangunan Pengolah Limbah Cair Manusia

PETA ADMINISTRASI KOTA MALANG

LEGENDA

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan
- Kecamatan Kedungkandang
- Kelurahan Mergosono
- Sungai
- Rel Kereta Api

UTARA



SKALA 1 : 100.000



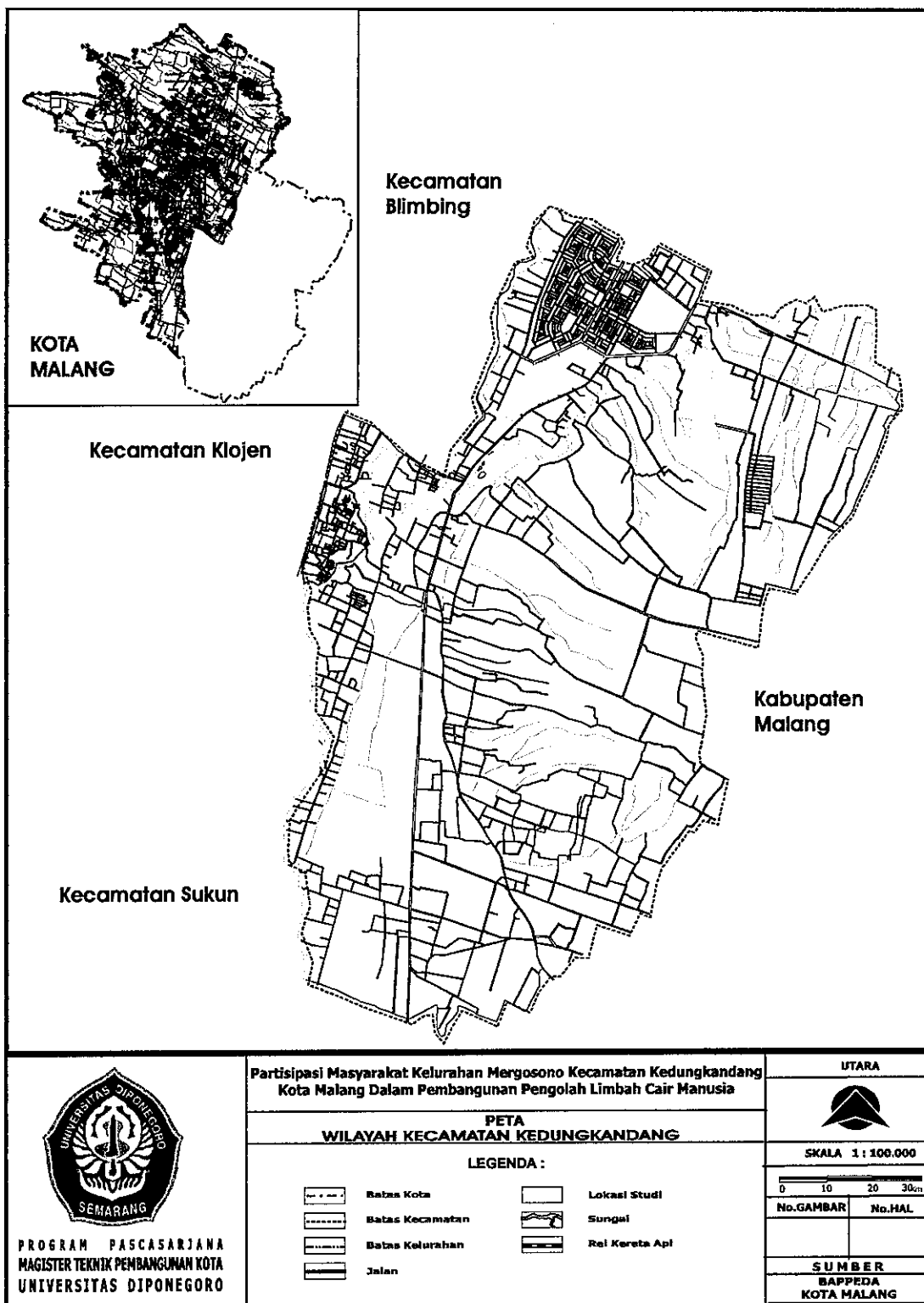
No. GAMBAR No. HAL

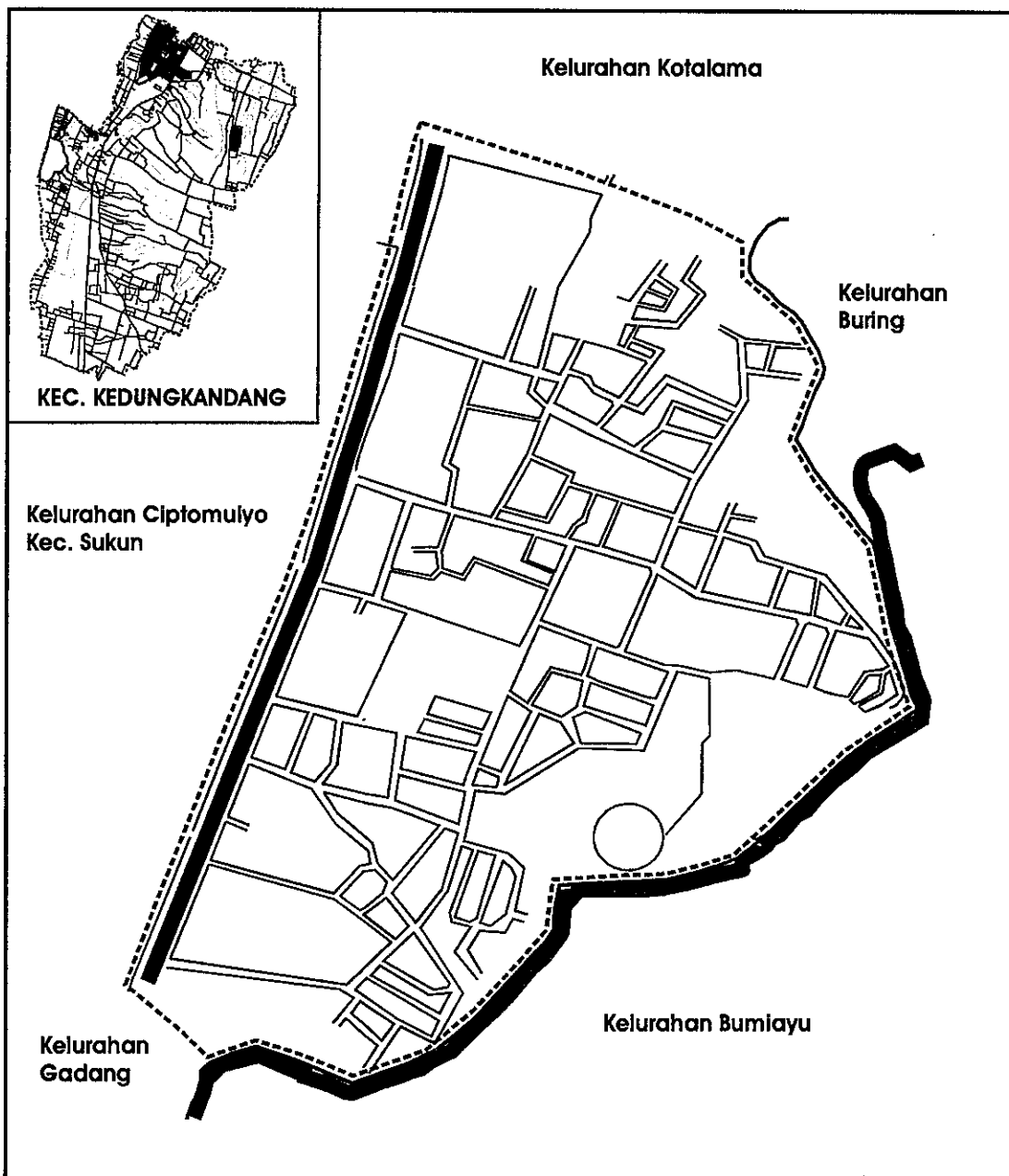
SUMBER



















BAPPEDA KOTA MALANG

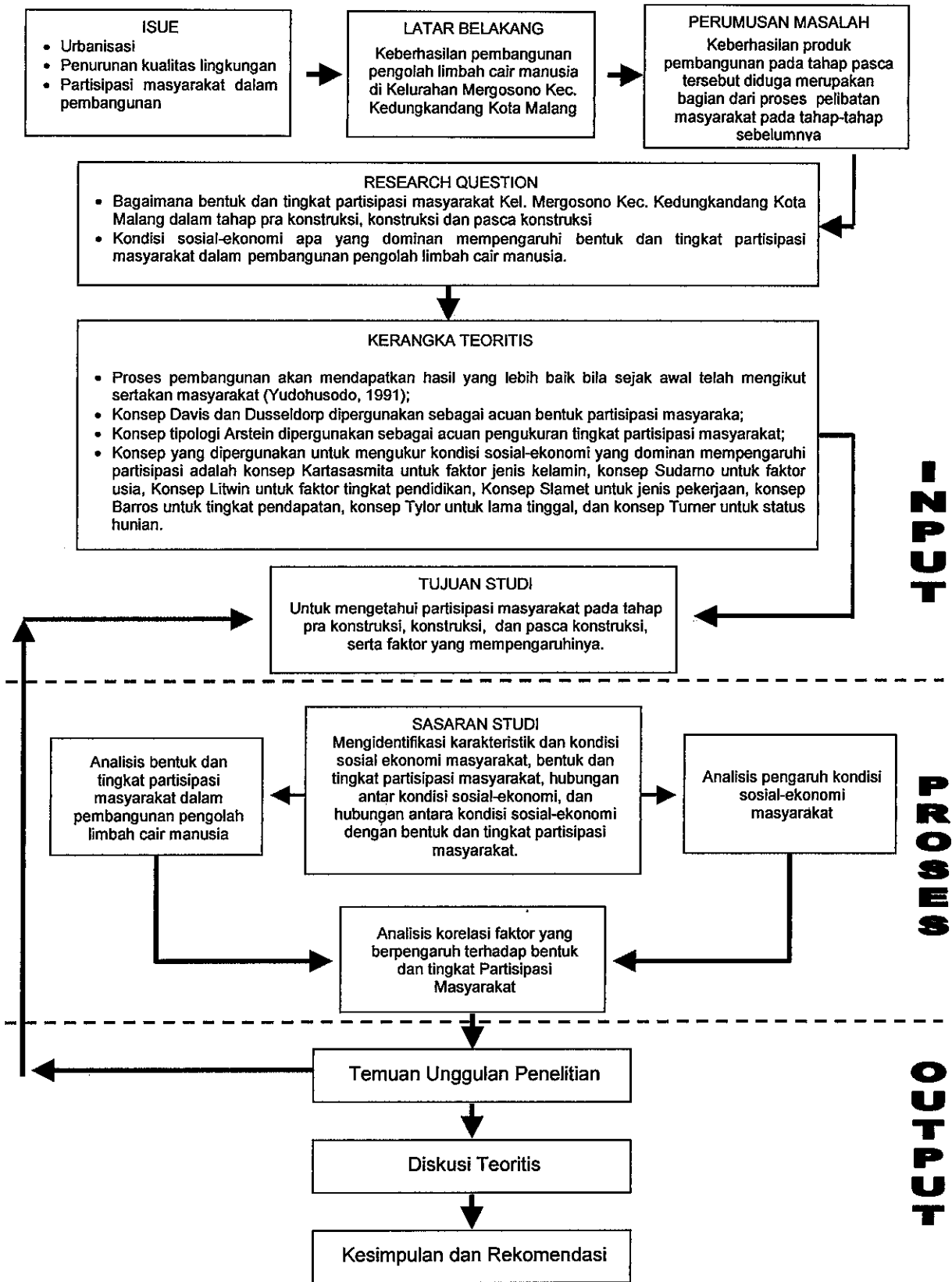


PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO





 <p>PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p>Partisipasi Masyarakat Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Dalam Pembangunan Pengolah Limbah Cair Manusia</p>	<p>UTARA</p> 										
	<p>PETA WILAYAH KELURAHAN MERGOSONO</p>	<p>SKALA 1 : 75.000</p> 										
	<p>LEGENDA :</p> <table border="0"> <tr> <td> Batas Kelurahan</td> <td> Sungai</td> </tr> <tr> <td> Jalan Raya</td> <td> Lokal Pembangunan Limbah Cair Manusia</td> </tr> <tr> <td> Jalan Kampung</td> <td></td> </tr> </table>	 Batas Kelurahan	 Sungai	 Jalan Raya	 Lokal Pembangunan Limbah Cair Manusia	 Jalan Kampung		<table border="1"> <tr> <td>No.GAMBAR</td> <td>No.HAL</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	No.GAMBAR	No.HAL		
	 Batas Kelurahan	 Sungai										
 Jalan Raya	 Lokal Pembangunan Limbah Cair Manusia											
 Jalan Kampung												
No.GAMBAR	No.HAL											
<p>SUMBER BAPPEDA KOTA MALANG</p>												



**GAMBAR 1.4
KERANGKA PEMIKIRAN**

Penjelasan Gambar Kerangka Pemikiran :

- Isue berasal dari:
 1. Urbanisasi
 2. Penurunan kualitas lingkungan
 3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Dari issue tersebut, maka dapat dimunculkan latar belakang masalah mengenai keberhasilan pembangunan pengolahan limbah cair manusia di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.
- Dari latar belakang tersebut, maka dapatlah dibuat suatu rumusan masalah bahwa keberhasilan produk pembangunan pada tahap pasca tersebut diduga merupakan bagian dari proses pelibatan masyarakat pada tahap-tahap sebelumnya.
- Setelah masalah tersebut dirumuskan, maka dapat dimunculkan pertanyaan penelitian (*Research Question*) yaitu :
 1. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Kel. Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang dalam tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.
 2. Kondisi sosial-ekonomi apa yang dominan mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengolah limbah cair manusia.
- Untuk mendapat jawaban sementara *Research Question* tersebut dipergunakan kerangka teoritis yang berasal dari literatur.
- Setelah kerangka teoritis diperoleh, maka ditentukan tujuan dari penelitian
- Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut maka ditentukan pula sasaran yang ingin dicapai.

- Metode penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian.
- Setelah metode dirumuskan maka untuk mendapatkan suatu data yang akurat dibutuhkan suatu metodologi
- Setelah data tersebut diperoleh maka segera dapat kita analisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhinya. Hasil analisis tersebut kemudian dikorelasi sehingga dapat diketahui apakah variable bebas punya pengaruh terhadap aktivitas obyek serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variable bebas terhadap variable terikat.
- Dari hasil analisis tersebut maka akan didapatkan temuan unggulan yang merupakan jawaban dari *Research Question*.
- Temuan unggulan tersebut selanjutnya dibahas dengan teori yang ada, sehingga akan diketahui penelitian tersebut mendukung atau menolak teori serta bila memungkinkan untuk mendapatkan suatu teori yang baru.
- Setelah penelitian tersebut didialogkan dengan teori maka didapatkan suatu kesimpulan empiris dan kesimpulan maknawi yang merupakan rangkuman dari kesimpulan empiris.
- Dari kesimpulan tersebut dibuat suatu rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintah kota yang bersangkutan maupun sebagai bahan referensi bagi penelitian.

1.6. Pendekatan Studi dan Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan studi

Manusia sesuai dengan kodratnya dibekali dengan hasrat ingin tahu yang menyebabkan manusia selalu ingin mencari jawaban dan kebenarannya (Wasito H.

1995:3). Kebenaran tersebut dapat ditemukan melalui proses ilmiah (Usman H. dan Akbar P.S., 1995:1), meskipun secara logika pemikiran tersebut dapat diterima (rasionalisme), namun pemikiran itu harus dibuktikan dalam suatu eksperimen (positivistik), sehingga didapat bukti empiris yang jelas, logis, nyata, dan terperinci.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pendekatan studi yang dipergunakan oleh peneliti adalah pendekatan ilmiah yaitu suatu pendekatan yang didapat melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan data empiris (Wasito H. 1995:5).

1.6.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih dan dipergunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian diskriptif-Survei dan deskriptif- komparatif.

1.6.2.1. Metode Penelitian Deskriptif (*Deskriptive Research*)

Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman H. dan Akbar P.S., 1995:4), dan mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya (Wasito H. 1995:10), serta berfungsi untuk memecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan secara sistematis hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nasir, 1988:63).

1.6.2.2. Metode Penelitian Survei (*Field Research*)

Metode survei (*field researcah*) merupakan suatu penyelidikan untuk mencari keterangan secara faktual dari gejala yang ada dan untuk mendapatkan suatu pembenaran terhadap keadaan yang tengah berlangsung (Nasir, 1988:65), serta untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Usman H. dan Akbar P.S., 1995:5).

1.6.2.3. Metode penelitian Komparatif (*Comparative Research*)

Metode penelitian komparatif bermaksud untuk mencari hubungan sebab akibat dengan mengamati keadaan sekarang dan mencoba untuk mencari kemungkinan sebabnya dari data yang dikumpulkan (Usman H. dan Akbar P.S., 1995:5). Selanjutnya dikatakan oleh Nasir, 1988:69 bahwa penelitian komparatif bersifat *ex post facto* artinya data yang dikumpulkan dalam keadaan telah selesai berlangsung, sehingga peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia.

1.7. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah kumpulan dari unit sampling yang ditarik biasanya dari sebuah frame, frame adalah list atau urutan unit sampling yang tersedia. (Nasir, 1999:328). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*) yaitu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit penelitian atau satuan elementer dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Mantra dan kasto, 1989:155). Untuk menentukan jumlah warga yang akan dijadikan sampel, dipergunakan formulasi slovin (dalam sevilla, 1993:161), yaitu:

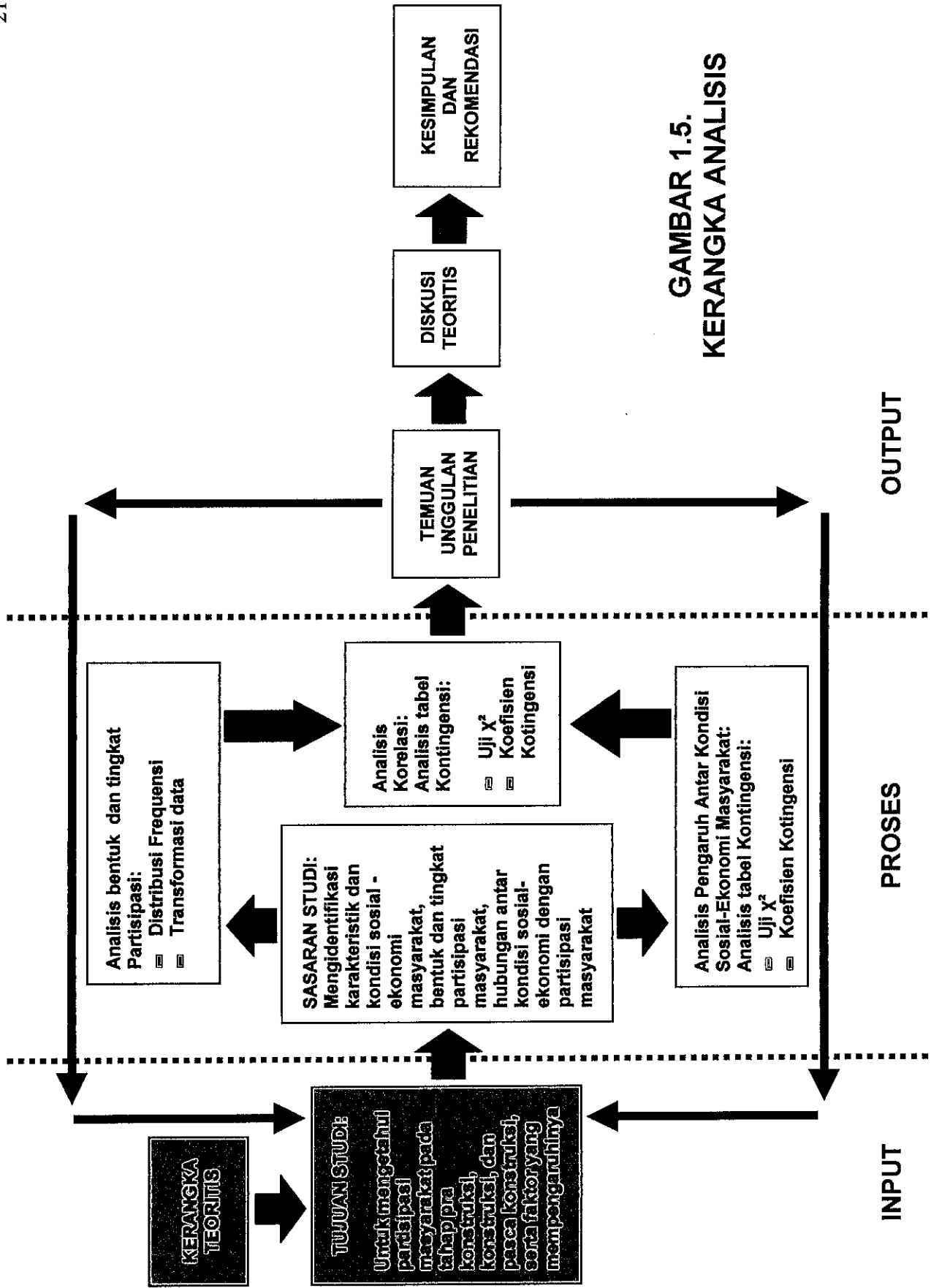
$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} n = \text{Ukuran Sampel} \\ N = \text{Ukuran Populasi} \\ Ne^2 = \text{Batas Ketelitian} \end{array}$$

Batas ketelitian yang dipakai dalam menentukan sample adalah 10 %.

Jumlah populasi penelitian adalah 6.000 kepala keluarga (KK) maka dihasilkan 98 KK dan dibulatkan menjadi 100 KK sebagai sampel (responden adalah pengguna prasarana).

1.8. Teknik Analisis

Di dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kuantitatif yang dibantu dengan metode kualitatif dengan mengacu pada pengumpulan data melalui penelitian lapangan, observasi partisipan dan wawancara. Metode kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data primer langsung dari sumbernya, sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analistis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri (Chadwick, Howard dan Stan, 1991). Cara penelitian ini dilakukan karena permasalahan yang diangkat merupakan suatu permasalahan yang rumit dan banyak hal yang tidak terungkap lewat data-data statistik, sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Metode kuantitatif yang dipergunakan disini adalah distribusi frekuensi yang merupakan upaya menyusun data yang cukup banyak menjadi kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berisi frekuensi data tersebut, sehingga pembacaan data dapat menjadi efisien dan komunikatif. Selain itu, tabel ini juga dapat digunakan sebagai persiapan untuk pengujian terhadap normalitas data (Sugiyono, 1999); Dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dilakukan melalui transformasi data, sehingga dapat diketahui kategori menurut tipologi dari Arstein; tabulasi silang digunakan untuk menghitung kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih, dengan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya *Chi Square* (χ^2), sehingga dapat diketahui perhitungan koefisien kontigensi (*contingency coefficient*) untuk melihat *ada* atau *tidak*, serta *kuat* atau *lemahnya* hubungan diantara dua variabel. Analisis korelasi dipergunakan untuk mengetahui kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang dominan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Agar lebih jelas, lihat gambar 1.5. (kerangka analisis) di halaman berikutnya.



GAMBAR 1.5.
KERANGKA ANALISIS

1.9. Teknik Penskalaan

1.9.1. Skala Likert

Metode rating yang dijumlahkan atau yang lebih dikenal dengan nama penskalaan model **Likert** merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan nilai skalanya. Umumnya dipergunakan skala 5 angka, namun peneliti mempergunakan skala menjadi 4 angka untuk meniadakan adanya jawaban netral. Hal ini juga sesuai dengan Nasution (2002:63) yang menyatakan bahwa dalam penggunaan skala *Likert* tidak terdapat aturan baku sehingga dalam hal ini dapat dipakai dengan jumlah ganjil atau genap. (lihat Tabel I.1. di bawah ini).

TABEL I.1. DERAJAT PENILAIAN SKALA LIKERT

P E N D A P A T	N I L A I	
	(+)	(-)
Sangat Setuju	4	1
Setuju	3	2
Tidak Setuju	2	3
Sangat Tidak Setuju	1	4

Sumber: Nasution, 2002.

1.9.2. Transformasi Data

Transformasi data yaitu mengubah data yang berskala *ordinal* menjadi *skala interval*, setelah didapat skor kategori ordinal selanjutnya skor tersebut dipakai dalam perhitungan tabulasi silang.

1.10. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Uraian tentang pokok masalah, didalamnya terkandung latar belakang masalah yang mengacu kepada kondisi di lapangan dan segala pemasalahannya. Rumusan masalah merupakan upaya untuk mempermudah dan menemukenali masalah secara fokus.

Disamping tujuan dan sasaran yang akan menjelaskan arah pemikiran penulis untuk mencapai target tertentu. Pada Bab I, juga mengurai ruang lingkup yang akan diamati, sehingga kajian akan mengarah pada pokok permasalahan, serta memunculkan kerangka pikir yang digunakan sebagai “*Guide Line*” penulisan/penelitian.

Bab II Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Prasarana Perkotaan

Merupakan penelaahan literatur guna mendapatkan teori-teori yang dapat mendukung variabel penelitian, sehingga dapat atau mampu dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kajian ini diharapkan mampu mendasari arah pemikiran peneliti.

Bab III Keadaan Masyarakat dan Bangunan Pengolah Limbah Cair Manusia di Kelurahan Mergosono

Menguraikan tentang keadaan masyarakat dan bangunan pengolah limbah cair manusia yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara dengan nara sumber dan data sekunder.

Bab IV Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pengolah Limbah Cair Manusia di Kelurahan Mergosono Kota Malang

Bab ini berisi analisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengolah limbah cair manusia, hasil perhitungan *chi square* dan taraf signifikansi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Selain itu juga berisi hambatan-hambatan yang terjadi, pembahasan penelitian, dan temuan dari penelitian yang selanjutnya didialogkan dengan landasan teori.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN PRASARANA PERKOTAAN

Bab ini membahas tentang partisipasi masyarakat dan pembangunan prasarana perkotaan melalui kajian teoritis, sebagai suatu pijakan/landasan untuk memecahkan suatu masalah.

2.1. Partisipasi Masyarakat

2.1.1. Pengertian Partisipasi

Pada hakekatnya kehidupan manusia adalah *zoon politikon* yang karena desakan psikologis, maka manusia selalu ingin berpartisipasi dan terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan (Salusu, 1996:232), maka partisipasi merupakan suatu keinginan manusia, agar dipandang sebagai milik dari suatu kelompok dan tidak menyendiri serta berinteraksi dengan lingkungan. Oleh karena itu keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, didasarkan atas keyakinan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut akan bermanfaat baginya (Koentjaraningrat, 1994:80). Selain itu, partisipasi merupakan keterlibatan secara spontan dengan kesadaran dan disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama, untuk itu diperlukan keterlibatan komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan (Sastroseto, 1985:51-52). Keterlibatan aktif tersebut sangat diperlukan, agar tujuan pembangunan mencapai keberhasilan (Bintoro, 1993:206), sehingga melalui proses

partisipasi tersebut kemampuan manusia dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. (Moeljarto, 1995:39).

Menurut Davis, 1962 dalam Sastropetro, 1985:51, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya. Lebih Jauh diutarakan bahwa partisipasi mengandung tiga gagasan penting yaitu:

1. Partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab yang merupakan segi menonjol dari rasa menjadi anggota, karena dengan diakuinya sebagai anggota akan menimbulkan rasa "sense of belongingness".

Selanjutnya untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat berpartisipasi diperlukan waktu.
2. Perlunya pembatasan terhadap dana perangsang, agar tidak menimbulkan kesan "memanjakan" yang akan menimbulkan efek negatif.
3. Subyek partisipasi hendaknya relevan, hal ini berkaitan dengan interest individu atau organisasi dimana mereka bergabung.
4. Memiliki kemampuan berpikir.

5. Memiliki kemampuan untuk dapat melakukan komunikasi timbal balik dengan menggunakan bahasa yang sama atau yang sama-sama dipahami.
6. Adanya kebebasan dalam berpartisipasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Tidak adanya penekanan dan pemaksaan yang dapat menimbulkan ketegangan dan gangguan pikiran pihak yang bersangkutan.

Definisi partisipasi menurut PBB dalam Slamet (1993), adalah sebagai keterlibatan aktif dan bermakna dari massa penduduk pada tingkatan tingkatan yang berbeda (a) di dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber sumber untuk mencapai tujuan tujuan tersebut; (b) pelaksanaan program program dan proyek proyek secara sukarela; dan (c) pemanfaatan hasil hasil dari suatu program atau suatu proyek. Oleh karena itu, pelibatan seseorang dalam berpartisipasi harus dilakukan pada proses proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengoperasiannya.

Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadiran program pembangunan serta proyek proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai perasaan memiliki terhadap proyek tersebut, lalu ketiga, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri (Conyers, 1994). Hal ini selaras dengan konsep "*man centred*

development”, yaitu suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia dan tidak sekedar alat pembangunan itu sendiri. Karena dalam suatu proses pembangunan akan jauh lebih baik, bila sejak awal sudah mengikut sertakan masyarakat pemakai hasil pembangunan itu (Yudohusodo, 1991). Dengan demikian hasilnya akan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

2.1.2. Tipe-tipe Partisipasi Masyarakat

Dulsedorp dalam Slamet (1993), mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi yang meliputi:

- 1). Penggolongan berdasarkan pada derajat kesukarelaan yang terdiri dari dua bentuk, yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas, dapat dibagi menjadi partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan, terjadi bila individu mulai berperan berdasarkan keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh orang atau lembaga lain. Sedang partisipasi terbujuk, bila individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain. Sedangkan partisipasi terpaksa terjadi bila seseorang berpartisipasi karena tekanan dan tidak didasari kesukarelaan atau terpaksa.
- 2). Penggolongan berdasarkan pada cara keterlibatan dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila orang menampilkan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi seperti misalnya, mengambil peran dalam pertemuan, diskusi, menyumbangkan tenaga dan

sebagainya sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi bila seorang mendelegasikan hak partisipasinya kepada orang lain, misalnya dalam pengambilan keputusan seperti halnya di senat, DPR, dewan dewan koperasi dan sebagainya. Namun demikian wakil wakil tersebut, diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan serta melindungi hak hak yang diwakili, harapannya adalah agar para wakil itu, dapat mengambil bagian di dalam proses pembuatan keputusan yang lebih tinggi.

- 3). Penggolongan berdasarkan pada keterlibatan dalam berbagai tahap dalam proses pembangunan terdiri dari 6 (enam) langkah, yaitu perumusan tujuan, penelitian, persiapan rencana, penerimaan rencana, pelaksanaan dan penilaian. Disebut partisipasi lengkap apabila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap tersebut, sedangkan partisipasi sebagian adalah bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat seluruhnya dalam tahapan tersebut.
- 4). Penggolongan berdasarkan pada tingkatan organisasi dibedakan antara partisipasi yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Partisipasi terorganisasi terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan, sedang partisipasi tidak terorganisasi terjadi bila orang orang berpartisipasi kadang kadang saja yang umumnya karena keadaan memaksa. Partisipasi tidak terorganisasi ini akan tumbuh menjadi partisipasi terorganisasi bila kegiatan yang dilakukan itu berulang ulang, sehingga demi kelancaran pelaksanaannya diperlukan pengorganisasian.

2.1.3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan mulai dari proses perencanaan sampai dengan operasional pembangunan tersebut (Slamet, 1993). Menurut Keith Davis (Sastropetro, 1988:16) menyebutkan bahwa bentuk kontribusi dalam berperan serta terdiri dari:

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa;
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang;
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya dari pihak ketiga;
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri;
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja;
- f. Aksi massa;
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga;
- h. Membangun proyek masyarakat yang sifatnya otonomi.

Dusseldorp (dalam Slamet: 1992:10-21) mencoba membuat klasifikasi dari berbagai tipe peran serta. Klasifikasi di dasarkan pada sembilan dasar. Masing-masing dasar jarang terpisah satu sama lain, artinya dalam banyak hal mengidentifikasi suatu kegiatan peran serta yang sama. Sembilan dasar tersebut adalah:

- a. Penggolongan peran serta berdasarkan pada derajat kesukarelaan;
- b. Penggolongan peran serta berdasarkan cara keterlibatan;
- c. Penggolongan peran serta berdasarkan pada kelengkapan keterlibatan berbagai tahap dalam proses pembangunan;
- d. Penggolongan peran serta berdasarkan pada tingkatan organisasi;
- e. Penggolongan peran serta berdasarkan intensitas dan frekuensi kegiatan;

- f. Penggolongan peran serta berdasarkan pada lingkup liputan kegiatan;
- g. Penggolongan peran serta berdasarkan pada efektifitas;
- h. Penggolongan peran serta berdasarkan pada siapa yang terlibat;
- i. Penggolongan peran serta berdasarkan ada gaya peran serta.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana (Schumbeler, 1996:32) adalah peran serta lebih merupakan proses dan bukan produk, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, peran serta dapat dilakukan oleh pihak lain dan pentingnya unsur kesediaan masyarakat. Dari beberapa penjelasan para ahli di atas mengenai bentuk partisipasi, maka bentuk partisipasi masyarakat dapat dirangkum dalam Tabel II.1. di bawah ini:

**TABEL: II.1.
RANGKUMAN KONSEP BENTUK PARTISIPASI**

Keith Davis dalam Sastropetro 1988	Dusseldorp Dalam Slamet 1992
Konsultasi	Organisasi
Bentuk sumbangan	Kegiatan
Aksi masa	Ruang lingkup

Sumber: Hasil Kajian Penelitian

Berdasarkan hasil rangkuman tersebut di atas maka bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan prasarana lingkungan dapat dikategorikan dalam:

- a. Bentuk sumbangan, yaitu material, uang, tenaga dan pikiran

- b. Bentuk kegiatan, yaitu peran serta dilakukan secara bersama atau sendiri-sendiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing dan peran serta dikerjakan oleh masyarakat atau diserahkan pada pihak lain.

2.1.4. Efektivitas Partisipasi Masyarakat

Menurut Drucker (1974) bahwa efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran empiris dalam suatu sistem dengan keluaran (output) yang diharapkan. Jadi efektifitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai dengan tujuan semula. Menurut Harvey & Blanchard (1996), bahwa efektivitas bila dihubungkan dengan konteks manajemen adalah tercapainya suatu tujuan yang konsisten dengan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok pada tingkatan yang lebih bawah dan berlaku juga bahwa efektivitas tampak seperti kontinum yang beranjak sangat efektif hingga pada sangat tidak efektif.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka efektivitas dapat disimpulkan sebagai berikut: Suatu upaya untuk mencapai tujuan secara konsisten dengan memanfaatkan dan menggunakan sarana prasarana serta sumber daya yang tersedia.

Alasan "efektivitas dan efisiensi" masyarakat dalam berpartisipasi menurut Rukmana (1993:214) adalah:

- a). Partisipasi masyarakat memberikan kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas;
- b). Partisipasi masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini akan dapat menghasilkan rancangan rencana, program dan kebijaksanaan yang lebih realistis. Selain itu

memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia dan mampu menyumbangkan sumber daya mereka sendiri seperti uang dan tenaga bagi pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan;

- c). Partisipasi masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun (prasarana, rumah, bangunan umum). Hal ini tentu akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan.

2.1.5. Tolok Ukur Partisipasi Masyarakat

Menurut Sherry Arnstein (1969) yang dikutip Panuju (1999:69-76), tingkat peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi tingkat peran serta masyarakat. Secara garis besar tipologi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manipulation atau manipulasi

Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasehat advising board. Dalam hal ini tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. Therapy atau penyembuhan

Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan dari pada mendapat masukan dari mereka.

3. *Informing atau pemberian informasi*

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan peran serta masyarakat. Meskipun demikian yang sering menjadi penekanan lebih pada pemberian informasi satu arah dari pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu, informasi diberikan pada akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

4. *Consultation atau konsultasi*

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju peran serta penuh dari masyarakat. Akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah *attitude survey* atau survei tentang arah pikir masyarakat, *neighbourhood meeting* atau pertemuan lingkungan masyarakat dan *public hearing* atau dengar pendapat dengan masyarakat.

5. *Placation atau perujukan*

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan masyarakat diperhatikan, namun suara masyarakat itu seringkali tidak didengar karena

kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. *Partnership atau kemitraan*

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

7. *Delegated power atau pelimpahan kekuasaan*

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

8. *Citizen control atau masyarakat yang mengontrol*

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melewati pihak ketiga.

Kedelapan tingkatan tersebut, secara umum dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar partisipasi yaitu:

- 1) Tidak diikuti sertakan (*non participation*), merupakan tingkat paling bawah (1) manipulation dan (2) perbaikan (*therapy*) yang bertujuan untuk memberdayakan pemegang kekuasaan dalam mendidik dan memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat.
- 2) Tingkat penghargaan atau formalitas (*degrees of tokenisme*), terdiri dari tingkatan (3) *informing* dan (4) *consultation* yang bertujuan sebagai partisipasi formalitas dan hanya sebagai pendengar serta hanya memiliki hak untuk memberikan suara, namun suaranya belum tentu menjadi suatu bahan bagi pengambilan keputusan, karena keputusan tetap berada di tangan pemrakarsa kegiatan. Bentuk yang ke (5) *placation* dipandang sebagai tingkat tokenisme yang paling tinggi dimana masyarakat telah mempunyai hak untuk memberikan *advice*.
- 3) Tingkat kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*), adalah tingkatan yang paling atas seperti *partnership*, *delegated power*, dan *citizen power*. Tingkatan ini memiliki kekuatan bernegosiasi dan mengambil keputusan secara mayoritas.

TABEL: II.2.
EIGHT RUNGS ON THE LADDER OF CITIZEN PARTICIPATION

8	Kontrol Masyarakat (<i>citizen control</i>)		Kekuatan Masyarakat
7	Pelimpahan Kekuatan (<i>delegated power</i>)		
6	Kerjasama (<i>partnership</i>)		
5	Penentruman (<i>placation</i>)		Tingkat Tokenism
4	Konsultasi (<i>consultation</i>)		
3	Informasi (<i>informing</i>)		Tidak ikut serta
2	Perbaikan (<i>therapy</i>)		
1	Manipulasi (<i>manipulation</i>)		

Sumber: Arstein dalam Panuju, 1999.

Menurut Arstein, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan sempurna apabila telah berada pada jenjang *degrees of citizen power*, yaitu masyarakat telah memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil keputusan.

Untuk mengukur tingkat peran serta dapat dilakukan dengan mengukur tingkat peran serta individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan Chapin dan Goldhamer (dalam Slamet, 1994:82-89). Chapin mengungkapkan bahwa skala peran serta dapat diperoleh dari penilaian-penilaian terhadap kriteria-kriteria tingkat peran serta sosial yaitu:

- a). Keanggotaan dalam organisasi atau lembaga-lembaga sosial,
- b). Kehadiran dalam pertemuan,
- c). Membayar iuran/sumbangan,
- d). Keanggotaan dalam kepengurusan,
- e). Kedudukan anggota di dalam kepengurusan.

Selanjutnya Goldhamer untuk mengukur peran serta dengan menggunakan empat variable yaitu:

- a). Jumlah asosiasi yang dimasuki,
- b). Frekuensi kehadiran,
- c). Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan,
- d). Lamanya menjadi anggota.

Berdasarkan skala peran individu tersebut maka dapat disimpulkan skala untuk mengukur peran serta masyarakat, yaitu:

- a). Frekuensi kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan,

- b). Keaktifan anggota kelompok dalam berdiskusi,
- c). Keterlibatan anggota dalam kegiatan fisik,
- d). Kesiediaan memberi iuran rutin atau sumbangan berbentuk uang yang telah ditetapkan.

2.1.6. Motivasi dan hambatan masyarakat dalam berpartisipasi

Berdasarkan teori dari Maslow (Adam I, 2000), tentang teori hirarki kebutuhan (*hierarchy of need*) atau lebih dikenal dengan teori motivasi (teori Maslow) yang lebih cenderung memperhatikan pada psikologis yang sehat dan membangun teori dengan cara deduktif. Berdasarkan teori tersebut Maslow mengasumsikan: a). *People are wanting animal their desires are never completely satisfied* (manusia adalah makhluk yang selalu berkeinginan dan keinginan manusia tidak pernah terpenuhi seluruhnya), b). *A satisfied need is not a motivator of human behavior* (kebutuhan manusia/keinginan yang sudah terpenuhi tidak akan menjadi pendorong lagi), dan c). *Human needs are arranged in a hierarchy of importance* (kebutuhan manusia tersusun menurut hirarki tingkat kepentingan).

Hambatan/keengganan yang terjadi dalam masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pandangan Conyers (1994:186) karena pertama, masyarakat tidak akan turut berperan serta jika merasa bahwa peran sertanya tidak akan berpengaruh pada hasil akhir; kedua, masyarakat akan enggan berperan serta dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau aktifitas yang mereka lakukan dirasakan tidak akan berpengaruh secara langsung.

2.1.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi terdiri dari faktor dari dalam (*internal*) antara lain: jenis kelamin/seks, umur, pendidikan, pendapatan dan mata pencaharian sedangkan faktor dari luar adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Partisipasi bagi seorang laki laki dan perempuan terhadap lingkungan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya persepsi mengenai kekuatan dan kelemahan sebagai kodrat manusia, sehingga perbedaan ini menjadi suatu persoalan yang membudaya (*social Conventions and norms*) (Kartasasmita, 1996).

Menurut Soedarno, dkk (1992), bahwa dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan. Selain itu beberapa fakta menunjukkan bahwa usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994:142).

Menurut Litwin (1986), bahwa salah satu karaktereristik partisipan dalam pembangunan partisipasif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk partisipasi yang dapat diberikan. Selain itu semakin tinggi pendidikan yang diperoleh, maka seseorang akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi. Dengan demikian dapat dipahami bila ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan partisipasi.

Jenis pekerjaan juga berpengaruh terhadap partisipasi karena mempengaruhi derajat aktifitas seseorang dalam kelompok dan mobilitas individu (Slamet, 1994:115-116). Seseorang yang sibuk dalam urusan bisnis atau kantor, tentunya sangat tipis kesempatan untuk berpartisipasi dibandingkan seseorang yang banyak mempunyai waktu luang dalam pekerjaannya, oleh karena itu jelas bahwa jenis pekerjaan juga berpengaruh terhadap partisipasi.

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi. Barros (1993) menyatakan bahwa, banyak hal tampak bahwa penduduk yang lebih kaya cenderung lebih senang mengeluarkan/membayar dengan uang sebagai pengganti kerja fisik. Sementara penduduk miskin lebih banyak melakukan pekerjaan dari pada mengeluarkan uang, sementara buruh yang berpenghasilan pas pasan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Selain itu besarnya pendapatan juga memberi peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi yang bertujuan pada keuntungan dan kepuasan dari apa yang telah mereka tanamkan.

Salah satu ciri sosial dan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di kota, pada umumnya mereka menunjukkan jiwa bersatu, kepercayaan pada diri sendiri dan kestabilan yang kuat. Orang-orang rela bekerja sama untuk menanggulangi kesulitan bersama, dan banyak kasus yang telah membuktikan bahwa mereka akan bekerjasama untuk menyelamatkan rumah dan lingkungannya. Kebanyakan keluarga yang telah hidup bertahun-tahun akan ikut terlibat dalam kegiatan bersama (Taylor dalam Suparlan, 1995:96).

Seseorang yang bertempat tinggal tanpa kejelasan status kepemilikan hunian dan lahannya, maka seseorang atau keluarga tidak akan merasa aman dan tentram sehingga

akan mengurangi minat mereka untuk memelihara lingkungan tempat tinggalnya (Turner dalam Panudju, 1999:10). Dalam hal ini seseorang yang bertempat tinggal tanpa kejelasan status tempat tinggalnya, maka seseorang akan enggan untuk memperbaiki tempat tinggal, menjaga lingkungan sekitar, mereka akan berpikir bahwa apa yang akan dilakukannya tentu akan sia-sia karena suatu saat mereka bisa meninggalkan tempat tinggalnya dengan atau tanpa paksaan. Oleh karena itu jelas bahwa status hunian akan berpengaruh pada partisipasi seseorang dalam kegiatan bersama untuk memperbaiki lingkungannya.

2.2. Pembangunan Prasarana Perkotaan

Pembangunan ditinjau dari sudut *Etimologik* berasal dari kata bangun yang meliputi segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan), dan behavioral (prilaku). Pembangunan didasarkan 5 (lima) ide pokok, yaitu: *Pertama*: Pembangunan mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari kondisi yang kini ada, *Kedua*: Kemampuan untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, *Ketiga*: Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar baik secara konseptual maupun secara operasional, *Keempat*: Merupakan suatu rencana yang tersusun rapi dalam kurun waktu tertentu, *Kelima*: Merupakan cita cita dari usaha dan perjuangan. (Siagian, 1985:29). Konsep tersebut di atas, menyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan merupakan usaha sadar suatu masyarakat bangsa, negara dan pemerintah dalam mewujudkan cita-citanya. Dari paradigma tersebut, maka lahirlah konsep pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan

social (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan, dan pembinaan.

Ada beberapa konsep pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan prasarana lingkungan, yang pertama adalah konsep pembangunan tersebut tanpa melibatkan masyarakat (*top down*), dalam hal ini pemerintah hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek dari pembangunan. Akibat yang ditimbulkan dari strategi tersebut antara lain: (i). tugas-tugas dari atas dengan berbagai "target" dan kontrol yang ketat, datang bertubi-tubi membebani masyarakat sehingga tiada kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan prakarsa dan swadainya (Andrew dalam Ndraha, 1982:120-121); (ii). adanya anggapan masyarakat bahwa pembangunan adalah urusan pemerintah dan bila ada kerusakannya, hal itu juga merupakan masalah pemerintah (Sastropetro, 1988:1); (iii). sikap mental masyarakat yang hanya akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya apabila ada pengawasan dari atas (Koentjaraningrat, 1974:54-55); (iv). didorong oleh hasrat untuk mencapai keberhasilan secepat-cepatnya, pemerintah cenderung mengabaikan pembentukan kemampuan dan proses pembinaan institusi (Moeljarto, 1995:43); (v). pemerintah lebih cenderung berorientasi pada pembangunan jangka pendek maupun menengah dan melupakan pembangunan masyarakat yang mempunyai sasaran jangka panjang (Siagian, 1984:39). Uraian di atas memberi kesan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dengan sistem dari atas kebawah akan dapat berjalan lebih efisien.

Konsep kedua adalah proses pembangunan yang melibatkan masyarakat, dalam hal ini masyarakat secara langsung dilibatkan dalam proses pembangunan, baik pada

tahap pra konstruksi, konstruksi, maupun tahap pasca konstruksi. Pentingnya pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan tersebut, karena (i). tahap pra konstruksi merupakan tahap pelibatan masyarakat yang paling tinggi, dimana pada tahap ini masyarakat dapat menentukan tujuan, merumuskan program, biaya, sumber biaya dan sebagainya sesuai dengan keinginan mereka, (ii). dalam tahap pelaksanaan konstruksi, pengukurannya berorientasi pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktifitas-aktifitas nyata dari program yang telah ditentukan, dan (iii). dalam tahap pasca konstruksi pengukurannya pada sejauh mana masyarakat terlibat pada pemeliharaan dari hasil pembangunan tersebut. Dengan demikian pembangunan berarti (i). membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*), (ii). mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai serta kesejahteraan (*equity*), (iii). memberi kepercayaan pada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk adanya kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*), (iv). membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*), dan (v). pembangunan berarti mengurangi ketergantungan dari negara lain dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*) (Ndraha, 1990:35).

Pada tahap awal pembangunan, peranan pemerintah biasanya besar. Kegiatan pembangunan sebgaiian besar adalah usaha pemerintah. Bahkan di negara yang menganut sosialisisme yang murni, seluruh kegiatan pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah. Namun dalam keadaan negara berperan besarpun, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut (Kartasasmita, 1997).

Seringkali dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat tersebut belum sepenuhnya memuaskan, namun hasil suatu proyek yang telah dihasilkan dari partisipasi masyarakat, jelas lebih menguntungkan dan mencerminkan kebutuhan masyarakat, dibandingkan dengan proyek yang tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini berarti, bahwa masyarakat tidak hanya dilihat sebagai obyek dalam setiap pembangunan, tetapi lebih dari itu, sasarannya adalah membuat masyarakat sebagai subyek dalam hal ini, mitra pembangunan dalam suatu proses yang berawal dari perencanaan atau penyusunan program sampai pada pelaksanaan bahkan operasi dan pemeliharannya. Oleh karena itu, harus disadari bahwa pembangunan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dengan masyarakat, sedang pemerintah pusat dan propinsi berperan sebagai pendukung dan pembina. Sebagai konsekuensinya, partisipasi masyarakat harus merupakan bagian yang terpenting dari suatu program pembangunan.

2.3. Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dewasa ini, telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya pembangunan tersebut hanya mengandalkan kemajuan fisik dan ekonomi saja. Pembangunan seharusnya juga menyentuh sisi lain kehidupan manusia selain pembangunan fisik dan ekonomi, yaitu pembangunan sosial politik masyarakat.

Secara teoritis, untuk menumbuhkan kegiatan partisipasi dalam masyarakat diperlukan suatu ketrampilan dan pengetahuan agar mencapai berbagai tingkatan yaitu tingkatan saling mengerti, tingkatan penasehat/sugesti dan tingkat otoritas. (Sastropetro,

1988:47-49). Dengan demikian partisipasi dalam proses pembangunan mempunyai sasaran pembangunan masyarakat yang meliputi perbaikan kondisi, pemenuhan kebutuhan, peningkatan taraf hidup, peningkatan swadaya, pembangkitan partisipasi masyarakat dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. (Ndraha, 1987). Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut, bisa dilakukan dengan pendaya gunaan sumber- sumber daya didalam masyarakat yang umumnya telah ada sejak masyarakat itu ada (Slamet, 1993).

Pembangunan masyarakat sebagai suatu gerakan, lebih menonjol dinegara negara yang sedang berkembang seperti misalnya di negara negara di kawasan Benua Asia, Afrika dan Amerika Latin. Namun demikian, pembangunan masyarakat sebagai suatu gerakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki kehidupan mereka bukannya tidak ada. Di Amerika Serikat misalnya, dalam rangka membangun masyarakat melalui masyarakat itu sendiri telah dikenal dengan gerakan empat H, (Taff dalam Slamet, 1993), yaitu suatu gerakan yang bermaksud untuk menyadarkan bahwa manusia itu memiliki 4 H (Hand, Head, Heart, Hearer). Artinya keempat organ tubuh terbut harus dimanfaatkan sebesar besarnya demi mencapai keinginan sehingga terwujud suatu kesejahteraan.

Usaha membangun masyarakat dilakukan secara sistemis dan terencana, memiliki strategi yang menekankan pada kemandirian, yang dapat disebut strategi responsif (Ickis, 1981). Strategi ini, merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan (*welfare strategy*), yaitu adanya keyakinan bahwa orang hidup akan secara langsung dipengaruhi oleh usaha usaha pembangunan untuk mengetahui dengan pasti apa kebutuhan dan kekurangan mereka dan tahu cara berbuat demi pemenuhan kebutuhan dan kekurangan itu. Strategi

selanjutnya ialah, strategi yang menekankan pada pemerkuat masyarakat sebagai suatu kesatuan atau sebagai “*integrated*”, yang mengacu pada penyiapan-penyiapan struktural dan tidak mencerminkan persepsi dan amsumsi kritis yang mendasarinya. Namun terlepas dari strategi mana yang dianut, setiap usaha pembangunan harus selalu memperhatikan sifat dan arah dari perubahan sosial yang terjadi dari pembangunan itu sendiri, karena hal tersebut akan berdampak dengan munculnya kesenjangan didalam masyarakat maupun antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dampak lain yang dirasakan adanya kecemburuan sosial yang berasal dari perhatian yang berlebihan pada golongan tertentu di masyarakat. Kecemburuan tersebut dirasakan bila proyek proyek pembangunan, baik pembangunan fisik maupun nonfisik sangat menguntungkan sekelompok orang atau orang tertentu saja, maka diperlukan pembangunan yang merata disemua aspek kehidupan, dengan didasarkan atas kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dewasa ini sangat diperlukan.

Keberhasilan dari implementasi teori tersebut, memang sangat tergantung pada “perubahan perilaku” individu untuk dapat memberdayakan diri sendiri, sehingga dapat menjadikan sebagai perilaku sehari-hari, dan pada akhirnya inisiatif pembangunan dapat tercipta dari bawah. Atas dasar tersebut maka muncul konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) yang telah mulai dimanfaatkan pada tahun 1990-an.

2.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut PBB adalah menciptakan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi

dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil pembangunan secara adil (United Nations dalam Midgley, 1986:24), dimana keadilan tersebut erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panuju, 1999:69-71).

Menurut Ndraha, 1987, partisipasi dalam proses pembangunan mempunyai sasaran pembangunan masyarakat yang meliputi perbaikan kondisi, pemenuhan kebutuhan, peningkatan taraf hidup, peningkatan swadaya, pembangkitan partisipasi masyarakat dan penumbuhan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Hal ini berarti menyiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menerima tanggung jawab dan aktifitas tertentu (Ramos dan Roman dalam Yeung, Mc Gee, 1986:97), dimana di dalamnya terdapat pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada masyarakat dalam aktifitas tertentu, dengan memberikan kontribusi sumber daya yang dimiliki.

Ada beberapa keuntungan apabila partisipasi masyarakat diterapkan (Sastropetro, 1988:55): (i). pelaksanaan pembangunan akan sesuai dengan kepentingan bersama; (ii). kerja sama antar organisasi/lembaga akan lebih serasi; (iii). akan menimbulkan gairah untuk ikut memelihara; (iv). dengan rasa saling pengertian maka berbagai kendala yang timbul atau yang akan timbul akan lebih mudah untuk diatasi.

2.5. Prasarana Lingkungan

Perkembangan suatu kota, tentunya sangat identik dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan. Segala bentuk pembangunan yang dilakukan oleh manusia, sedikit ataupun banyak pasti mempunyai pengaruh terhadap mutu dan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, diperlukan adanya program pembangunan prasarana lingkungan. Prasarana lingkungan disini meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah, dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan air hujan untuk pematuan (drainase) dan pencegahan banjir (Dirjend Cipta Karya, IAP, 1997:86). Oleh karena itu, pemerintah sebagai salah satu penanggung jawab terhadap penanganan sarana dan prasarana lingkungan khususnya di kawasan kumuh, telah banyak melakukan program pembangunan melalui Kampung Improvement Programe (KIP) dan atau Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) (Rukmana, 1993:7).

2.5.1. Pengelolaan Limbah Cair manusia

2.5.1.1. Pengertian Limbah Cair manusia

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pembuangan limbah rumah tangga maupun industri yang secara langsung dibuang melalui aliran sungai, memiliki dampak lingkungan yang sangat kompleks, untuk itu diperlukan pola/strategi penanganan yang secara langsung berkaitan dengan pengelolaan limbah tersebut. Menurut Micalf dan Eddy (1981), bahwa pengelolaan limbah meliputi kegiatan pengumpulan, penyaluran dan pembuangan air limbah.

Dari pengertian di atas, pengelolaan limbah identik dengan pengertian manajemen pada umumnya, dimana menurut Drucker (1978), manajemen adalah fungsi obyektif dan harus didasarkan pada tanggung jawab untuk karya. Sedangkan pengertian manajemen menurut Manullang (1981) merupakan seni dari ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari sumber daya manusia untuk tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Dari uraian tersebut, pengelolaan adalah kemampuan

Limbah industri ialah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri dengan beberapa ciri antara lain: (a) dihasilkan oleh kegiatan industri, (b) mengandung bahan organik, (c) mengandung logam berat, dan (d) mengandung bahan ikutan lainnya. Pada umumnya limbah industri mempunyai indikator antara lain: (a) *Biological oxygen demand* (BOD), (b) *Carbon oxygen demand* (COD), (c) logam berat dan (d) bahan ikutan yang berupa padatan. Dengan kandungan cemaran tersebut, pengelolaan limbah akan sangat diperlukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

2.5.1.2. Sistem Pengumpulan Limbah Cair Manusia

Pengumpulan limbah cair manusia dimaksudkan agar limbah cair manusia yang dihasilkan dari rumah tangga, dapat berkumpul menjadi suatu aliran yang mengalir dalam suatu aliran tertentu dan dikumpulkan dalam beberapa bak penampung, sehingga limbah cair manusia tersebut mudah diawasi kuantitas dan kualitasnya. Pengumpulan limbah cair manusia dapat dilaksanakan sendiri sendiri oleh para penghasil limbah sebelum limbah tersebut diolah pada instalasi pengolah limbah milik sendiri atau pengumpulan secara bersama sama dalam suatu saluran pengumpul (*interceptor*) untuk diolah pada instalasi pengolah limbah cair secara terpadu (lihat gambar di halaman 88-92).

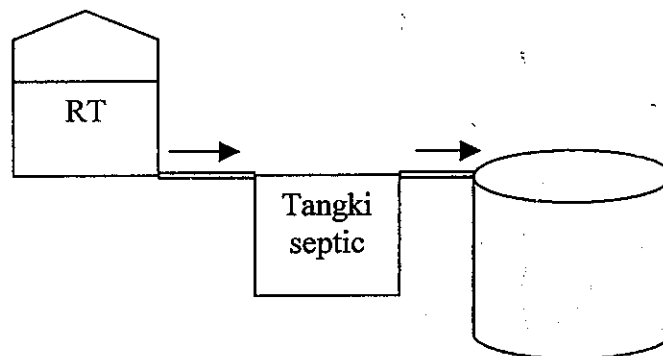
2.5.1.3. Sistem Pembuangan Limbah Cair Manusia

Secara garis besar ada dua macam sistem pembuangan limbah cair manusia, yaitu:

1. Sistem Pembuangan Setempat dimana limbah cair manusia tersebut ditampung dalam tangki septic atau cubluk sehingga penguraian alami akan terjadi dan cairannya diserap tanah. Hampir sebagian besar kondisi pembuangan limbah cair manusia di Indonesia memakai sistem ini, sistem pembuangan setempat ini hanya menerima buangan dari wc dan atau kamar mandi, sedangkan untuk air bekas cucian dan dapur

masih dialirkan kesaluran drainase/badan air penerima yang ada. Ada beberapa jenis pembuangan limbah cair manusia setempat yaitu:

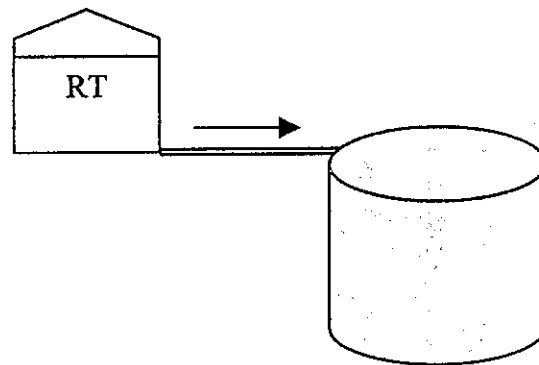
- a). Tangki septic dan peresapan dimana limbah cair manusia tersebut ditampung dan terurai dalam tangki septic, sedangkan cairannya dibuang ke bidang atau sumur resapan. Model/sistem ini yang umum dipakai di Indonesia. (lihat gambar 2.1. di bawah ini).



GAMBAR 2.1.
SISTEM PEMBUANGAN TANGKI SEPTIC DAN PERESAPAN

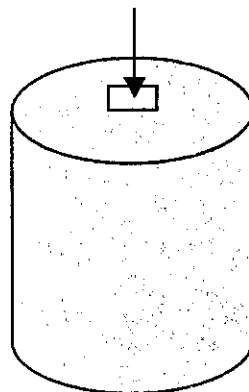
Sumber: Data primer diolah 2003

- b). Cubluk adalah sarana penampungan air limbah manusia secara langsung, biasanya direncanakan dengan penampang lingkaran yang mempunyai kedalaman tertentu. (lihat Gambar 2.2. di halaman berikutnya).



GAMBAR 2.2.
MODEL/SITEM CUBLUK
Sumber: Data primer diolah 2003

- c). Pit Latrin adalah lubang penampungan limbah cair manusia yang dibangun langsung dibawah kloset jongkok. Apabila lubang penampungan tersebut sudah penuh, maka harus dibuat lubang baru lain untuk fungsi dan manfaat yang sama. (lihat gambar 2.3. di bawah ini).



GAMBAR 2.3.
MODEL/SISTEM PIT LATRIN
Sumber: Data primer diolah 2003

2. Sistem Pembuangan Terpusat (*off site sanitation*)

Dalam sistem pembuangan terpusat ini, limbah cair manusia dibuang melalui sistem jaringan perpipaan (*small bore sewer*) ketempat pengolahan limbah cair manusia.

2.5.1.4. Sistem Pengolahan Limbah Cair Manusia

Pengolahan limbah cair manusia merupakan suatu cara penanganan yang dipergunakan dalam rangka memenuhi standar baku mutu limbah cair manusia yang telah ditetapkan serta memenuhi syarat kesehatan dan lingkungan.

Pengolahan limbah cair manusia dapat dilaksanakan secara individu maupun secara kolektif. Pengolahan limbah cair manusia biasanya dilaksanakan apabila secara finansial, penghasil air limbah tersebut mampu membiayai sendiri, lokasinya terpencil, atau secara teknik dan manajemen tidak memungkinkan untuk mengolah limbah cair manusia secara kolektif. Pengolahan limbah cair manusia secara kolektif biasanya dilaksanakan apabila secara teknik dan manajemen memungkinkan.

2.6. Kaitan Partisipasi Masyarakat dengan Pengelolaan Limbah Cair manusia

Partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan pada tahap identifikasi dan pemecahan masalah, sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju, 1999:69-71).

Pengelolaan adalah kemampuan untuk menggerakkan tenaga kerja, dana, organisasi dan peralatan dalam proses pembangunan (Bintoro, 1993). Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, penyaluran dan pembuangan air limbah untuk mendapatkan kondisi lingkungan yang sehat.

Menurut Schubeler, 1996:32, berbagai hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana:

1. Peranserta tidak terbatas pada proyek pembangunannya saja, tetapi termasuk berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari diluar konteks proyek tersebut;
2. Peranserta dalam pengelolaan prasarana lebih merupakan proses dan bukan produk;
3. Masyarakat yang berperanserta tidak terbatas pada masyarakat setempat, tetapi dapat pula dari pihak luar yang menaruh perhatian dalam pengelolaan tersebut;
4. Peranserta dalam pengelolaan prasarana, didasarkan pada kesediaan hubungan antara kelompok, aktor atau *stakeholder*.

Berdasarkan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam pengelolaan prasarana merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang mempengaruhi kualitas dan kelancaran pelayanan prasarana. Kegiatan tersebut dapat berupa pemeliharaan kebersihan dan keindahan, serta perawatan secara periodik yang meliputi pengecatan prasarana yang telah dibangun, guna menjamin keberlanjutan fungsi prasarana.

BAB III

KEADAAN MASYARAKAT DAN BANGUNAN PENGOLAH LIMBAH CAIR MANUSIA DI KELURAHAN MERGOSONO KOTA MALANG

Bab ini berisi uraian keadaan masyarakat dan bangunan pengolah limbah cair manusia di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan, wawancara dengan nara sumber dan data sekunder. Dengan memahami hal tersebut di atas, diharapkan agar lebih mudah untuk mengetahui lokasi studi, karakteristik masyarakat dan keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap lingkungan pada umumnya dan pembangunan pengolah limbah cair manusia pada khususnya.

3.1. Lokasi Studi

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, mempunyai luas wilayah 110.06 km² dengan penduduk sekitar 756.982 jiwa dan rata-rata kepadatan penduduk setiap Km² adalah 6.878 jiwa.

Kota Malang dikelilingi oleh beberapa gunung dan pegunungan, sebelah utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur Pegunungan Tengger dan Pegunungan Buring, sebelah Barat Gunung Kawi dan Gunung Panderman serta disebelah selatan Gunung Kelud. Sedangkan sungai yang mengalir di Kota Malang adalah Sungai Brantas yang melewati wilayah Kec. Kedungkandang, Kec. Blimbing, Kec. Klojen dan Kec. Lowokwaru serta Sungai Amprong dan Sungai bango yang melewati Kecamatan Kedungkandang.

Kota Malang yang berada di tengah-tengah jalur lalu lintas Surabaya - Blitar dan

Batu, mempunyai dan berpotensi sebagai distributor barang dan jasa.

Kota Malang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan terbagi menjadi 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan. Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Blimbing, Klojen, Lowokwaru, Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang.

Kecamatan Kedungkandang terletak di bagian timur Kota Malang. Memiliki 12 Kelurahan, 89 Rukun Warga (RW), 656 Rukun Tetangga (RT) dan 35.317 Kepala Keluarga (sumber Kota Malang dalam Angka 2000), dengan luas wilayah 39,89 Km² Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas di Kota Malang.

Seperti halnya Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang juga mengalami problema yang sama dalam hal penyebaran penduduk. Kecamatan Kedungkandang yang terdiri dari 12 (dua belas) kelurahan, mempunyai 2 (dua) wilayah kelurahan yang terpadat penduduknya yaitu Kelurahan Kota Lama dan Kelurahan Mergosono dimana kedua kelurahan tersebut secara geografis terletak antara pusat kota dengan sungai Brantas.

Kelurahan Mergosono mempunyai batas-batas antara lain disebelah Utara adalah Kelurahan Kota Lama, sebelah Barat adalah jalan raya yang juga merupakan perbatasan dengan wilayah Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun, sebelah Selatan Kelurahan Gadang, dan sebelah Timur adalah sungai Brantas yang juga merupakan perbatasan dengan wilayah Kelurahan Bumiayu. Kelurahan Mergosono mempunyai luas wilayah 1,032 Km², jika dibandingkan dengan luas wilayah Kecamatan Kedungkandang 39,89 Km² memang merupakan wilayah kelurahan yang terkecil diantara kelurahan-kelurahan lainnya di wilayah Kec. Kedungkandang, namun jika dilihat dari jumlah penduduk yang mencapai

19.382 jiwa dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka Kelurahan Mergosono merupakan wilayah yang terpadat penduduknya di Kecamatan Kedungkandang.

Letak geografis yang berada tidak jauh dari pusat kota yaitu ± 1 Km dan berjarak ± 250 m dari pasar besar, serta mempunyai banyak kemudahan dari akses transportasi dimana hanya berjarak 50 m dari stasiun Kotalama, selain itu di Kelurahan Mergosono terdapat jalan raya yang sarana angkutannya selalu ada karena merupakan akses transportasi ke arah Pasar Induk Gadang, Kota Blitar dan wilayah Malang Selatan.

Selain jalan raya yang merupakan batas wilayah sebelah barat, batas sebelah timur adalah sungai Brantas yang merupakan salah satu sungai yang melintas dan membelah Kota Malang selain sungai Amprong dan sungai Bango.

Dari uraian tersebut di atas, Kelurahan Mergosono secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis sehingga menjadikan salah satu tujuan dari para migran.

3.2. Keadaan Masyarakat

Penduduk Kota Malang yang berjumlah sekitar 756.982 jiwa merupakan penduduk yang homogen, baik dilihat dari etnis maupun agama. Perubahan penduduk di Kota Malang selain disebabkan oleh jumlah kelahiran dan kematian juga disebabkan oleh adanya migrasi penduduk. Jumlah penduduk Kota Malang dari tahun ketahun cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat terlihat pada jumlah penduduk Kota Malang menurut hasil sensus penduduk (SP) pada tahun 1980 yang berjumlah 563.080 jiwa dan naik menjadi 695.089 jiwa menurut hasil sensus penduduk (SP) pada tahun 1990 serta menjadi 756.982 jiwa menurut hasil sensus penduduk (SP) pada tahun 2000. Dinamika Kota Malang selalu diwarnai oleh urbanisasi yang pada mulanya dapat dikatakan sebagai kebutuhan untuk mengisi kegiatan perekonomian perkotaan, Penduduk sebagai sumber

insani pembangunan pada hakekatnya memang sangat dibutuhkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam arti semakin besar jumlah penduduk yang berkualitas semakin besar pula jaminan keberhasilan pembangunan suatu kota.

Disamping itu dapat dikatakan bahwa Kota Malang terbentuk sejak jaman penjajahan Belanda, ini menunjukkan bahwa secara fisikpun kota telah berkembang sudah cukup lama, sehingga problematika yang timbul dalam pengelolaan kotapun akan berbeda dengan kota yang relatif baru atau kota yang baru berkembang akhir-akhir ini.

Seperti halnya kota-kota besar lainnya, salah satu permasalahannya adalah mengenai penyebaran penduduk yang tidak merata. Untuk menanggulangi hal ini, maka Pemerintah Kota Malang telah membuat jalan dan jembatan guna membuka wilayah Malang bagian Timur dari keterisolasian. Selain itu Pemerintah Kota Malang juga merencanakan pembangunan jalan lingkar Timur, kargo terminal, pengembangan kawasan industri dan infrastruktur lainnya sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, serta menyusun rencana untuk wilayah yang mengalami pertumbuhan pembangunan cukup pesat dengan menuangkan rencana tersebut ke dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang merupakan penjabatan dari Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Kecamatan Kedungkandang jumlah penduduknya adalah sebesar 140.923 jiwa yang terdiri dari laki-laki (WNI) berjumlah 69.289 jiwa, perempuan (WNI) berjumlah 71.190 jiwa, dan laki-laki (WNA) berjumlah 219 jiwa, serta perempuan (WNA) berjumlah 225 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk sekitar 3.767 jiwa per Km² adalah merupakan wilayah kecamatan terendah dalam hal kepadatan penduduknya.

Seperti halnya Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang juga mempunyai permasalahan mengenai penyebaran penduduk yang tidak merata. (lihat Tabel III.1 di bawah ini).

TABEL III.1
JUMLAH PENDUDUK TIAP KELURAHAN
DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG TAHUN 2002

NO	KELURAHAN	LUAS WIL. (Km ²)	PENDUDUK (Jiwa)	KEPADATAN (Jiwa/Km ²)
1	Mergosono	1,325	19.382	14.628
2	Arjowinangun	4,355	9.112	2.092
3	Tlogowaru	4,110	8.316	2.023
4	Wonokoyo	4,380	8.113	1.852
5	Bumiayu	4,310	10.024	2.325
6	Buring	4,285	10.005	2.335
7	Kotalama	1,370	19.427	14.180
8	Kedungkandang	3,180	12.237	3.848
9	Lesanpuro	3,070	12.076	3.933
10	Madyopuro	4,160	13.064	3.140
11	Cemorokandang	3,245	8.128	2.505
12	Sawojajar	2,100	11.039	5.257
	JUMLAH	39,890	140.923	3.533

Sumber: Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tahun 2000

Dari tabel tersebut, maka terlihat bahwa Kelurahan yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi di Kecamatan Kedungkandang adalah Kelurahan Mergosono dengan kepadatan penduduk 14.628 jiwa/km², walaupun Kelurahan Kota lama memiliki penduduk lebih banyak yaitu 19.427 dibandingkan penduduk Kelurahan Mergosono yang berjumlah 19.382 jiwa, namun Kelurahan Kotalama memiliki wilayah yang lebih luas yaitu 1,370 km² dibandingkan luas wilayah Kelurahan Mergosono yang hanya 1,325 km². Jumlah penduduk yang padat tersebut dikarenakan kedua kelurahan tersebut mempunyai letak geografis yang hampir sama yaitu berdekatan dengan pusat kota dan pasar besar.

Jumlah penduduk Kelurahan Mergosono selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran dari peningkatan penduduk tersebut adalah: pada tahun 1995 jumlah penduduknya adalah 15.037 jiwa, pada akhir tahun 1998 sebesar 17.524 jiwa, naik rata-rata 2,06 % dan pada akhir tahun 2000 adalah 19.392 jiwa.

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Mergosono terdiri dari buruh bangunan, buruh industri, PNS/ABRI, pensiunan, pedagang, pengangkutan dan lain-lain, dengan jenjang pendidikan yang tidak merata diseluruh jenjang. Secara umum sifat kegotong royongan di Kelurahan Mergosono relatif tinggi, hal ini disebabkan karena sifat masyarakat daerah perkampungan yang memiliki ikatan kekeluargaan yang tinggi. Adapun karakteristik masyarakat Kelurahan Mergosono dapat di lihat pada Tabel III.2. di bawah ini.

TABEL III.2
KARAKTERISTIK MASYARAKAT KELURAHAN MERGOSONO

JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	9.288 jiwa	19.382 jiwa
	PEREMPUAN	10.094 jiwa	
USIA	0 – 5 tahun	3.103 jiwa	19.382 jiwa
	6 – 12 tahun	2.078 jiwa	
	13 – 16 tahun	1.067 jiwa	
	17 – 60 tahun	12.106 jiwa	
	60 tahun ke atas	1.028 jiwa	
JENIS PENDIDIKAN	SD	12.302 jiwa	19.382 jiwa
	SLTP	2.298 jiwa	
	SMU	1.531 jiwa	
	Diploma	117 jiwa	
	Universitas	71 jiwa	
	Lain-lain	3.103 jiwa	

Sumber: Kantor Kelurahan Mergosono tahun 2000

Dari tabel di atas, jumlah penduduk Kelurahan Mergosono adalah 19.382 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 9.288 jiwa dan perempuan sebanyak 10.094 jiwa. Jumlah balita yang berusia sampai 5 tahun sebanyak 3.103 jiwa, anak-anak (usia 6-12 tahun) sebanyak 2.078, remaja (usia 13-16 tahun) sebanyak 1.067, usia produktif (usia 17-60 tahun) sebanyak 12.106 jiwa, dan usia di atas 60 tahun sebanyak 1.028 jiwa. Adapun jenjang pendidikannya adalah SD sebanyak 12.302 jiwa, SLTP sebanyak 2.298 jiwa, SMU sebanyak 1.531, Diploma sebanyak 117 jiwa, universitas 71 jiwa, dan lain-lain sebanyak 3.103. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian penduduknya adalah bersekolah di sekolah dasar atau hanya berpendidikan setingkat SD.

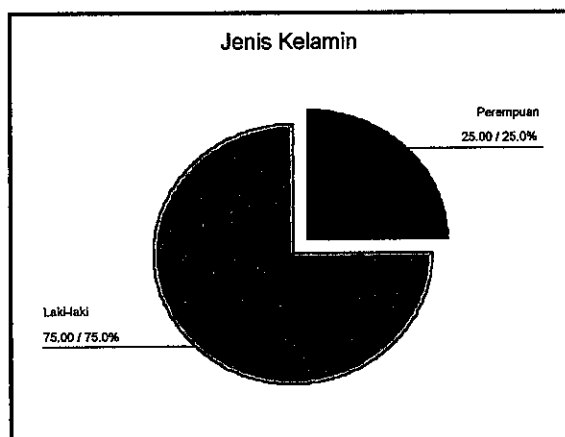
3.3. Kondisi Masyarakat Lebih Terperinci

Penduduk Kelurahan Mergosono berjumlah 19.382 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9.288 jiwa dan perempuan sebanyak 10.094 jiwa dengan usia produktif sebanyak 12.106 jiwa. Dari jumlah 100 responden, 75 responden adalah berjenis kelamin laki-laki dan 25 responden berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya distribusi frekuensi jenis kelamin di Kelurahan Mergosono dapat dilihat pada Tabel III.3. dan Gambar 3.1. di bawah ini.

TABEL III.3.
DISTRIBUSI FREKUENSI JENIS KELAMIN RESPONDEN

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	25	25.0	25.0	25.0
	Laki-laki	75	75.0	75.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 3.1.
DISTRIBUSI FREKUENSI JENIS KELAMIN RESPONDEN

Sumber: Data primer diolah 2003

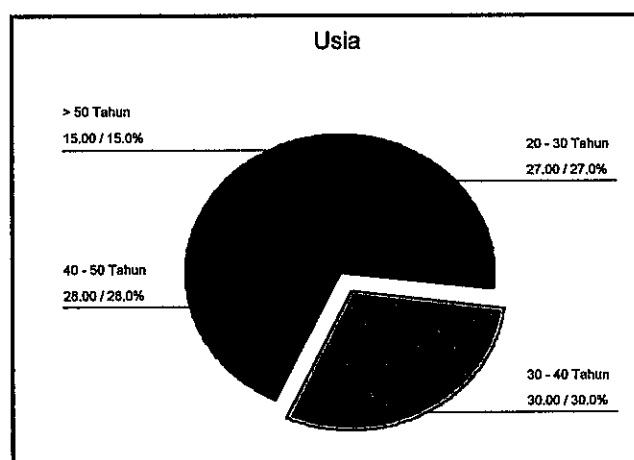
Di Kelurahan Mergosono jumlah balita yang ada yaitu usia sampai 5 tahun sebanyak 3.103 jiwa, jumlah anak yaitu yang berusia 6-12 tahun sebanyak 2.078 jiwa, jumlah remaja yaitu yang berusia 13-16 tahun sebanyak 1.067 jiwa, usia produktif yaitu

berusia 17-60 tahun sebanyak 12.106 jiwa, dan usia lansia yaitu yang berusia di atas 60 tahun sebanyak 1.028 jiwa. Distribusi frekuensi usia dari jumlah 100 responden adalah 27 responden berusia 20-30 tahun, 30 responden berusia >30-40 tahun, 28 responden berusia > 40-50 tahun, dan 15 responden berusia > 50 tahun. Untuk jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi usia dapat dilihat pada Tabel III.4. dan Gambar 3.2. di bawah ini.

TABEL III.4.
DISTRIBUSI FREKUENSI USIA RESPONDEN

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 - 30 Tahun	27	27.0	27.0	27.0
	30 - 40 Tahun	30	30.0	30.0	57.0
	40 - 50 Tahun	28	28.0	28.0	85.0
	> 50 Tahun	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 3.2.
DISTRIBUSI FREKUENSI USIA RESPONDEN

Sumber: Data primer diolah 2003

Jenjang pendidikan SD merupakan jumlah terbanyak dengan 12.032 jiwa, SLTP sebanyak 2.298 jiwa, SMU sebanyak 1.531, Diploma sebanyak 117 jiwa, sarjana sebanyak 71 jiwa dan lain-lain sebanyak 3.103 jiwa. Distribusi frekuensi tingkat pendidikan yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 38 responden berpendidikan setingkat SD, 30

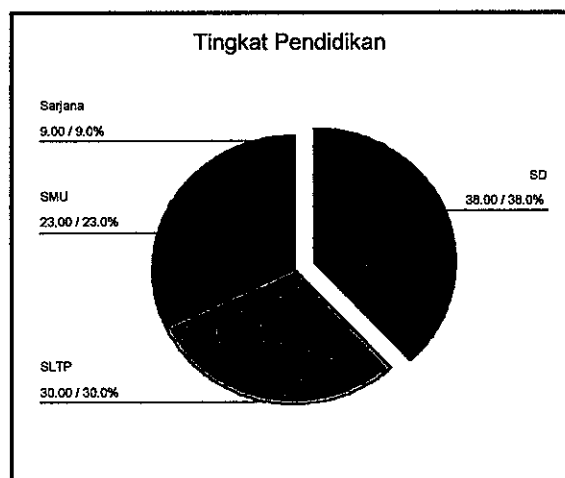
responden SLTP, 23 responden SMU, dan 9 responden berpendidikan Sarjana. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi Tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada Tabel III.5. dibawah ini dan Gambar 4.3. di halaman berikutnya.

TABEL III.5.
DISTRIBUSI FREKUENSI TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD	38	38.0	38.0	38.0
SLTP	30	30.0	30.0	68.0
SMU	23	23.0	23.0	91.0
Sarjana	9	9.0	9.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 3.3.
DISTRIBUSI FREKUENSI TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

Sumber: Data primer diolah 2003

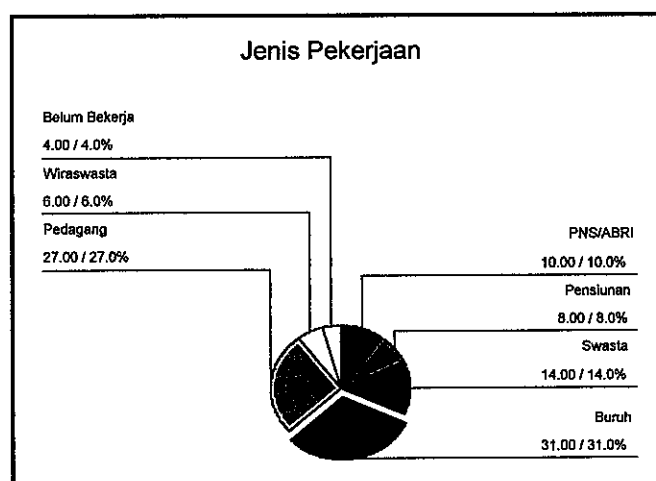
Jumlah penduduk Kelurahan Mergosono yang bekerja sebanyak 5884 orang dan yang belum bekerja sebanyak 238 orang. Distribusi frekuensi jenis pekerjaan yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 10 responden bekerja sebagai PNS/ABRI, 8 responden merupakan pensiunan, 14 responden merupakan pegawai swasta, 31 responden bekerja sebagai buruh, 27 responden bekerja sebagai pedagang, 6 responden berwiraswasta, dan 4 responden menyatakan belum bekerja. Untuk lebih jelasnya,

perhitungan distribusi frekuensi jenis pekerjaan tersebut dapat dilihat pada Tabel III.6. dan Gambar 3.4. di bawah ini.

TABEL III.6.
DISTRIBUSI FREKUENSI JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

		Jenis Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PNS/ABRI	10	10.0	10.0	10.0
	Pensiunan	8	8.0	8.0	18.0
	Swasta	14	14.0	14.0	32.0
	Buruh	31	31.0	31.0	63.0
	Pedagang	27	27.0	27.0	90.0
	Wiraswasta	6	6.0	6.0	96.0
	Belum Bekerja	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 3.4.
DISTRIBUSI FREKUENSI JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

Sumber: Data primer diolah 2003

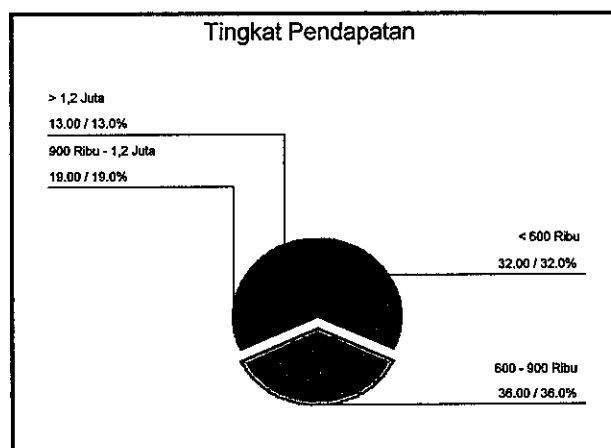
Sebagian besar tingkat ekonomi penduduk di Kelurahan Mergosono tergolong menengah kebawah. Oleh karena itu sebagian besar warga mempunyai penghasilan di bawah Rp. 1.000.000,-. Distribusi frekuensi tingkat pendapatan yang didapat dari jumlah 100 responden adalah 32 responden berpendapatan < Rp. 600.000,-/bulan, 36 responden berpendapatan Rp. 600.000,-Rp.900.000,-/bulan, 19 responden berpendapatan > Rp. 900.000,-Rp. 1.200.000,-/bulan dan 13 responden menyatakan berpendapatan > Rp.

1.200.000,-/bulan. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi tingkat pendapatan tersebut dapat dilihat pada Tabel III.7. dan Gambar 4.5. di bawah ini.

TABEL III.7.
DISTRIBUSI FREKUENSI TINGKAT PENDAPATAN RESPONDEN

		Tingkat Pendapatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 600 Ribu	32	32.0	32.0	32.0
	600 - 900 Ribu	36	36.0	36.0	68.0
	900 Ribu - 1,2 Juta	19	19.0	19.0	87.0
	> 1,2 Juta	13	13.0	13.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 3.5.
DISTRIBUSI FREKUENSI TINGKAT PENDAPATAN RESPONDEN

Sumber: Data primer diolah 2003

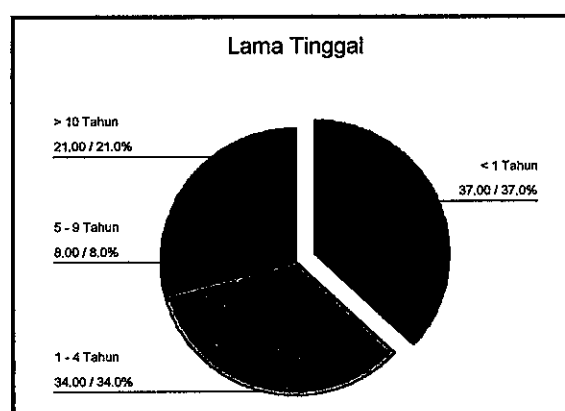
Distribusi frekuensi lama tinggal dalam hal ini, meliputi responden yang tinggal < 1 tahun, 1-4 tahun, 5-9 tahun, dan > 10 tahun. Distribusi frekuensi lama tinggal yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 37 responden tinggal < 1 tahun, 34 responden tinggal 1-4 tahun, 8 responden tinggal 5-9 tahun, dan 21 responden menyatakan telah tinggal > 10 tahun. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi lama tinggal tersebut dapat dilihat pada Tabel III.8. dan Gambar 3.6. di halaman berikutnya.

TABEL III.8.
DISTRIBUSI FREKUENSI LAMA TINGGAL RESPONDEN

Lama Tinggal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 1 Tahun	37	37.0	37.0	37.0
1 - 4 Tahun	34	34.0	34.0	71.0
5 - 9 Tahun	8	8.0	8.0	79.0
> 10 Tahun	21	21.0	21.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 3.6.
DISTRIBUSI FREKUENSI LAMA TINGGAL RESPONDEN

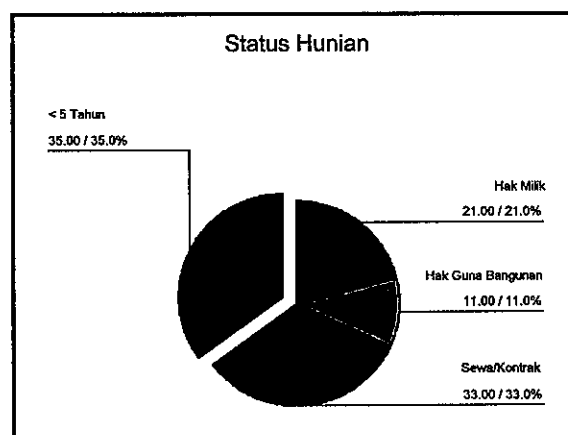
Sumber: Data primer diolah 2003

Distribusi frekuensi status hunian dalam hal ini, meliputi hunian yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, sewa/kontrak < 5 tahun, dan sewa/kontrak > 5 tahun. Distribusi frekuensi status hunian yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 21 responden menyatakan huniannya berstatus hak milik, 11 responden menyatakan hak guna bangunan, 33 responden menyatakan sewa/kontrak < 5 tahun, dan 35 responden menyatakan sewa/kontrak selama > 5 tahun. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi status hunian tersebut dapat dilihat pada Tabel III.9. dan Gambar 3.7. di halaman berikutnya.

TABEL III.9.
DISTRIBUSI FREKUENSI STATUS HUNIAN RESPONDEN

		Status Hunian			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Hak Milik	21	21.0	21.0	21.0
	Hak Guna Bangunan	11	11.0	11.0	32.0
	Sewa/Kontrak	33	33.0	33.0	65.0
	< 5 Tahun	35	35.0	35.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 3.7.
DISTRIBUSI FREKUENSI STATUS HUNIAN RESPONDEN

Sumber: Data primer diolah 2003

Karakteristik responden di wilayah penelitian tersebut dapat disusun dalam Tabel III.10. di halaman berikutnya.

**TABEL III.10.
KARAKTERISTIK RESPONDEN**

No	Variabel	Jml. (Orang)	Prosentase
1	Jenis kelamin/sex		
	- Laki-laki	75	75 %
	- Perempuan	25	25 %
	JUMLAH	100	100 %
2	Umur/Usia		
	- 20 s.d. 30 tahun	27	27 %
	- 31 s.d. 40 tahun	30	30 %
	- 41 s.d. 50 tahun	28	28 %
	- > 50 tahun	15	15 %
	JUMLAH	100	100 %
3	Tingkat Pendidikan		
	- SD	38	38 %
	- SLTP	30	30 %
	- SMU	23	23 %
	- Sarjana	9	9 %
	JUMLAH	100	100 %
4	Jenis Pekerjaan		
	- PNS/ABRI	10	10 %
	- Pensiunan/Purnawirawan	8	8 %
	- Pegawai swasta	14	14 %
	- Buruh	31	31 %
	- Pedagang	27	27 %
	- Wiraswasta	6	6 %
	- Belum bekerja	4	4 %
	JUMLAH	100	100 %
5	Tingkat Pendapatan		
	- < Rp. 600.000,-	32	32 %
	- Rp. 600.000 s.d. Rp. 900.000,-	36	36 %
	- Rp. 900.000,- s.d. Rp. 1.200.000,-	19	19 %
	- > Rp. 1.200.000,-	13	13 %
	JUMLAH	100	100 %
6	Lama tinggal		
	- Kurang dari 1 tahun	37	37 %
	- 1 s.d. 4 tahun	34	34 %
	- 5 s.d. 9 tahun	8	8 %
	- 10 tahun atau lebih	21	21 %
	JUMLAH	100	100 %
7	Status hunian		
	- Hak milik	21	21 %
	- Hak guna bangunan	11	11 %
	- Sewa/kontrak 5 tahu atau lebih	33	33 %
	- Sewa/kontrak kurang dari 5 tahun	35	25 %
	JUMLAH	100	100 %

Sumber: Data primer diolah 2003

3.4. Hubungan Antar Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan hal yang bisa memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat terhadap sesuatu hal yang ada dilingkungannya. Setelah hasil analisis distribusi frekuensi kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut didapatkan, maka selanjutnya dianalisis antar kondisi sosial-ekonomi tersebut untuk mengetahui apakah masing-masing kondisi tersebut terdapat suatu hubungan. Kuat atau lemahnya hubungan ini dapat dilihat dari besarnya atau

kecilnya nilai koefisien kontingensi, yaitu suatu nilai yang menyatakan seberapa tinggi tingkat keeratan antar dua atau lebih variabel. Selain itu, koefisien kontingensi juga dapat diartikan sebagai besaran yang menggambarkan seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel. Kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal, dan status hunian.

3.4.1. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Jenis Kelamin

Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa dalam penelitian ini jenis kelamin dibedakan atas kategori laki-laki dan perempuan, dan usia dalam penelitian ini dibedakan atas kategori responden yang berumur 20-30 tahun, >30-40 tahun, >40-50 tahun, dan >50 tahun. Hasil perhitungan Crosstabs antara jenis kelamin dengan usia menunjukkan hasil chi square sebesar 6,242 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,242 serta taraf signifikansinya sebesar 0,10 (lihat Lampiran E halaman 1). Karena taraf sinifikansinya $> 0,05$, maka antara jenis kelamin dengan usia tidak terdapat hubungan yang signifikan, sehingga jenis kelamin tertentu tidaklah harus berusia tertentu pula.

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini dibedakan atas kategori SD, SLTP, SMU dan Sarjana. Hasil perhitungan Crosstabs antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan menunjukkan hasil chi square sebesar 2,604 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,159 serta taraf signifikansinya sebesar 0,457 (lihat Lampiran E halaman 2). Karena taraf sinifikansinya $> 0,05$ maka antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan tidak terdapat hubungan yang signifikan, sehingga jenis kelamin tertentu tidaklah harus mempunyai tingkat pendidikan tertentu pula.

Jenis pekerjaan dalam penelitian ini dibedakan atas responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI, pensiunan, swasta, buruh, pedagang wiraswasta dan belum bekerja. Hasil perhitungan Crosstabs antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan menunjukkan hasil chi

square sebesar 5,851 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,235 serta taraf signifikansinya sebesar 0,440 (lihat Lampiran E halaman 3). Karena taraf sinifikansinya $> 0,05$ maka antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan tidak terdapat hubungan yang signifikan, sehingga jenis kelamin tertentu tidaklah harus mempunyai jenis pekerjaan tertentu pula.

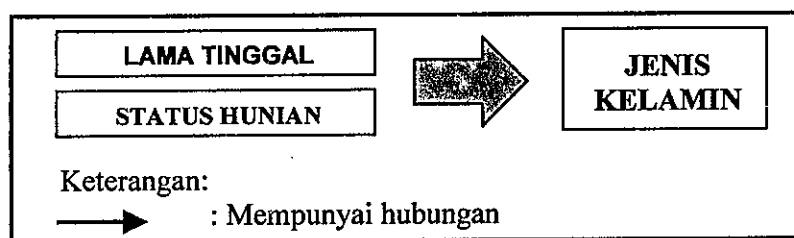
Tingkat pendapatan dalam penelitian ini terdiri atas kategori $< \text{Rp. } 600.000$, $\text{Rp. } 600.000- < \text{Rp. } 900.000,-$, $\text{Rp. } 900.000,- \text{--Rp. } 1.200.000,-$ dan $\text{Rp. } > 1.200.000,-$. Hasil perhitungan Crosstabs antara jenis kelamin dengan tingkat pendapatan menunjukkan hasil chi square sebesar 3,96 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,941 serta taraf signifikansinya sebesar 0,941 (lihat Lampiran E halaman 4). Karena taraf sinifikansinya $> 0,05$ maka antara jenis kelamin dengan tingkat pendapatan tidak terdapat hubungan yang signifikan, sehingga jenis kelamin tertentu tidaklah harus mempunyai tingkat pendapatan tertentu pula.

Lama tinggal dalam penelitian ini terdiri atas kategori < 1 tahun, $1-5$ tahun, $> 5-9$ tahun dan > 10 tahun. Hasil perhitungan Crosstabs antara jenis kelamin dengan lama tinggal menunjukkan hasil chi square sebesar 9,353 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,292 serta taraf signifikansinya sebesar 0,025 (lihat Lampiran E halaman 5). Karena taraf sinifikansinya $< 0,05$ maka antara jenis kelamin dengan lama tinggal terdapat hubungan yang signifikan, dimana jenis kelamin perempuan dari 25 responden, 10 responden berada pada kelompok yang telah tinggal selama > 10 tahun dan laki-laki sebagian besar berada pada kelompok yang telah tinggal < 1 tahun yaitu 32 responden dari jumlah 75 responden.

Status hunian dalam penelitian ini terdiri atas kategori hak milik, hak guna bangunan, sewa kontrak ≤ 5 tahun dan sewa kontrak > 5 tahun. Hasil perhitungan Crosstabs antara jenis kelamin dengan status hunian menunjukkan hasil chi square sebesar 9,347 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,292 serta taraf signifikansinya sebesar 0,025

(lihat Lampiran E halaman 6). Karena taraf sinifikansinya $< 0,05$ maka antara jenis kelamin dengan status hunian terdapat hubungan yang signifikan, dimana jenis kelamin perempuan dari 25 responden, 10 responden berada pada kelompok yang mempunyai status hunian dalam status hak guna bangunan dan laki-laki sebagian besar berada pada kelompok sewa kontrak > 5 tahun yaitu 35 responden dari jumlah 75 responden.

Kondisi sosial-ekonomi yang mempunyai hubungan dengan jenis kelamin tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 3.8. di bawah ini.



GAMBAR 3.8.
HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT
DENGAN JENIS KELAMIN

Sumber: Data primer diolah 2003

3.4.2. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Usia

Di atas telah diuraikan bahwa dalam penelitian ini usia dibedakan atas kategori responden yang berumur 20-30 tahun, $>30-40$ tahun, $>40-50$ tahun, dan >50 tahun, dan tingkat pendidikan dibedakan atas kategori SD, SLTP, SMU dan Sarjana. Hasil perhitungan Crosstabs antara usia dengan tingkat pendidikan menunjukkan hasil chi square sebesar 15,853 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,370 serta taraf signifikansinya sebesar 0,70 (lihat Lampiran E halaman 8). Karena taraf sinifikansinya $> 0,05$, maka antara usia dengan tingkat pendidikan tidak terdapat hubungan yang signifikan, sehingga usia tertentu tidaklah harus berpendidikan tertentu pula.

Jenis pekerjaan dalam penelitian ini dibedakan atas responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI, pensiunan, swasta, buruh, pedagang wiraswasta dan belum bekerja. Hasil

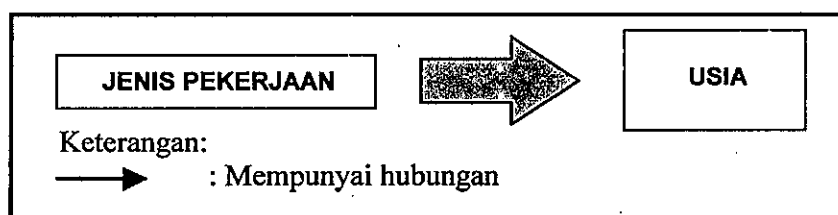
perhitungan Crosstabs antara usia dengan jenis pekerjaan menunjukkan hasil chi square sebesar 68,180 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,637 serta taraf signifikansinya sebesar 0,000 (lihat Lampiran E halaman 9). Karena taraf sinifikansinya $< 0,05$ maka antara usia dengan jenis pekerjaan terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari 100 responden, sebgaaian besar responden yang berusia 20-30 tahun mempunyai pekerjaan sebagai buruh yaitu 8 dari 27 responden, sebgaaian besar responden yang berusia $>30-40$ tahun mempunyai pekerjaan sebagai buruh dan pedagang yaitu masing-masing 10 dari 30 responden, sebgaaian besar responden yang berusia $> 40-50$ tahun mempunyai pekerjaan sebagai buruh yaitu 11 dari 28 responden, dan sebgaaian besar responden yang berusia > 50 tahun sebagai pensiunan PNS/ABRI yaitu 8 dari 15 responden.

Tingkat pendapatan dalam penelitian ini terdiri atas kategori $< \text{Rp. } 600.000/\text{bulan}$, $\text{Rp. } 600.000- < \text{Rp. } 900.000,-/\text{bulan}$, $\text{Rp. } 900.000,- - \text{Rp. } 1.200.000,-$ dan $\text{Rp. } > 1.200.000,-$. Hasil perhitungan Crosstabs antara usia dengan tingkat pendapatan menunjukkan hasil chi square sebesar 15,215 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,363 serta taraf signifikansinya sebesar 0,085 (lihat Lampiran E halaman 10). Karena taraf sinifikansinya $> 0,05$ maka antara usia dengan tingkat pendapatan tidak terdapat hubungan yang signifikan, sehingga usia tertentu tidaklah harus mempunyai tingkat pendapatan tertentu pula.

Lama tinggal dalam penelitian ini terdiri atas kategori < 1 tahun, 1-5 tahun, $> 5-9$ tahun dan > 10 tahun. Hasil perhitungan Crosstabs antara usia dengan lama tinggal menunjukkan hasil chi square sebesar 13,940 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,350 serta taraf signifikansinya sebesar 0,124 (lihat Lampiran E halaman 11). Karena taraf sinifikansinya $> 0,05$ maka antara usia dengan lama tinggal seseorang tidak terdapat hubungan yang signifikan, sehingga usia tertentu tidaklah harus mempunyai waktu lama tinggal tertentu pula.

Status hunian dalam penelitian ini terdiri atas kategori hak milik, hak guna bangunan, sewa kontrak ≤ 5 tahun dan sewa kontrak > 5 tahun. Hasil perhitungan Crosstabs antara usia dengan status hunian menunjukkan hasil chi square sebesar 13,068 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,340 serta taraf signifikansinya sebesar 0,160 (lihat Lampiran E halaman 12). Karena taraf sinifikansinya $> 0,05$ maka antara usia dengan status hunian seseorang tidak terdapat hubungan yang signifikan, sehingga usia tertentu tidaklah harus mempunyai status hunian tertentu pula.

Kondisi sosial-ekonomi yang mempunyai hubungan dengan usia tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 3.9. di bawah ini.



GAMBAR 3.9.
HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT
DENGAN USIA

Sumber: Data primer diolah 2003

3.4.3. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Tingkat Pendidikan

Di atas telah diuraikan bahwa dalam penelitian ini tingkat pendidikan dibedakan atas kategori responden yang berpendidikan SD, SLTP, SMU dan Sarjana, dan jenis pekerjaan dibedakan atas responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI, pensiunan, swasta, buruh, pedagang wiraswasta dan belum bekerja. Hasil perhitungan Crosstabs antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan menunjukkan hasil chi square sebesar 53,665 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,591 serta taraf signifikansinya sebesar 0,00 (lihat Lampiran E halaman 15). Karena taraf sinifikansinya $< 0,05$ maka antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari 100

responden, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SD mempunyai pekerjaan sebagai buruh yaitu 22 dari 38 responden, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SLTP mempunyai pekerjaan sebagai pedagang yaitu 8 dari 30, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SMU mempunyai pekerjaan sebagai PNS/ABRI dan Swasta yaitu masing-masing 5 dari 23 responden, dan sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya sarjana mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta dan pedagang yaitu masing-masing 3 dari 9 responden.

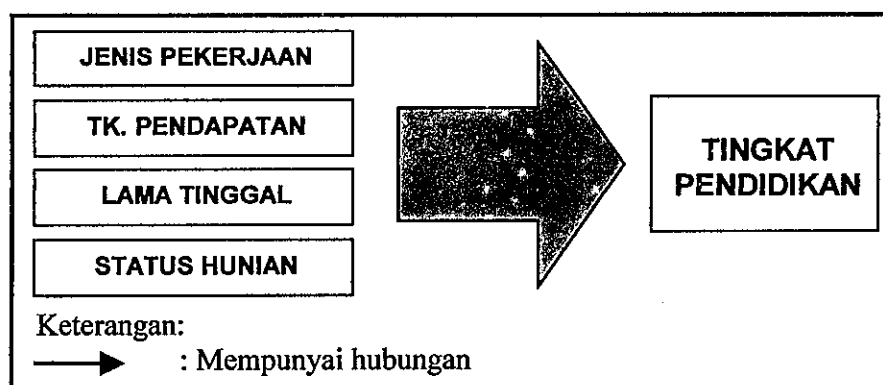
Tingkat pendapatan dalam penelitian ini terdiri atas kategori < Rp. 600.000, Rp. 600.000-< Rp. 900.000,-, Rp. 900.000,-<Rp. 1.200.000,- dan Rp. > 1.200.000,-. Hasil perhitungan Crosstabs antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan menunjukkan hasil chi square sebesar 140,220 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,764 serta taraf signifikansinya sebesar 0,00 (lihat Lampiran E halaman 16). Karena taraf sinifikansinya < 0,05 maka antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari 100 responden, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SD mempunyai pendapatan < Rp. 600.000,- yaitu 29 dari 38 responden, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SLTP mempunyai tingkat pendapatan Rp. 600.000-< Rp. 900.000,- yaitu 28 dari 30 responden, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SMU mempunyai tingkat pendapatan Rp. 900.000,-< Rp. 1.200.000,- yaitu 14 dari 23 responden, dan sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya sarjana mempunyai pendapatan > 1.200.000,- yaitu 5 dari 9 responden.

Lama tinggal dalam penelitian ini terdiri atas kategori < 1 tahun, 1-5 tahun, > 5-9 tahun dan > 10 tahun. Hasil perhitungan Crosstabs antara tingkat pendidikan dengan lama tinggal menunjukkan hasil chi square sebesar 32,626 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,496 serta taraf signifikansinya sebesar 0,00 (lihat Lampiran E halaman 17). Karena taraf

sinifikansinya $< 0,05$ maka antara tingkat pendidikan dengan lama tinggal terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari 100 responden, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SD lama tinggalnya < 1 tahun yaitu 21 dari 38 responden, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SLTP lama tinggalnya $1- < 5$ tahun yaitu 12 dari 30, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SMU lama tinggalnya telah > 10 tahun yaitu 8 dari 23 responden, dan sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya sarjana lama tinggalnya $5-9$ tahun dan > 10 tahun yaitu masing-masing 3 dari 9 responden.

Status hunian dalam penelitian ini terdiri atas kategori hak milik, hak guna bangunan, sewa kontrak ≤ 5 tahun dan sewa kontrak > 5 tahun. Hasil perhitungan Crosstabs antara tingkat pendidikan dengan status hunian menunjukkan hasil chi square sebesar 45,653 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,560 serta taraf signifikansinya sebesar 0,000 (lihat Lampiran E halaman 18). Karena taraf sinifikansinya $< 0,05$ maka antara tingkat pendidikan dengan status hunian terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari 100 responden, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SD huniannya berstatus sewa kontrak > 5 tahun yaitu 27 dari 38 responden, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SLTP status huniannya adalah sewa kontrak $1-5$ tahun yaitu 13 dari 30, sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya SMU status huniannya adalah sewa kontrak $1-5$ tahun yaitu 10 dari 23 responden, dan sebagian besar responden yang tingkat pendidikannya sarjana status huniannya adalah hak guna bangunan, sewa kontrak $1-5$ tahun dan sewa kontrak > 5 tahun yaitu masing-masing 3 dari 9 responden.

Kondisi sosial-ekonomi yang mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 3.10. di halaman berikutnya.



GAMBAR 3.10.
HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT
DENGAN TINGKAT PENDIDIKAN

Sumber: Data primer diolah 2003

3.4.4. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Jenis Pekerjaan

Di atas telah diuraikan bahwa dalam penelitian ini jenis pekerjaan dibedakan atas responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI, pensiunan, swasta, buruh, pedagang wiraswasta dan belum bekerja, dan tingkat pendapatan dalam penelitian ini terdiri atas kategori responden yang mempunyai pendapatan < Rp. 600.000/bulan, Rp. 600.000-< Rp. 900.000,-/bulan, Rp. 900.000,-<Rp. 1.200.000,-/bulan dan Rp. > 1.200.000,-/bulan. Hasil perhitungan Crosstabs antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendapatan menunjukkan hasil chi square sebesar 52,076 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,585 serta taraf signifikansinya sebesar 0,00 (lihat Lampiran E halaman 20). Karena taraf sinifikansinya < 0,05 maka antara jenis pekerjaan dengan tingkat pendapatan terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari 100 responden, sebagaian besar responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI mempunyai pendapatan Rp. 600.000-< Rp. 900.000,-/bulan yaitu 4 dari 10 responden, sebagaian besar responden yang merupakan pensiunan mempunyai tingkat pendapatan Rp. 600.000-< Rp. 900.000,-/bulan yaitu 4 dari 8 responden, dan sebagaian besar responden yang bekerja sebagai pegawai swasta mempunyai pendapatan Rp. 600.000-< Rp. 900.000,-/bulan yaitu 5 dari 14 responden, sebagaian besar responden yang

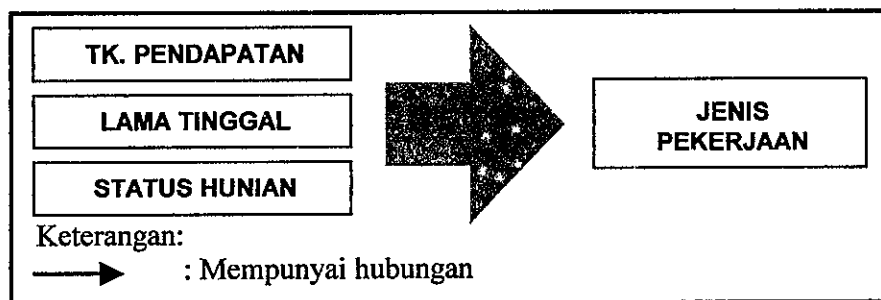
bekerja sebagai buruh mempunyai pendapatan < Rp. 600.000,-/bulan yaitu 16 dari 31 responden, sebagian besar responden yang bekerja sebagai pedagang mempunyai tingkat pendapatan Rp. 600.000-< Rp. 900.000,-/bulan yaitu 11 dari 27 responden, dan sebagian besar responden yang berwiraswasta mempunyai pendapatan Rp. 900.000,-Rp. 1.200.000,-/bulan yaitu 5 dari 6 responden dan sebagian besar responden yang belum bekerja mempunyai pendapatan < Rp. 600.000,-/bulan yaitu 4 dari 4 responden.

Lama tinggal dalam penelitian ini terdiri atas kategori < 1 tahun, 1-5 tahun, > 5-9 tahun dan > 10 tahun. Hasil perhitungan Crosstabs antara jenis pekerjaan dengan lama tinggal menunjukkan hasil chi square sebesar 83,525 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,675 serta taraf signifikansinya sebesar 0,00 (lihat Lampiran E halaman 21). Karena taraf sinifikansinya < 0,05 maka antara jenis pekerjaan dengan lama tinggal terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari 100 responden, sebagian besar responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI mempunyai lama tinggal 1-< 5 tahun dan 5-9 tahun yaitu masing-masing 3 dari 10 responden, sebagian besar responden yang merupakan pensiunan mempunyai lama tinggalnya > 10 tahun yaitu 8 dari 8, sebagian besar responden yang bekerja sebagai pegawai swasta mempunyai lama tinggal < 1 tahun dan 1-<5 tahun yaitu masing-masing 5 dari 14 responden, sebagian besar responden yang mempunyai pekerjaan sebagai buruh mempunyai lama tinggal 1-<5 tahun yaitu 15 dari 31, sebagian besar responden yang bekerja sebagai pedagang mempunyai lama tinggal < 1 tahun yaitu 13 dari 27 responden, sebagian besar responden yang berwiraswasta mempunyai lama tinggal 5-9 tahun yaitu 4 dari 6 responden, dan sebagian besar responden yang belum bekerja mempunyai lama tinggalnya < 1 tahun yaitu 3 dari 4 responden.

Status hunian dalam penelitian ini terdiri atas kategori hak milik, hak guna bangunan, sewa kontrak \leq 5 tahun dan sewa kontrak > 5 tahun. Hasil perhitungan

Crosstabs antara jenis pekerjaan dengan status hunian menunjukkan hasil chi square sebesar 72,548 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,648 serta taraf signifikansinya sebesar 0,000 (lihat Lampiran E halaman 23). Karena taraf sinifikansinya $< 0,05$ maka terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan status hunian terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari jumlah 100 responden, sebaaian besar responden yang bekerja sebagai PNS/ABRI mempunyai hunian berstatus hak guna bangunan dan sewa kontrak selama 1-< 5 tahun yaitu masing-masing 3 dari 10 responden, sebaaian besar responden yang merupakan pensiunan mempunyai hunian berstatus hak milik yaitu 8 dari 8, sebaaian besar responden yang bekerja sebagai pegawai swasta mempunyai hunian berstatus sewa/kontrak 1-<5 tahun yaitu 6 dari 14 responden, sebaaian besar responden yang mempunyai pekerjaan sebagai buruh mempunyai status hunian berupa buruh mempunyai hunian berstatus selama sewa/kontrak >-9 tahun yaitu 17 dari 31, sebaaian besar responden yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang mempunyai status hunian berupa sewa/kontrak selama sewa/kontrak 1-<5 tahun yaitu 14 dari 27, sebaaian besar responden yang bekerja sebagai pedagang mempunyai status huian berupa sewa/kontrak 1-< tahun yaitu 13 dari 27 responden, sebaaian besar responden yang berwiraswasta mempunyai lama tinggal 5-9 tahun yaitu 4 dari 6 responden,dan sebaaian besar responden yang belum bekerja mempunyai lama tinggalnya < 1 tahun yaitu 3 dari 4 responden.

Kondisi sosial-ekonomi yang mempunyai hubungan dengan jenis pekerjaan tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 3.11. di halaman berikutnya.



GAMBAR 3.11.
HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT
DENGAN JENIS PEKERJAAN

Sumber: Data primer diolah 2003

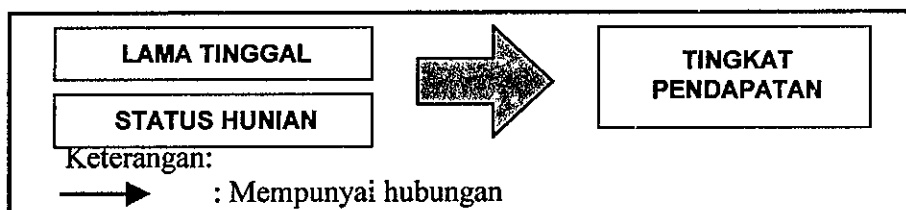
3.4.5. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Tingkat Pendapatan

Di atas telah diuraikan bahwa dalam penelitian ini tingkat pendapatan dibedakan atas responden yang mempunyai pendapatan < Rp. 600.000/bulan, Rp. 600.000-< Rp. 900.000,-/bulan, Rp. 900.000,-Rp. 1.200.000,-/bulan dan Rp. > 1.200.000,-/bulan, dan lama tinggal atas kategori < 1 tahun, 1-5 tahun, > 5-9 tahun dan > 10 tahun.. Hasil perhitungan Crosstabs antara tingkat pendapatan dengan lama tinggal menunjukkan hasil chi square sebesar 34,909 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,509 serta taraf signifikansinya sebesar 0,00 (lihat Lampiran E halaman 26). Karena taraf sinifikansinya < 0,05 maka antara tingkat pendapatan dengan lama tinggal terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari 100 responden, sebgaiian besar responden yang mempunyai pendapatan < Rp. 600.000,-/bulan bertempat tinggal < 1 tahun yaitu 19 dari 32 responden, sebgaiian besar responden yang mempunyai pendapatan Rp. 600.000-< Rp. 900.000,-/bulan bertempat tinggal 1-<5 tahun yaitu 18 dari 36 responden, sebgaiian besar responden yang mempunyai tingkat pendapatan Rp. 900.000,-< Rp. 1.200.000,-/bulan yaitu 4 dari 8 responden, sebgaiian besar responden yang mempunyai pendapatan Rp. 900.000,-Rp. 1.200.000,-/bulan bertempat tinggal 5-9 tahun yaitu 6 dari 19 responden, dan sebgaiian

besar responden yang mempunyai pendapatan > 1.200.000,-/bulan bertempat tinggal > 10 tahun yaitu 6 dari 13 responden.

Status hunian dalam penelitian ini terdiri atas kategori hak milik, hak guna bangunan, sewa kontrak \leq 5 tahun dan sewa kontrak > 5 tahun. Hasil perhitungan Crosstabs antara tingkat pendapatan dengan status hunian menunjukkan hasil chi square sebesar 63,779 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,624 serta taraf signifikansinya sebesar 0,000 (lihat Lampiran E halaman 27). Karena taraf sinifikansinya < 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan status, dimana dari jumlah 100 responden yang mempunyai pendapatan sebanyak < 600.000.-/bulan, sebagian besar status hunian dari responden merupakan sewa kontrak > 5 tahun yaitu 26 dari 32 responden, sebagian besar responden yang mempunyai pendapatan Rp. 600.000,-/bulan-< Rp. 900.000,-/bulan, status huniannya merupakan sewa kontrak < 5 tahun yaitu 19 dari 36 responden, sebagian besar responden yang mempunyai pendapatan Rp. 900.000,-/bula< Rp. 1.200.000,-/bulan, status huniannya merupakan sewa kontrak selama 1-< 5 tahun yaitu 8 dari 19 responden, dan sebagian besar responden yang mempunyai pendapatan > Rp. 1.200.000,-/bulan. Status huniannya berupa hak milik dan sewa kontrak selama 1-< 5 tahun yaitu masing-masing 6 dari 13 responden.

Kondisi sosial-ekonomi yang mempunyai hubungan dengan tingkat pendapatan tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 3.12. di bawah ini.



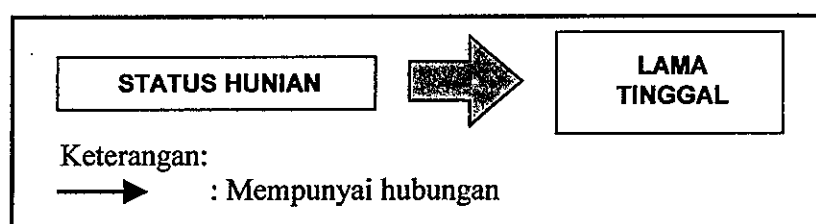
GAMBAR 3.12.
HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT
DENGAN TINGKAT PENDAPATAN

Sumber: Data primer diolah 2003

3.4.6. Hubungan Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat dengan Lama Tinggal

Di atas telah diuraikan bahwa dalam penelitian ini lama tinggal dibedakan atas responden yang mempunyai lama tinggal atas kategori < 1 tahun, 1-5 tahun, > 5-9 tahun dan > 10 tahun dan status hunian atas kategori hak milik, hak guna bangunan, sewa kontrak \leq 5 tahun dan sewa kontrak > 5 tahun.. Hasil perhitungan Crosstabs antara lama tinggal dengan status hunian menunjukkan hasil chi square sebesar 172.382 dan koefisien kotingensinya sebesar 0,796 serta taraf signifikansinya sebesar 0,00 (lihat Lampiran E halaman 29). Karena taraf sinifikansinya < 0,05, maka antara lama tinggal dengan status hunian terdapat hubungan yang signifikan, dimana dari 100 responden, sebgaaian besar responden yang telah bertempat tinggal < 1 tahun, huniannya berstatus sewa kontrak > 5 tahun yaitu sebanyak 21 dari 37 responden; sebgaaian besar responden yang telah bertempat tinggal 1-<5 tahun, huniannya berstatus sewa kontrak < 5 tahun yaitu 17 dari 34 responden; sebgaaian besar responden yang telah tinggal sebanyak 5-9 tahun, huniannya berstatus hak guna bangunan yaitu 8 dari 8 responden; dan sebgaaian besar responden yang bertempat tinggal > 10 tahun huniannya berstatus hak milik yaitu 21 dari 21 responden.

Kondisi sosial-ekonomi yang mempunyai hubungan dengan status hunian tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 3.13. di bawah ini.



GAMBAR 3.13.
HUBUNGAN KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT
DENGAN LAMA TINGGAL

Sumber: Data primer diolah 2003

3.5. Bangunan Pengolah Limbah Cair Manusia

Perkembangan kota Malang yang pesat, maka urbanisasipun terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan tempat pemukiman meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas untuk mendapatkan perumahan yang layak huni sehingga timbul pemukiman liar (*squatter*) di daerah perdagangan, jalur hijau, rel kereta api dan pinggiran sungai yang dianggap tak bertuan. Tumbuhnya tempat pemukiman liar tersebut pada akhirnya menimbulkan kekumuhan dan degradasi lingkunganpun mulai terjadi dengan segala dampaknya. Salah satu dampak yang dirasakan adalah penurunan kualitas lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Malang telah membangun berbagai prasarana guna meningkatkan kualitas lingkungan. Pembangunan tersebut antara lain pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan prasarana Pengolah Limbah Cair Manusia. Peningkatan kualitas lingkungan melalui Pembangunan Pengolah Limbah Cair Manusia inilah yang menjadi fokus dalam penelitian saat ini. Pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang merupakan penjabaran dari Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) dan telah memenuhi beberapa kriteria, antara lain kepadatan penduduk, lokasi (letak geografis) dan manfaat.

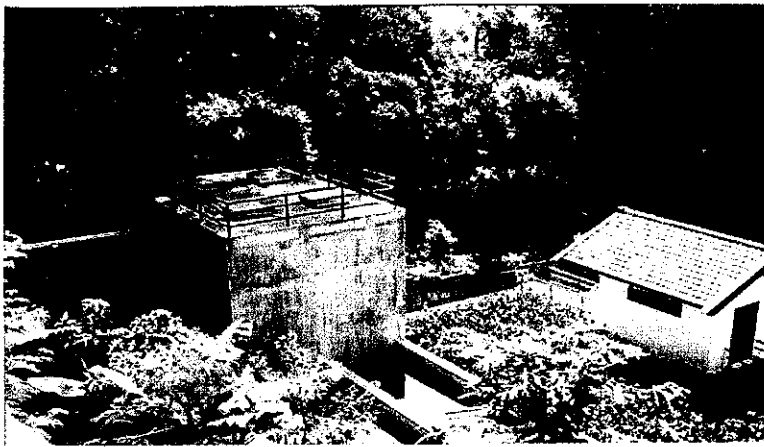
Seperti diuraikan pada bab I, dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan maka Pemerintah Kota Malang telah membangun beberapa prasarana Pengolah Limbah Cair Manusia sebagai pengembangan *Pilot Proyek* yang ada di Kelurahan Tlogomas. (lihat gambar 3.14-17. dihalaman 85 dan 86). Pembangunan prasarana tersebut di atas, berada di wilayah Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing dan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang. Pembangunan di wilayah Kelurahan Mergosono inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. (lihat gambar 3.18-21. di halaman 87-88).



Gambar 3.14.
Gerbang menuju proyek percontohan Pengolah Limbah Cair Manusia di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tahun 2003.



Gambar 3.15
Proyek Percontohan Pengolah Limbah Cair Manusia di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tahun 2003.



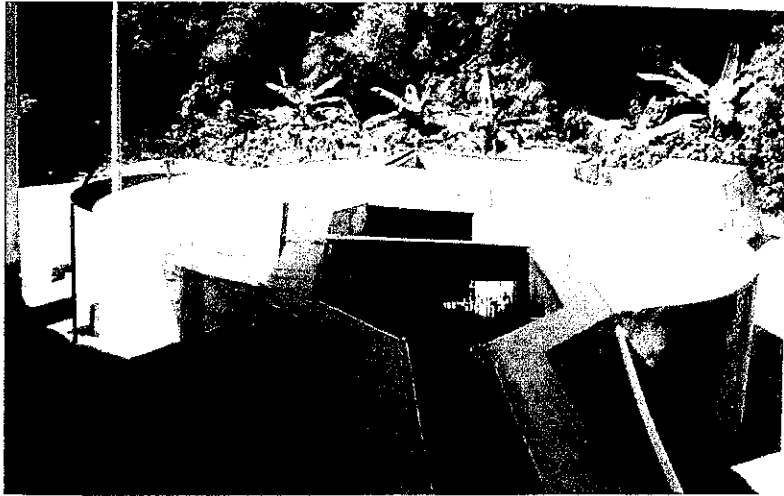
Gambar 3.16.

Tangki penampung limbah pada Proyek Percontohan Pengolah Limbah Cair Manusia di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tahun 2003.



Gambar 3.17.

Proyek Percontohan Pengolah Limbah Cair Manusia di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang asri, tahun 2003.



Gambar 3.18.

Proyek pengembangan Pengolah Limbah Cair Manusia dengan sistem Up Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) di Kelurahan Mergosono Kota Malang, tahun 2003.



Gambar 3.19.

Tangki penampung limbah pada Proyek Pengembangan Pengolah Limbah Cair Manusia dengan sistem UASB di Kelurahan Mergosono Kota Malang, tahun 2003.



Gambar 3.20.
Kolam Penjernih Limbah pada sistem UASB di Kelurahan Mergosono Kota Malang,
tahun 2003.



Gambar 3.21.
Air limbah yang telah diolah dan dibuang di sungai Brantas sangat jernih dan terbebas dari
BOD serta Bakteri E-coli, tahun 2003.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PENGOLAH LIMBAH CAIR MANUSIA DI KELURAHAN MERGOSONO KOTA MALANG

Bab ini merupakan terdiri dari uraian analisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi mempengaruhinya pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

4.1. Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi merupakan kontribusi nyata dari partisipasi masyarakat yang berupa konsultasi, sumbangan uang dan barang, sumbangan dalam bentuk kerja dan lain sebagainya. Sementara itu tingkat partisipasi merupakan kontribusi dari masyarakat yang berupa tingkat kehadiran, keaktifan dalam berdiskusi dan memberikan usulan, tingkat keterlibatan masyarakat dan lain sebagainya.

Bentuk dan tingkat partisipasi yang dianalisis ini terdiri dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan tahap pasca konstruksi.

4.1.1. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Variabel bentuk partisipasi yang dianalisis, baik pada tahap pra konstruksi, konstruksi maupun tahap pasca konstruksi, semua terdiri dari indikator bentuk sumbangan dan indikator bentuk kegiatan

4.1.1.1. Bentuk Sumbangan Masyarakat Pada Tahap Pra Konstruksi, Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi

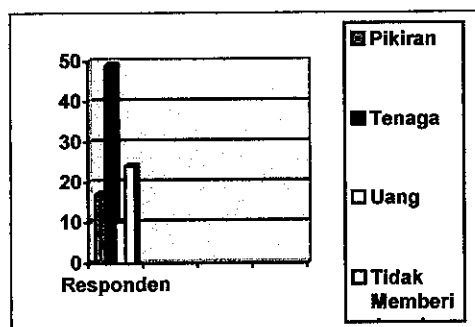
Bentuk sumbangan pada tahap pra konstruksi meliputi aspek sumbangan dalam bentuk pikiran, tenaga dan uang/material. Distribusi frekuensi aspek bentuk sumbangan yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 17 responden menyumbang dalam bentuk pikiran, 49 responden memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, 10 responden memberikan sumbangan dalam bentuk uang/material, dan 24 responden tidak memberikan jawaban. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi bentuk sumbangan pada tahap pra konstruksi, dapat dilihat pada tabel IV.1. dan gambar 4.1. di bawah ini.

TABEL IV.1.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK SUMBANGAN
PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

Bentuk Sumbangan PK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pikiran	17	17.0	17.0	17.0
Tenaga	49	49.0	49.0	66.0
Uang	10	10.0	10.0	76.0
Tidak Memberi Jawaban	24	24.0	24.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.1.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK SUMBANGAN
PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

Bentuk sumbangan pada tahap konstruksi meliputi aspek sumbangan dalam bentuk pikiran, tenaga dan uang/material. Distribusi frekuensi aspek bentuk sumbangan yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 3 responden memberikan sumbangan dalam

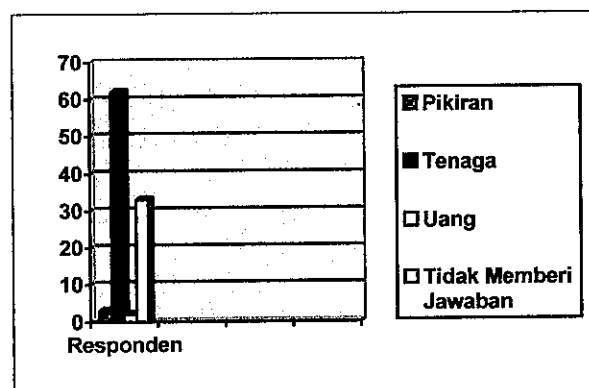
bentuk pikiran, 62 responden memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, 2 responden memberikan sumbangan dalam bentuk uang/material dan 33 responden tidak memberikan jawaban. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi bentuk sumbangan pada tahap konstruksi, dapat dilihat pada Tabel IV.2. dan Gambar 4.2. di bawah ini.

TABEL IV.2.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK SUMBANGAN
PADA TAHAP KONSTRUKSI

Bentuk Sumbangan K

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pikiran	3	3.0	3.0	3.0
Tenaga	62	62.0	62.0	65.0
Uang	2	2.0	2.0	67.0
Tidak memberi	33	33.0	33.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.2.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK SUMBANGAN
PADA TAHAP KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

Bentuk sumbangan pada tahap pasca konstruksi meliputi aspek sumbangan dalam bentuk pikiran, tenaga dan uang/material. Distribusi frekuensi aspek bentuk sumbangan yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 2 responden memberikan sumbangan dalam bentuk pikiran, 32 responden memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga, 34 responden memberikan sumbangan dalam bentuk uang/material dan 32 responden tidak memberikan jawaban. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi bentuk

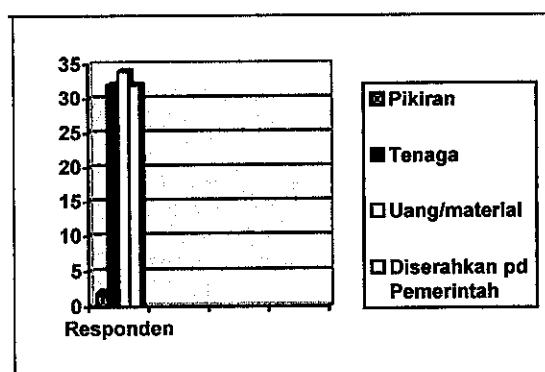
sumbangan pada tahap pasca konstruksi, dapat dilihat pada Tabel IV.3. dan Gambar 4.3. di bawah ini.

TABEL IV.3.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK SUMBANGAN
PADA TAHAP PASCA KONSTRUKSI

Bentuk Sumbangan PCK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pikiran	2	2,0	2,0	2,0
Tenaga	32	32,0	32,0	34,0
Uang/Material	34	34,0	34,0	68,0
Diserahkan Pd Pemer.	32	32,0	32,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.3.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK SUMBANGAN
PADA TAHAP PASCA KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

4.1.1.2. Bentuk Kegiatan Masyarakat Pada Tahap Pra Konstruksi, Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi

Bentuk kegiatan pada tahap pra konstruksi adalah untuk menggambar model/bentuk dan lokasi bangunan pengolah limbah yang meliputi menggambar dengan cara sendiri-sendiri, menggambar bersama warga, menyerahkan pada konsultan, dan tidak memilih ketiganya. Adapun distribusi frekuensi yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 4 responden menyatakan dengan menggambar sendiri, 22 responden menyatakan menggambar bersama warga, 35 responden menyatakan menyerahkan pada konsultan, dan 39 responden menyatakan menyerahkan pada pemerintah.

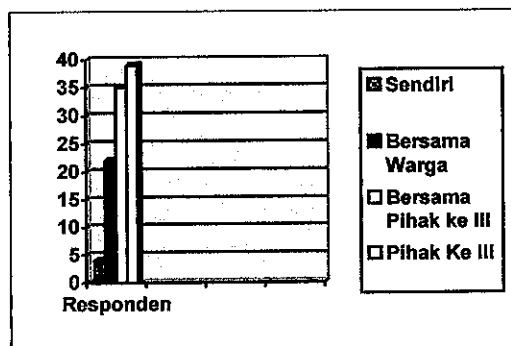
cukup diserahkan kepada konsultan, dan 39 responden menjawab tidak ketiga-tiganya. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi bentuk kegiatan responden dalam pada tahap pra konstruksi, dapat dilihat pada Tabel IV.4. di bawah ini dan Gambar 4.4. di halaman berikutnya.

TABEL IV.4.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK KEGIATAN
PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

Gambar Model Lokasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sendiri-sendiri	4	4,0	4,0	4,0
Bersama Warga	22	22,0	22,0	26,0
Bersama Pihak III	35	35,0	35,0	61,0
Pihak III	39	39,0	39,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.4.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK KEGIATAN
PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

Bentuk kegiatan pada tahap konstruksi adalah untuk cara pembangunan WC/kamar mandi yang meliputi membangun dengan cara sendiri-sendiri, membangun bersama warga secara bergantian, membangun secara kerja sama dengan pihak ketiga, dan keseluruhannya diserahkan pada pihak ketiga. Adapun distribusi frekuensi yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 22 responden menyatakan dengan cara membangun sendiri, 28 responden responden menyatakan membangun bersama warga secara

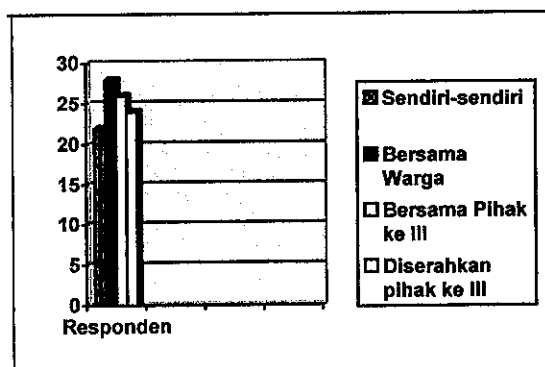
bergantian, 26 responden menyatakan perlu bekerja sama dengan pihak ketiga, dan 24 responden menyatakan diserahkan keseluruhan pada pihak ketiga. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi bentuk kegiatan pada tahap konstruksi, dapat dilihat pada Tabel IV.5. dan Gambar 4.5. di bawah ini.

TABEL IV.5.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK KEGIATAN
PADA TAHAP KONSTRUKSI

Cara Pembangunan WC

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sendiri-sendiri	22	22,0	22,0	22,0
Bersama Warga	28	28,0	28,0	50,0
Bersama Pihak III	26	26,0	26,0	76,0
Diserahkan Pihak III	24	24,0	24,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.5.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK KEGIATAN
PADA TAHAP KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

Bentuk kegiatan pada tahap pasca konstruksi adalah cara untuk kerja bakti yang meliputi kerja bakti dengan cara sendiri-sendiri dan berkelompok, kerja bakti masal, membayar iuran dan mengupah orang, dan keseluruhannya diserahkan pada pemerintah. Adapun distribusi frekuensi yang diperoleh dari jumlah 100 responden, adalah 24 responden menyatakan untuk bekerja bakti dengan cara sendiri-sendiri dan berkelompok, 39 responden menyatakan dengan cara kerja bakti masal, 22 responden

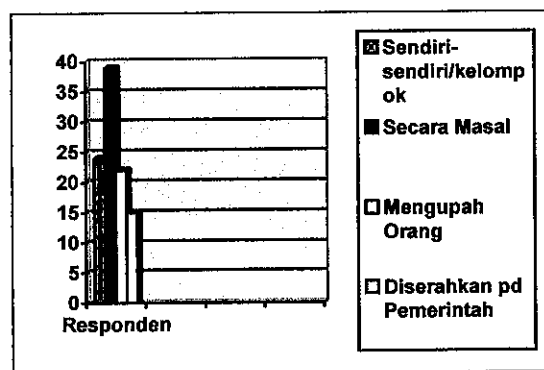
menyatakan perlu iuran dan mengupah seseorang, dan 15 responden menyatakan diserahkan saja pada pihak pemerintah. Untuk lebih jelasnya, perhitungan distribusi frekuensi kegiatan pada tahap pasca konstruksi, dapat dilihat pada Tabel IV.6. dan Gambar 4.6. di bawah ini.

TABEL IV.6.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK KEGIATAN
PADA TAHAP PASCA KONSTRUKSI

Kerjabaktl

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sendiri-sendiri/Kelompok	24	24,0	24,0	24,0
Secara Massal	39	39,0	39,0	63,0
Mengupah Orang Lain	22	22,0	22,0	85,0
Diserahkan Pd Pemer.	15	15,0	15,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.6.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK KEGIATAN
PADA TAHAP PASCA KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

Untuk lebih jelasnya, distribusi frekuensi bentuk partisipasi masyarakat pada tiap-tiap tahapan dapat dilihat pada Tabel IV.7. di halaman berikutnya.

TABEL IV.7.
DISTRIBUSI FREKUENSI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
TAHAP PRA KONSTRUKSI, KONSTRUKSI DAN TAHAP PASCA KONSTRUKSI

NO	VARIABEL	INDIKATOR	TAHAP PEMBANGUNAN	BENTUK PARTISIPASI	ASPEK PENILAIAN	DIS FREK	(%)
	Partisipasi Masyarakat	Bentuk Partisipasi Masyarakat	Pra Konstruksi	Bentuk Sumbangan	Pikiran	17	17 %
Tenaga					49	49 %	
Uang					10	10 %	
Tdk Menjawab					24	24 %	
Bentuk Kegiatan				Menggambar sendiri	4	4 %	
				Menggambar bersama warga Menyerahkan pada Konsultan Tidak memilih ketiganya	22 35 39	22 % 35 % 39 %	
Konstruksi			Bentuk Sumbangan	Pikiran	3	3 %	
				Tenaga	62	62 %	
				Uang	2	2 %	
				Tdk Menjawab	33	33 %	
			Bentuk Kegiatan	Membangun sendiri	22	22 %	
				Membangun bersama warga secara bergantian Membangun bersama pihak ketiga Seluruhnya diserahkan pada pihak ketiga	28 26 24	28 % 26 % 24 %	
Pasca Konstruksi	Bentuk Sumbangan	Pikiran	2	2 %			
		Tenaga	32	32 %			
		Uang/material	34	34 %			
		Tidak menyumbang karena urusan pemerintah	32	32 %			
Bentuk Kegiatan	Kerja bakti Sendiri- sendiri dan berkelompok	24	24 %				
	Keja bakti masal	39	39 %				
	Menarik Iuran dan mengupah orang Menyerahkan pada pemerintah	22 15	22 % 15 %				

Sumber: Data primer diolah 2003

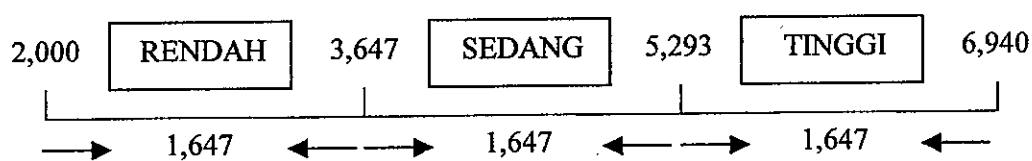
4.1.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi yang dianalisis dalam hal ini juga terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra konstruksi, konstruksi dan tahap pasca konstruksi.

Untuk menganalisa tingkat partisipasi, jawaban yang diberikan oleh responden melalui kuesioner (lihat lampiran A), kemudian dimasukkan kedalam tabel berdasarkan proporsinya dan dicoding, misalnya proporsi pertanyaan tersebut adalah 1). selalu ikut, 2). jarang, 3). jarang sekali, dan 4). tidak pernah; bila jawaban responden adalah 2 (jarang), maka dimasukkan dalam tabel dengan penulisan 0-1-0-0, karena pilihan responden adalah 2 maka dicoding dengan angka 2, demikian pula halnya apabila pilihan responden adalah jawaban angka 3 (lihat contoh dibawah ini).

0 1 0 0 2 , 0 0 1 0 3

Hasil coding tersebut selanjutnya ditransformasi dengan bantuan perangkat komputer melalui *Statistical Product & Service Solution* (SPSS), maka akan didapat kategori batasan rendah dan tinggi, sehingga dapat dihitung nilai range. Apabila diperoleh batasan kategori rendah adalah 2,000 dan batasan kategori tinggi adalah 6,940, maka nilai interval rata-rata (*scale value*) adalah 1,647, maka kategori rendah berada dalam interval 2,000-3,647, kategori sedang berada dalam interval 3,647-5,293, dan kategori tinggi berada dalam interval 5,293-6,940.(lihat daftar lampiran B).



Dari perhitungan melalui bantuan SPSS maka juga didapat distribusi frekuensi responden yang tergolong pada kategori rendah, sedang dan tinggi. Kategori rendah dalam tipologi Arstein tergolong dalam tingkatan tidak berpartisipasi (*non participation*), kategori sedang tergolong dalam tingkatan penghargaan atau formalitas (*degrees of tokenism*), dan kategori tinggi tergolong dalam tingkat kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*).

4.1.2.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pra Konstruksi

Tingkat partisipasi yang dianalisis pada tahap ini meliputi aspek tingkat kehadiran warga dan keaktifan warga dalam memberikan usulan. Distribusi frekuensi yang diperoleh dari jumlah 100 responden, untuk yang tergolong pada kategori rendah berjumlah 56 responden, kategori sedang berjumlah 27 responden, dan yang tergolong pada kategori tinggi berjumlah 17 responden.

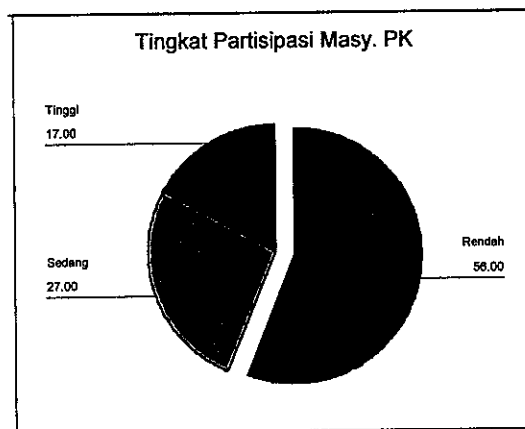
Jadi kategori tingkat partisipasi pada tahap pra konstruksi tergolong pada kategori rendah. (Lihat Tabel IV.12. dan hasil perhitungan tranformasi data pada daftar lampiran A dan B). Untuk lebih jelasnya, hasil analisis tingkat partisipasi pada tahap pra konstruksi, dapat dilihat pada Tabel IV.8. di bawah ini dan Gambar 4.7. di halaman berikutnya.

TABEL IV.8.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

Tingkat Partisipasi Masy. PK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rendah	56	56.0	56.0	56.0
Sedang	27	27.0	27.0	83.0
Tinggi	17	17.0	17.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.7.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

4.1.2.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Konstruksi

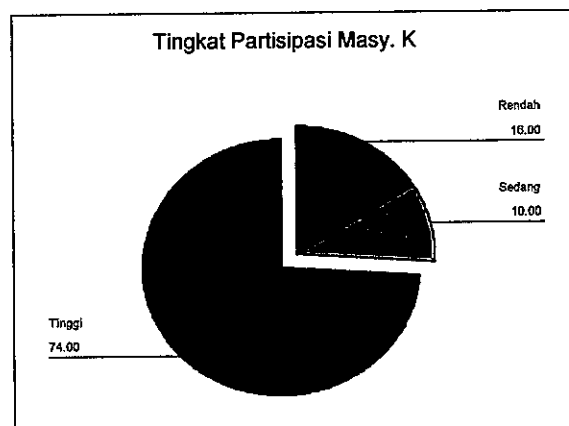
Tingkat partisipasi yang dianalisis pada tahap ini meliputi aspek asal biaya pembuatan WC/kamar mandi. Distribusi frekuensi yang diperoleh dari jumlah 100 responden, untuk yang tergolong pada kategori rendah berjumlah 16 responden, kategori sedang berjumlah 10 responden, dan yang tergolong pada kategori tinggi berjumlah 74 responden. Jadi kategori tingkat partisipasi pada tahap konstruksi tergolong pada kategori tinggi. (Lihat Tabel IV.12. dan hasil perhitungan transformasi data pada daftar lampiran A dan B). Untuk lebih jelasnya, hasil analisis tingkat partisipasi pada tahap konstruksi, dapat dilihat pada Tabel IV.9. dan Gambar 4.8. di bawah ini.

TABEL IV.9.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP KONSTRUKSI

Tingkat Partisipasi Masy. K

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rendah	16	16.0	16.0	16.0
Sedang	10	10.0	10.0	26.0
Tinggi	74	74.0	74.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.8.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

4.1.2.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pasca Konstruksi

Tingkat partisipasi yang dianalisis pada tahap ini meliputi aspek ketepatan dalam membayar iuran. Distribusi frekuensi yang diperoleh dari jumlah 100 responden, untuk yang tergolong pada kategori rendah berjumlah 3 responden, kategori sedang berjumlah 0 responden, dan yang tergolong pada kategori tinggi berjumlah 97 responden.

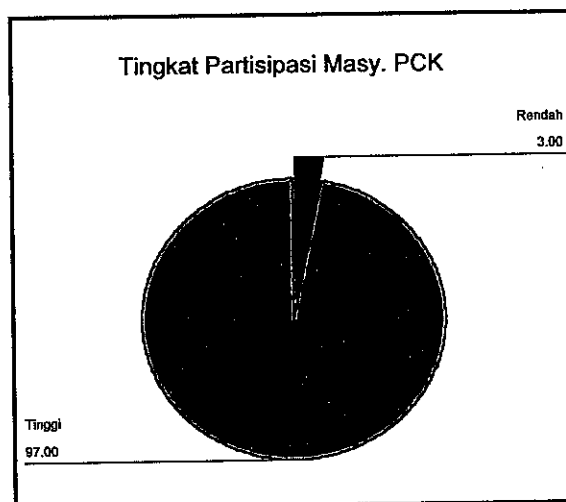
Jadi kategori tingkat partisipasi pada tahap pasca konstruksi tergolong pada kategori tinggi. (Lihat Tabel IV.12. dan hasil perhitungan tranformasi data pada daftar lampiran A dan B). Untuk lebih jelasnya, hasil analisis tingkat partisipasi pada tahap pasca konstruksi, dapat dilihat pada Tabel IV.10. dan Gambar 4.9. di bawah ini.

TABEL IV.10.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PASCA KONSTRUKSI

Tingkat Partisipasi Masy. PCK

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rendah	3	3.0	3.0	3.0
Tinggi	97	97.0	97.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.9.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA TAHAP PASCA KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

4.1.2.4. Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Seluruh Tahapan

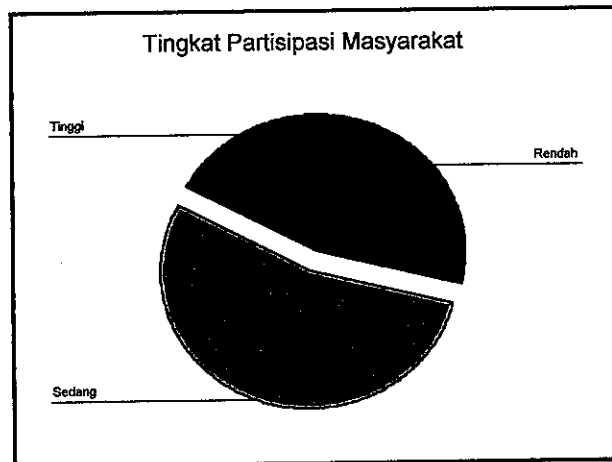
Setelah distribusi frekuensi dan kategori dari masing-masing tahapan dianalisis dan diketahui hasilnya, selanjutnya dianalisis kategori dari total tahapan dalam tingkat partisipasi masyarakat. Distribusi frekuensi tingkat partisipasi yang diperoleh dari jumlah 100 responden, untuk yang tergolong pada kategori rendah berjumlah 29 responden, kategori sedang berjumlah 54 responden, dan yang tergolong pada kategori tinggi berjumlah 17 responden. Jadi kategori tingkat partisipasi pada seluruh tahapan tergolong pada kategori sedang. (Lihat Tabel IV.12. dan hasil perhitungan tranformasi data pada daftar lampiran A dan B). Hasil analisis tingkat partisipasi pada seluruh tahapan, dapat dilihat pada Tabel IV.11. dan Gambar 4.10. di bawah ini.

TABEL IV.11.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA SELURUH TAHAPAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Rendah	29	29.0	29.0	29.0
Sedang	54	54.0	54.0	83.0
Tinggi	17	17.0	17.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Data primer diolah 2003



GAMBAR 4.10.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA SELURUH TAHAPAN

Sumber: Data primer diolah 2003

Setelah hasil perhitungan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi tersebut dilakukan, maka kategori tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Mergosono dapat digolongkan pada kategori sedang. Untuk lebih jelasnya lihat pada Tabel IV.12. di bawah ini.

TABEL IV.12.
KATEGORI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT

NO	VARIABEL	INDIKATOR	TAHAP PEMBANGUNAN	KATEGORI SKOR	DIS FREK	JML. RES.
	Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Pra Konstruksi	RENDAH 2,000 – 3,647	56	100
				SEDANG 3,647 – 5,293	27	
				TINGGI 5,293 – 6,940	17	
			Konstruksi	RENDAH 1,000 – 1,717	16	100
				SEDANG 1,717 – 2,433	10	
				TINGGI 2,433 – 3,150	74	
			Pasca Konstruksi	RENDAH 1,000 – 1,804	3	100
				SEDANG 1,804 – 2,608	0	
				TINGGI 2,608 – 3,412	97	
Partisipasi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Keseluruhan Tahapan	RENDAH 6,326 – 8,718	29	100	
			SEDANG 8,718 – 11,110	54		
			TINGGI 11,110 – 13,502	17		

Sumber: Data primer diolah 2003

4.2. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Partisipasi Masyarakat

Seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa faktor internal tersebut meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal, status hunian, dan faktor eksternal yang terdiri dari sosialisasi program oleh pemerintah. Untuk mengetahui apakah faktor tersebut mempunyai hubungan dengan bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, maka akan diuji dengan perhitungan tabulasi silang (*Cross Tab*) untuk mengetahui taraf signifikansinya.

4.2.1. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Variabel faktor internal yang dianalisis pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi adalah aspek jenis kelamin yang meliputi responden laki-laki dan perempuan; aspek usia yang meliputi responden berusia 20-<30 tahun, 30-<40 tahun, 40-<50 tahun, dan >50 tahun; aspek tingkat pendidikan yang meliputi responden berpendidikan setingkat SD, SLTP, SMU, dan setingkat sarjana; aspek jenis pekerjaan yang meliputi pekerjaan PNS/ABRI, pensiunan, swasta, buruh, pedagang, wiraswasta dan belum bekerja; aspek tingkat pendapatan yang meliputi responden yang berpendapatan <600 ribu, 600-900 ribu, >900 ribu-1,2 juta, dan >1,2 juta; aspek lama tinggal yang meliputi tinggal selama <1 tahun, 1-4 tahun, 5-9 tahun, dan >10 tahun; aspek status hunian yang meliputi hak milik, hak guna bangunan, sewa/kontrak <5 tahun, dan sewa/kontrak >5 tahun; serta analisis variabel eksternal yang terdiri dari aspek intensitas sosialisasi program oleh pemerintah yang meliputi sering, jarang, jarang sekali, dan tidak pernah dilakukan sosialisasi.

4.2.1.1. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pra Konstruksi

Hasil analisis hubungan faktor internal dan eksternal dengan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pra konstruksi dilakukan melalui perhitungan *chi square* dan taraf signifikansi (perhitungan dapat dilihat pada daftar lampiran H halaman 1-8), hasil tersebut dapat dilihat dalam Tabel IV.13. di bawah ini.

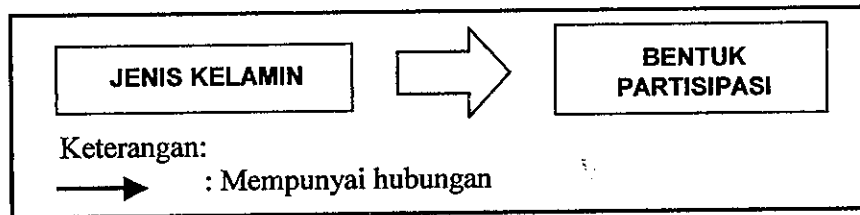
TABEL IV.13.
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE DAN TARAF SIGNIFIKANSI
BENTUK PARTISIPASI PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

No.	Karakteristik	Chi-Square	Bentuk		Ket
			Contingency Coefficient	Significance	
1	Jenis Kelamin	10,763	0,312	0,005	Signifikan
2	Usia	2,677	0,161	0,848	Tidak
3	Tk. Pendidikan	5,164	0,222	0,523	Tidak
4	Jenis Pekerjaan	14,992	0,361	0,242	Tidak
5	Tk. Pendapatan	6,647	0,250	0,355	Tidak
6	Lama Tinggal	3,264	0,178	0,775	Tidak
7	Status Hunian	2,778	0,164	0,836	Tidak
8	Sosialisasi Program	2,183	0,164	0,702	Tidak

Sumber: Data primer diolah 2003

Berdasarkan perhitungan pada tahap pra konstruksi menunjukkan bahwa sebagian besar variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil uji *Significance* (Sig.) yang menunjukkan bahwa sebagian besar nilai koefisien kontingensi mempunyai nilai (Sig.) $> 0,05$, kecuali untuk variabel jenis kelamin yang mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,312 dengan nilai (Sig.) 0,005. Hal ini mengartikan bahwa antara tingkat pendidikan dengan bentuk partisipasi dalam tahap pra konstruksi mempunyai hubungan yang kecil (tidak erat).

Hubungan antara variabel pengaruh dengan variable terpengaruh pada tahap konstruksi tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 4.11. di halaman berikutnya.



GAMBAR 4.11.
HUBUNGAN VARIABEL PENGARUH DENGAN BENTUK PARTISIPASI
PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

4.2.1.2. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Konstruksi

Hasil analisis hubungan faktor internal dan eksternal dengan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap konstruksi dilakukan melalui perhitungan *chi square* dan taraf signifikansi (perhitungan dapat dilihat pada daftar lampiran H halaman 9-16), hasil tersebut dapat dilihat dalam Tabel IV.14. di bawah ini.

TABEL IV.14.
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE DAN TARAF SIGNIFIKANSI
BENTUK PARTISIPASI PADA TAHAP KONSTRUKSI

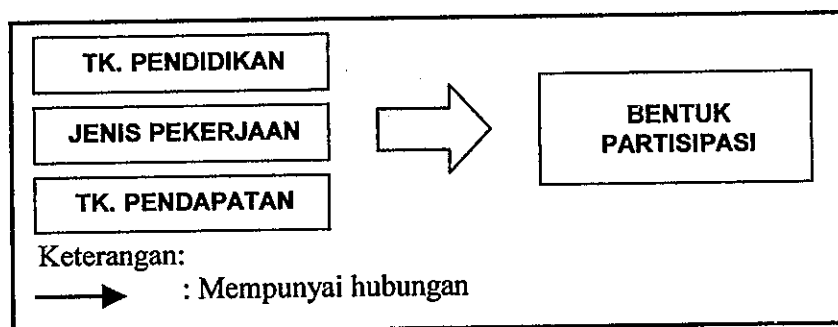
No.	Karakteristik	Bentuk Partisipasi			Ket
		Chi-Square	Contingency Coefficient	Significant	
1	Jenis Kelamin	1,681	0,129	0,431	Tidak
2	Usia	3,646	0,188	0,725	Tidak
3	Tk. Pendidikan	19,742	0,406	0,003	Signifikan
4	Jenis Pekerjaan	28,294	0,470	0,005	Signifikan
5	Tk. Pendapatan	19,209	0,401	0,004	Signifikan
6	Lama Tinggal	7,573	0,265	0,271	Tidak
7	Status Hunian	7,491	0,264	0,278	Tidak
8	Sosialisasi Prog.	5,603	0,230	0,231	Tidak

Sumber: Data primer diolah 2003

Berdasarkan perhitungan pada tahap konstruksi menunjukkan bahwa sebagian besar variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil uji *Significance* (Sig.) yang menunjukkan bahwa sebagian besar nilai koefisien kontingensi mempunyai nilai (Sig.) > 0,05, kecuali untuk variabel tingkat pendidikan yang mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,406 dengan

nilai (Sig.) 0,003. Hal ini mengartikan bahwa antara tingkat pendidikan dengan bentuk partisipasi dalam tahap pra konstruksi mempunyai hubungan yang sedang (moderat). Jenis pekerjaan juga mempunyai hubungan, karena mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,470 dengan nilai (Sig.) 0.005, sehingga antara jenis pekerjaan dengan bentuk partisipasi dalam tahap pra konstruksi juga mempunyai hubungan yang sedang (moderat). Selain itu Tingkat pendapatan juga mempunyai hubungan dengan bentuk partisipasi dalam tahap pra konstruksi karena mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,401 dengan nilai (Sig.) 0,004, sehingga antara jenis pekerjaan dengan bentuk partisipasi dalam tahap pra konstruksi juga mempunyai hubungan yang sedang (moderat).

Hubungan antara variabel pengaruh dengan bentuk partisipasi pada tahap konstruksi tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 4.12. di bawah ini.



GAMBAR 4.12.
HUBUNGAN VARIABEL PENGARUH DENGAN BENTUK PARTISIPASI
PADA TAHAP KONSTRUKSI
Sumber: Data primer diolah 2003

4.2.1.3. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pasca Konstruksi

Hasil analisis hubungan faktor internal dan eksternal dengan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pasca konstruksi dilakukan melalui perhitungan *chi square* dan taraf signifikansi (perhitungan dapat dilihat pada daftar lampiran H halaman 17-24), hasil tersebut dapat dilihat dalam Tabel IV.15. di halaman berikutnya.

TABEL IV.15.
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE DAN TARAF SIGNIFIKANSI
BENTUK PARTISIPASI PADA TAHAP PASCA KONSTRUKSI

No.	Karakteristik	Bentuk Partisipasi			Ket
		Chi-Square	Contingency Coefficient	Significance	
1	Jenis Kelamin	3,115	0,174	0,211	Tidak
2	Usia	6,191	0,241	0,402	Tidak
3	Tk. Pendidikan	8,258	0,276	0,220	Tidak
4	Jenis Pekerjaan	10,851	0,313	0,542	Tidak
5	Tk. Pendapatan	3,989	0,196	0,678	Tidak
6	Lama Tinggal	0,882	0,093	0,990	Tidak
7	Status Hunian	3,975	0,196	0,680	Tidak
8	Sosialisasi Prog.	2,306	0,150	0,680	Tidak

Sumber: Data primer diolah 2003

Berdasarkan perhitungan pada tahap pasca konstruksi menunjukkan bahwa seluruh variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil uji *Significance* (Sig.) yang menunjukkan bahwa seluruh nilai koefisien kontingensinya mempunyai nilai (Sig.) > 0,05.

4.2.2. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Analisis ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor internal yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal dan status hunian, serta faktor eksternal yang meliputi sosialisasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

4.2.2.1. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pra Konstruksi

Hasil analisis hubungan faktor internal dan eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pra konstruksi dilakukan melalui perhitungan *chi square* dan taraf

signifikansi (perhitungan dapat dilihat pada daftar lampiran J halaman 1-8), hasil tersebut dapat dilihat dalam Tabel IV.16. di bawah ini.

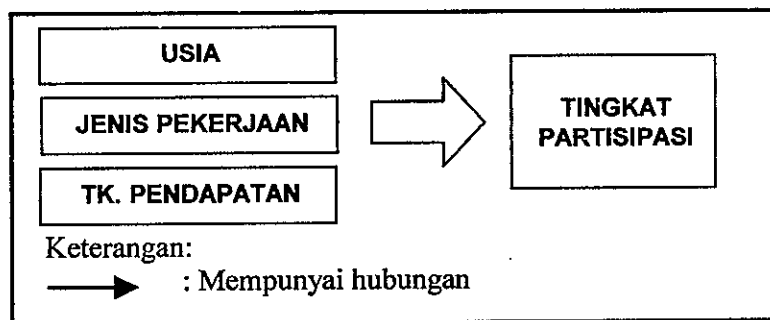
TABEL IV.16.
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE DAN TARAF SIGNIFIKANSI
TINGKAT PARTISIPASI PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

No.	Karakteristik	Tingkat Partisiapsi			Ket
		Chi-Square	Contingency Coefficient	Significance	
	Jenis Kelamin	1,354	0,116	0,508	Tidak
	Usia	22,158	0,426	0,001	Siknifikan
	Tk. Pendidikan	6,918	0,254	0,328	Tidak
	Jenis Pekerjaan	23,984	0,440	0,020	Siknifikan
	Tk. Pendapatan	13,624	0,346	0,034	Siknifikan
	Lama Tinggal	11,367	0,319	0,078	Tidak
	Status Hunian	6,714	0,251	0,348	Tidak
	Sosialisasi Prog.	8,219	0,276	0,084	Tidak

Sumber: Data primer diolah 2003

Berdasarkan perhitungan pada tahap pra konstruksi menunjukkan bahwa sebagian besar variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil uji *Significance* (Sig.) yang menunjukkan bahwa sebagian besar nilai koefisien kontingensi mempunyai nilai (Sig.) > 0,05, kecuali untuk variabel usia yang mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,426 dengan nilai (Sig.) 0,001, yang dapat diartikan bahwa antara usia dengan tingkat partisipasi dalam tahap pra konstruksi mempunyai hubungan yang sedang (moderat). Jenis pekerjaan juga mempunyai hubungan karena mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,440 dengan nilai (Sig.) 0,020, hal ini dapat diartikan bahwa antara jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi dalam tahap pra konstruksi mempunyai hubungan yang kecil (tidak erat). Selain itu tingkat pendapatan juga mempunyai hubungan karena mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,346 dengan nilai (Sig.) 0,034, hal ini dapat diartikan bahwa antara tingkat pendapatan dengan tingkat partisipasi dalam tahap pra konstruksi mempunyai hubungan yang kecil (tidak erat).

Hubungan antara variabel pengaruh dengan variable terpengaruh pada tahap pra konstruksi tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 4.13. di halaman berikutnya.



GAMBAR 4.13.
HUBUNGAN VARIABEL PENGARUH DENGAN TINGKAT PARTISIPASI
PADA TAHAP PRA KONSTRUKSI

Sumber: Data primer diolah 2003

4.2.2.2. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Konstruksi

Hasil analisis hubungan faktor internal dan eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap konstruksi dilakukan melalui perhitungan *chi square* dan taraf signifikansi (perhitungan dapat dilihat pada daftar lampiran J halaman 9-16), hasil tersebut dapat dilihat dalam Tabel IV.17. di bawah ini.

TABEL IV.17.
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE DAN TARAF SIGNIFIKANSI
TINGKAT PARTISIPASI PADA TAHAP KONSTRUKSI

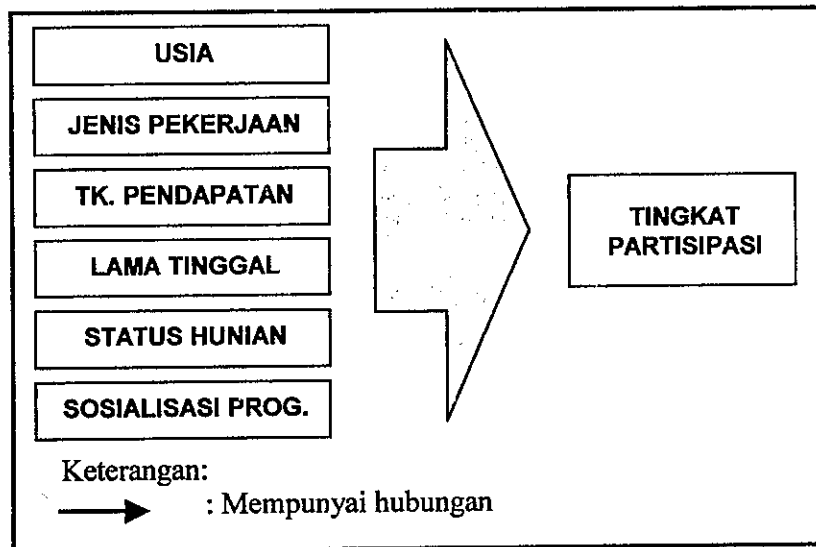
No.	Karakteristik	Tingkat Partisipasi			Ket
		Chi-Square	Contingency Coefficient	Significance	
	Jenis Kelamin	0,629	0,079	0,730	Tidak
	Usia	8,114	0,274	0,230	Tidak
	Tk. Pendidikan	60,255	0,613	0,000	Siknifikan
	Jenis Pekerjaan	24,878	0,446	0,015	Siknifikan
	Tk. Pendapatan	131,294	0,753	0,000	Siknifikan
	Lama Tinggal	15,298	0,364	0,018	Siknifikan
	Status Hunian	24,679	0,445	0,000	Siknifikan
	Sosialisasi Prog.	14,414	0,355	0,006	Siknifikan

Sumber: Data primer diolah 2003

Berdasarkan perhitungan pada tahap konstruksi menunjukkan bahwa sebagian besar variabel pengaruh dan variabel terpengaruh memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil uji *Significance* (Sig.) yang menunjukkan bahwa sebagian besar nilai

koefisien kontingensi mempunyai nilai (Sig.) $< 0,05$, antara lain tingkat pendidikan yang mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,613 dengan nilai (Sig.) 0,000, yang dapat diartikan bahwa antara tingkat pendidikan dengan tingkat partisipasi dalam tahap konstruksi mempunyai hubungan yang sedang (moderat). Jenis pekerjaan juga mempunyai hubungan karena mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,446 dengan nilai (Sig.) 0,015, hal ini dapat diartikan bahwa antara jenis pekerjaan dengan tingkat partisipasi dalam tahap konstruksi mempunyai hubungan yang sedang (moderat). Selain itu tingkat pendapatan juga mempunyai hubungan karena mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,753 dengan nilai (Sig.) 0,00, hal ini dapat diartikan bahwa antara tingkat pendapatan dengan tingkat partisipasi dalam tahap konstruksi mempunyai hubungan yang erat. Lama tinggal juga mempunyai hubungan karena mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,364 dengan nilai (Sig.) 0,018, hal ini dapat diartikan bahwa antara lama tinggal dengan tingkat partisipasi dalam tahap konstruksi mempunyai hubungan yang kecil (tidak erat). Status hunian juga mempunyai hubungan karena mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,445 dengan nilai (Sig.) 0,000, hal ini dapat diartikan bahwa antara lama tinggal dengan tingkat partisipasi dalam tahap konstruksi mempunyai hubungan yang sedang (moderat). Selain itu sosialisasi program pembangunan oleh pemerintah juga mempunyai hubungan karena mempunyai nilai koefisien kontingensi 0,335 dengan nilai (Sig.) 0,006, hal ini dapat diartikan bahwa antara sosialisasi program pembangunan oleh pemerintah dengan tingkat partisipasi dalam tahap konstruksi mempunyai hubungan yang kecil (tidak erat).

Hubungan antara variabel pengaruh dengan variable terpengaruh pada tahap konstruksi tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 4.14. di halaman berikutnya.



GAMBAR 4.14.
HUBUNGAN VARIABEL PENGARUH DENGAN TINGKAT PARTISIPASI
PADA TAHAP KONSTRUKSI
Sumber: Data primer diolah 2003

4.2.2.3. Hubungan Faktor Internal dan Eksternal dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pasca Konstruksi

Hasil analisis hubungan faktor internal dan eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pasca konstruksi dilakukan melalui perhitungan *chi square* dan taraf signifikansi (perhitungan dapat dilihat pada daftar lampiran J halaman 17-22), hasil tersebut dapat dilihat dalam Tabel IV.18. di bawah ini.

TABEL IV.18.
HASIL PERHITUNGAN CHI SQUARE DAN TARAF SIGNIFIKANSI
TINGKAT PARTISIPASI PADA TAHAP PASCA KONSTRUKSI

No.	Karakteristik	Tingkat Partisipasi			Ket
		Chi-Square	Contingency Coefficient	Significance	
	Jenis Kelamin	0,115	0,034	0,735	Tidak
	Usia	3,089	0,173	0,378	Tidak
	Tk. Pendidikan	5,046	0,219	0,168	Tidak
	Jenis Pekerjaan	2,614	0,160	0,855	Tidak
	Tk. Pendapatan	3,011	0,171	0,390	Tidak
	Lama Tinggal	0,483	0,069	0,923	Tidak
	Status Hunian	2,709	0,162	0,439	Tidak
	Sosialisasi Prog.	1,163	0,107	0,559	Tidak

Sumber: Data primer diolah 2003

Berdasarkan perhitungan pada tahap pasca konstruksi menunjukkan bahwa semua variabel pengaruh dan variabel terpengaruh tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini terlihat dari hasil uji *Significance* (Sig.) yang menunjukkan bahwa semua nilai koefisien kontingensi mempunyai nilai (Sig.) > 0,05.

4.3. Hambatan Masyarakat untuk Berpartisipasi

Meskipun secara teoritis program pembangunan pengolahan limbah cair manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyertakan peranserta masyarakat adalah ideal, namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah karena adanya beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain:

1. Hambatan yang terjadi tersebut karena kemampuan ekonomi masyarakat yang berada pada kelas menengah ke bawah. Sehingga masyarakat tersebut dituntut untuk menyediakan biaya yang relatif sangat besar untuk membangun WC/kamar mandi.
2. Hambatan yang berkaitan dengan perubahan perilaku, sulitnya untuk merubah kebiasaan masyarakat yang secara langsung membuang kotoran ke sungai.
3. Hambatan lain adalah terbatasnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga menjadi kendala dalam berkomunikasi dan menerima inovasi yang datang dari luar.
4. Sebagian besar penduduknya mempunyai jenis pekerjaan sebagai buruh dan pedagang yang pekerjaannya tidak mengenal waktu.
5. Tingkat pendapatan rendah, sehingga pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari adalah merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditunda.
6. Sulitnya mencari lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut.
7. Status hunian yang tidak jelas karena mereka membangun rumah di daerah aliran sungai (DAS) Brantas.

4.4. Temuan Unggulan Penelitian

Berdasarkan *research question*, maka dapat dikemukakan bahwa hasil temuan unggulan dalam penelitian ini adalah pertama, secara umum bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Mergosono dalam hal bentuk sumbangan yang diberikan adalah dalam bentuk tenaga, sedangkan bentuk kegiatannya umumnya dengan cara menyerahkan pada pihak ketiga dan pemerintah; kedua, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pra tergolong pada kategori rendah dan pada tahap konstruksi tergolong pada kategori tinggi serta pada tahap pasca konstruksi juga tergolong pada kategori tinggi; ketiga, Faktor yang paling berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat pendapatan.

4.5. Pembahasan Penelitian

Seperti telah diuraikan dalam Bab II, bahwa berdasarkan konsep yang dipergunakan sebagai dasar teoritis Dusseldorp dalam Slamet, 1992 dan Keith Davis dalam Sastropetro, 1988, maka bentuk partisipasi dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu bentuk sumbangan yang meliputi sumbangan pikiran, tenaga, uang dan material, serta bentuk kegiatan yang merupakan peranserta yang dilakukan secara sendiri-sendiri di lingkungannya, secara bersama-sama, dan diserahkan pada pihak lain. Berdasarkan hasil analisis, maka secara umum bentuk sumbangan yang diberikan oleh masyarakat Kelurahan Mergosono berbentuk sumbangan tenaga. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tingkat ekonomi masyarakatnya berada pada golongan menengah ke bawah dan sebagian besar tingkat pendidikannya rendah, sehingga bentuk sumbangan yang diberikan bukanlah dalam bentuk pikiran atau uang, melainkan dalam bentuk tenaga. Hal ini selaras dengan konsep Davis dalam Sastropetro, 1985:13-14, bahwa salah satu unsur dari partisipasi adalah kesediaan masyarakat untuk memberikan sumbangan dalam pencapaian tujuan, dan untuk

mencapai partisipasi yang efektif maka dibutuhkan adanya kemampuan berpikir (Ibid: 16-18). Untuk memperoleh kemampuan berpikir tersebut, dibutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi karena dengan semakin tinggi latar pendidikan seseorang maka akan semakin luas pula pengetahuan yang diperolehnya (Litwin, 1986). Selain konsep di atas, Barros (1993) menyatakan bahwa ada kecenderungan penduduk kaya lebih senang untuk mengeluarkan uang sebagai pengganti kerja fisik dan sebaliknya penduduk berpenghasilan pas-pasan cenderung berpartisipasi dalam bentuk tenaga. Dari uraian tersebut maka semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ada kecenderungan untuk memberikan kontribusi dalam bentuk pikiran, sebaliknya semakin rendah pendidikan seseorang maka ada kecenderungan untuk memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga; selain itu semakin kaya seseorang maka ada kecenderungan untuk memberikan kontribusi sumbangan dalam bentuk uang, sebaliknya semakin miskin seseorang maka ada kecenderungan untuk memberikan kontribusi sumbangan dalam bentuk tenaga.

Hasil analisis mengenai bentuk kegiatan yang diberikan menyatakan bahwa secara umum bentuk kegiatan yang diinginkan adalah menyerahkan kepada pihak ketiga dan pada pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan konsep yang dikemukakan oleh Salusu (1998), bahwa partisipasi adalah merupakan desakan psikologis dari setiap individu pada suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi tidak terlepas dari tersedianya waktu luang yang dimiliki, hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Davis dalam Sastropetro, 1985:16-18, bahwa waktu luang merupakan salah satu syarat untuk berpartisipasi. Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa waktu luang yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Mergosono adalah terbatas, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya mempunyai pekerjaan sebagai buruh kasar (dalam hal ini termasuk bekerja sebagai tukang becak) dan

pedagang, dimana mereka bekerja tanpa mengenal waktu sehingga tidak tersedia waktu/kesempatan untuk berpartisipasi. Schumbeler, 1996:32 menyatakan bahwa peranserta lebih merupakan proses dan bukan produk, sehingga masyarakat yang merasa tidak dilibatkan pada proses awal cenderung enggan dan pasif dalam berpartisipasi, oleh karena itu masyarakat sebagai pengguna hasil pembangunan hendaknya sejak awal dilibatkan dalam proses pembangunan (Yudohusodo, 1991).

Tingkat partisipasi masyarakat obyek studi pada tahap pra konstruksi tergolong rendah, dimana dalam tipologi Arstein digolongkan tidak berperanserta (*non participation*), merupakan tingkat paling bawah (1) manipulation dan (2) perbaikan (*therapy*) yang bertujuan untuk memberdayakan pemegang kekuasaan dalam mendidik dan memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat. Model masyarakat demikian menurut Dulsedorp dalam Slamet (1993), tergolong partisipasi sebagian yaitu seseorang yang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat dalam seluruhnya tahapan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa pertama, masyarakat tidak akan turut berperan serta jika merasa bahwa peran sertanya tidak akan berpengaruh pada hasil akhir; kedua, masyarakat akan enggan berperan serta dalam kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau aktifitas yang mereka lakukan dirasakan tidak akan berpengaruh secara langsung. (Conyers, D. 1994:186). Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap pra konstruksi juga disebabkan karena masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, hal ini selaras dengan konsep yang dikemukakan oleh Turner dalam Panudju, 1999:77-78, bahwa masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka.

Tingkat partisipasi pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi tergolong dalam kategori tinggi, dimana dalam tipologi Arstein digolongkan pada tingkat kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*), yang merupakan tingkatan paling atas seperti *partnership*, *delegated power*, dan *citizen power*. Namun hasil analisis menyatakan bahwa kategori tinggi ini mendekati kategori sedang, sehingga tingkat partisipasi cenderung pada tingkat *partnership* (kemitraan) yaitu dalam hal pembagian kekuasaan, antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan telah ada kesepakatan bersama untuk saling berbagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu dalam kategori tingkat ini terdapat pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada masyarakat dalam aktifitas tertentu. (Ramos dan Roman dalam Yeung, Mc Gee, 1986:97). Tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi tersebut juga tidak terlepas dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat dimana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan, karena keputusan masyarakat untuk ikut berpartisipasi tidak terlepas dari kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. (Rukmana, 1993:214).

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan, bahwa kesediaan responden untuk membiayai pembangunan WC/kamar mandi dirumah dan menyambungkannya dengan pipa paralon ke aliran primer maupun sekunder, karena melihat secara langsung fungsi dan manfaatnya. Koentjaraningrat, 1994:80 menyatakan bahwa keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, didasarkan atas keyakinan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut akan bermanfaat baginya. Selain itu masyarakat akan berpartisipasi bila keuntungan dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan (Conyers D., 1982:154).

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal, status hunian, dan sosialisasi program pembangunan oleh pemerintah, tidak semuanya berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di Kelurahan Mergosono Kota Malang.

Faktor jenis kelamin ternyata tidak berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, konsep yang dikemukakan oleh Kartasmita, 1996, tentang adanya persepsi mengenai adanya perbedaan antara kekuatan dan kelemahan yang membudaya, hal ini ternyata tidak terbukti terhadap masyarakat di lokasi penelitian. Tonggak emansipasi wanita (kelahiran R.A. Kartini), yang dimanfaatkan sebagai wahana untuk mensosialisasikan sebuah pranata sosial atau ideologi "gender" (Mardimin J., 1999), ternyata gaungnya telah sampai pada masyarakat obyek studi. Oleh karena itu konsep yang menyatakan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi, tidaklah selalu benar.

Faktor usia tidaklah berpengaruh, konsep yang dikemukakan oleh Soedarno, dkk (1992), bahwa terdapat perbedaan atas dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda. Selain itu beberapa fakta menunjukkan bahwa usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi (Slamet, 1994:142), ternyata hal ini tidak terbukti terhadap masyarakat di lokasi penelitian. Oleh karena itu konsep yang menyatakan bahwa usia berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi, tidaklah selalu benar.

Faktor tingkat pendidikan ternyata berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi. Konsep yang dikemukakan oleh Litwin (1986) bahwa salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat. Semakin tinggi latar belakang pendidikan seseorang, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan, lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat

tanggap terhadap inovasi. Tingginya tingkat pendidikan tentu akan mencerminkan perilaku, sikap kritis, dan kreatif seseorang. Lebih jauh diutarakan bahwa sikap pasif, kemandirian, dan kepekaan seseorang tidaklah tergantung dari sifat bawaan seseorang, namun juga terbentuk atas dasar kesempatan dan pengalaman yang diperolehnya selama dalam pendidikan. (Katu N. dalam Mardimin, 1999:92). Hasil distribusi frekuensi tingkat pendidikan, menyatakan bahwa 38 % responden berpendidikan tingkat SD dan 30 % responden berpendidikan SLTP, maka ada kecenderungan masyarakat akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, kepekaan dalam menerima inovasi, kurang kreatif, dan bersikap pasif. Hal inilah yang didapat pada hasil penelitian, oleh karena itu konsep yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan responden, semakin tinggi pula bentuk dan tingkat partisipasi yang akan diberikan oleh responden adalah benar.

Faktor jenis pekerjaan ternyata berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi. Konsep yang dikemukakan oleh Slamet, 1994:115-116, yang menyatakan bahwa Jenis pekerjaan mempengaruhi derajat aktifitas seseorang dalam kelompok dan mobilitas individu. Lebih jauh dikemukakan oleh Davis (Ibid:16-18) bahwa seseorang akan dapat melaksanakan partisipasi secara efektif bila memiliki waktu yang luang. Hasil distribusi frekuensi jenis pekerjaan menyatakan bahwa 31 % responden mempunyai pekerjaan sebagai buruh/pekerja kasar dan tukang becak, serta 27 % responden mempunyai pekerjaan sebagai pedagang kecil, dimana mereka bekerja siang malam tanpa mengenal waktu sehingga kecil kemungkinan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi. Seseorang yang sibuk dalam urusan bisnis atau kantor, tentunya juga memiliki kesempatan yang sangat tipis untuk berpartisipasi dibandingkan dengan seseorang yang banyak mempunyai waktu luang dalam pekerjaannya. Oleh karena itu konsep yang menyatakan jenis pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat adalah benar.

Faktor tingkat pendapatan ternyata juga berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat. Barros (1993) menyatakan bahwa, banyak hal tampak bahwa penduduk yang lebih kaya cenderung lebih senang mengeluarkan/membayar dengan uang sebagai pengganti kerja fisik. Sementara penduduk miskin lebih banyak melakukan pekerjaan dari pada mengeluarkan uang, sementara buruh yang berpenghasilan pas pasan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga. Selain itu Masyarakat hanya akan bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka (Turner dalam Panudju, 1999:77-78). Hasil distribusi frekuensi tingkat pendapatan menyatakan bahwa 36 % responden mempunyai pendapatan Rp. 600.000,-s.d.< Rp. 900.000,-/bulan dan 32 % responden mempunyai tingkat pendapatan < Rp. 600.000,-/bulan, sehingga partisipasi dalam bentuk tenaga lebih banyak dilakukan oleh masyarakat obyek studi. Selain itu, pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah merupakan prioritas bagi masyarakat obyek studi, hal ini juga selaras dengan teori Maslow (Adam I, 2000) bahwa kebutuhan manusia tersusun menurut hirarki tingkat kepentingan (*Human needs are arranged in a hierarchy of importance*). Oleh karena itu, konsep di atas yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan mempunyai pengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi adalah benar adanya.

Faktor lama tinggal seseorang tidak berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat. Taylor dalam Suparlan, 1995:96 menyatakan bahwa orang akan cenderung bekerja sama untuk menanggulangi kesulitan bersama dalam menyelamatkan rumah dan lingkungannya. Kebanyakan keluarga yang telah hidup bertahun-tahun akan ikut terlibat dalam kegiatan bersama. Namun hasil analisis menyatakan bahwa antara orang yang baru dengan orang yang telah lama tinggal, tidaklah mempunyai perbedaan untuk

berpartisipasi. Oleh karena itu, konsep yang menyatakan bahwa lama tinggal berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, tidak selamanya benar.

Status hunian ternyata tidak berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat. Turner dalam Panudju, 1999:10 menyatakan bahwa seseorang yang bertempat tinggal tanpa kejelasan status kepemilikan hunian dan lahannya, maka mereka tidak akan merasa aman dan tentram, sehingga akan mengurangi minat mereka untuk memelihara lingkungan tempat tinggalnya. Namun hasil analisis menyatakan bahwa tidak ada perbedaan besar antara penduduk yang status huniannya jelas (status hak milik dan hak guna bangunan) dalam berpartisipasi. Oleh karena itu konsep yang menyatakan bahwa status hunian mempunyai pengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, tidak selamanya benar.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Hambatan yang terjadi pada masyarakat untuk berpartisipasi berpartisipasi dalam pembangunan pengolahan limbah cair manusia, yang terutama adalah faktor ekonomi yang meliputi jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan, serta terbatasnya sumber daya manusia.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan Empiris

1. Bentuk sumbangan yang diberikan oleh masyarakat obyek studi adalah dalam bentuk tenaga, dan menyerahkan pada pihak ketiga (konsultan/pemerintah) merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada bentuk partisipasi;
2. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pra konstruksi tergolong rendah, dimana didalam tipologi Arstein tergolong dalam kategori tidak berpartisipasi (*non participation*) yaitu tingkatan dimana masyarakat hanya dapat menerima dan menjalankan kebijakan dari pemerintah. Rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap ini sesuai dengan teori hirarki kebutuhan (teori Maslow) dan konsep Conyers tentang keengganan masyarakat dalam berpartisipasi.
3. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pasca konstruksi adalah tergolong tinggi, dimana dalam kategori yang bersangkutan berada pada tingkat kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*) yaitu tingkatan dimana masyarakat mempunyai kekuatan bernegosiasi dan mengambil keputusan secara mayoritas. Namun demikian, kategori tinggi tersebut berada dekat sekali dengan batas kategori sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tergolong pada kategori kerjasama/kemitraan (*partnership*), adanya kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah untuk berbagi dalam berbagai hal. Tingginya tingkat partisipasi tersebut sesuai/mendukung dari konsep Conyers dan Koentjaraningrat, tentang manfaat yang secara langsung dapat dirasakan.

4. Tingkat Pendapatan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, hal ini mendukung konsep yang dikemukakan oleh Barros dan Maslow.

5.2. Kesimpulan Maknawi

“*Citizen control* (kontrol berada pada masyarakat) yang merupakan partisipasi masyarakat dalam tingkatan tertinggi menurut tipologi Arstein, sulit diperoleh pada masyarakat yang berpendapatan rendah”. Hal ini terjadi karena, i). adanya kecenderungan masyarakat yang berpendapatan rendah untuk menempatkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sebagai prioritas utama, ii). adanya keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang biasanya memerlukan anggaran besar, iii). masyarakat yang berpendapatan rendah, berkaitan erat dengan jenis pekerjaan yang tidak mengenal waktu, sehingga mempengaruhi waktu luang yang dimiliki untuk berpartisipasi, iv) pendapatan rendah juga berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga ada keterbatasan dalam kemampuan berpikir, terbatasnya pengetahuan yang dimiliki untuk menerima inovasi dari luar, dan kemampuan dalam berkomunikasi.

5.3. Rekomendasi

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disampaikan rekomendasi yang berupa usulan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengolah limbah cair manusia, terutama untuk program-program pembangunan selanjutnya dan bagi pengembangan studi lanjutan.

Usulan bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

- ☐ Dalam proses pelaksanaan pembangunan hendaknya benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat dan bukan hanya sekedar *retorika* belaka, sehingga program pembangunan prasarana perkotaan tersebut akan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, disamping itu dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, maka masyarakat diharapkan akan merasa ikut memiliki sehingga nantinya juga diharapkan untuk bertanggung jawab dalam hal pemeliharannya.
- ☐ Pelaksanaan program pembangunan hendaknya selalu mempehitungkan karakteristik dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.
- ☐ Selain upaya untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, hendaknya juga diimbangi dengan usaha pemberdayaan kemampuan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM).
- ☐ Pemerintah harus benar-benar dapat meyakinkan kepada masyarakat, bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan mempunyai fungsi dan akan bermanfaat bagi mereka.
- ☐ Peningkatan intensitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah, agar masyarakat lebih mengetahui arah dan tujuan program pembangunan.

Sedangkan bagi pengembangan studi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat:

- ☐ Dalam pengambilan sampel ini telah diusahakan mewakili dari seluruh populasi yang beragam dan mempunyai karakteristik yang beragam pula.
- ☐ Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi mempunyai sifat yang absolut dan belum benar-benar mutlak sehingga masih dapat diperdebatkan. Hal ini dikarenakan terbatasnya teori, terutama pada keterkaitan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Azwar, Saifuddin, 1995, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Baross, Zhu Zsa. 1993. *Prospek Perubahan Bagi Golongan Miskin Kota Dalam Parsudi Suparlan (Ed) Kemiskinan Perkotaan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintarto, R., 1983, *Urbanisasi dan Permasalahannya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1993, *Perencanaan Pembangunan*, Penerbit CV Haji Masagung, Jakarta.
- Bimo Walgito, 2000, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Budiarjo, Eko., 1992, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Budiarjo, Eko & Sudanti Hardjohutoyo, 1992, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Penerbit Gama Press, Yogyakarta.
- Daldjoeni, N. 1997, *Geografi Baru : Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung.
- Daldjoeni, N. 1992, *Seluk Beluk Masyarakat Kota: Puspa Ragam Sosiologi Kota dan Ekologi Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Drucker, Peter F., 1987, *Manajemen: Tugas dan Tanggung Jawab Praktek*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Duncan Mara. 1989, *Pemanfaatan Air Limbah & Ekskreta*, Penerbit ITB Bandung & Universitas Udayana.
- Effendi, Sofian., 1989, *Proses Penelitian Survei dalam Masri singlarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei*, Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Etzioni, Amitai, Dalam Edward E. Lawler III, et al, 1980, *Organizational Assesment: Perspective on the Measurement of Organizational Behavior and the Quality of Worklife*, New York.

- Godschalk dalam Fageance. 1997, *Citizen Participation In The Planning*, Pergamon Press Oxford England.
- Huneryager & Heckman, 1992, *Partisipasi dan Dinamika Kelompok*, Penerbit Dahara Prize, Semarang.
- Ickis, John C., 1981, *Structural Responses to New Rural Development Strategy* dalam David C. Korten dan Felipe B. Alfonso, *Bureaucracy and the Poor: Closing the Gap*, Singapore: Mc. Graw Hill International Book Company.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, CIDES, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kantor Menteri Permukiman Dan pengembangan Wilayah Bekerja Sama Dengan ITS Surabaya Dan Lab. Perumahan Dan Permukiman-Jurusan Arsitektur, *Bantuan Teknis Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Perkotaan 1999-2000*.
- Litwin, Howard. 1986. *Correlates of Community Collaburation*. In Yair Levi and Howard Litwin (Eds) *Community and Cooperative in participatory Development*, Gower Publishing Company, England.
- Mantra, Ida Bagoes dan Kasto, 1989, *Penentuan Sampel* dalam Masri singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Manullang, 1981, *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardimin, Johanes, 1999, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Mikkelsen, Britha, 1994, *Metode Penelitian Participation*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moughtin, James Clifford. 1992, *Urban Design: Street And Square*, Butterworth Heinemann Ltd. Oxford.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1995, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Penerbit IKAPI, Yogyakarta.
- Moeljarto Tjokrowinoto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Moenir, H.A.S.,1995, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng, 2000, *Kebijaksanaan Dan Perencanaan Sosial*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Mulyono, 1991, *Statistika untuk Ekonomi*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nasir, Moh. 1999, *Metodologi Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasution, 2002. *Metodologi Research*, Penerbit bumi Aksara, Jakarta.
- Nurmandi, Achmad, 1999, *Manajemen Perkotaan*, Penerbit Lingkaran Bangsa, Yogyakarta.
- Panuju, Bambang, 1999, *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Partisipasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Robert Chambers, Tadjoeeddin Noer Effendi 1996, *Participatory Rural Appraisal Memahami Desa Secara Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Rukmana, N. et al, 1993, *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Salusu J.,1996, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Sastropetro, Santoso, 1988, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Schumbeler, Peter, 1996, *Participation and Partnership in Urban Infrastructure Management*, Washington D.C, The World Bank.
- Siagian S. P., 1984, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Singarimbun, M., 1989, *Metode dan Proses Penelitian dalam Singarimbun*, Masri dan Effendi, Sofian, 1989, *Metode Penelitian Survai*, Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Sitanggang H., 1997, *Perencanaan Pembangunan: Suatu Teori dan Praktik*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Slamet, Y. 1993, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

- Soedarno, P. 1992. *Ilmu Sosiologi Dasar: Buku Panduan Mahasiswa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1983, *Ekologi Lingkungan Hidup & Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soetarno, R., 1993, *Psikologi Sosial*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiarto dkk., 2001, *Teknik Sampling*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, 1995, *Kemiskinan di Perkotaan*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 1987, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Todaro, Michael. P., 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Usman, H & Akbar, P.S., 2000, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Wasito, Hermawan, 1995, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiria, Unus Suria, 1994, *Air Dalam Kehidupan Dan Lingkungan Yang Sehat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Yudohusodo, Siswono. 1991, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, Penerbit Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.

Kelompok Terbitan Terbatas

- Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2001, *Kota Malang Dalam Angka Tahun 2000*.
- Bagian HUMAS Kota Malang, 2001, *Sekilas Kota Malang*.
- Bagian Humas Kota Malang, 2001, *Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Malang Tahun 2001-2005*.
- Dirjend Cipta Karya DPU bekerja sama dengan AIP, 1997, *Kamus Tata Ruang*, Penerbit Dirjend Cipta Karya DPU, Jakarta.

Kelompok Makalah Seminar

Sudharto, P. Hadi, 1999, *Peran Serta Masyarakat Dalam Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL.*

Haryanto. Ragil, 2001, *Seminar Kinerja dan Potensi Kota Dalam Era Otonomi Daerah.*

Kelompok Artikel

Oetomo, Andi, 1994, *Mencari Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Kota di Indonesia*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota

Sumber Sumber Lain

WWW.Deliveri.Org/Guidelines/Implementasi, Pendekatan Partisipatif.